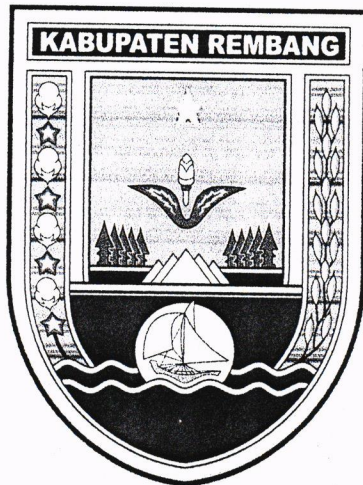


RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 2 DAN 6 AGUSTUS 2019



TENTANG RAPERDA PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2019

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194

Rembang 59212



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

**RAPAT PARIPURNA (I)
DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG
RAPERDA PERUBAHAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2019**

Hari : JUM'AT
Tanggal : 2 Agustus 2019
Waktu : 10.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT** :

1. Pembukaan;
2. Penjelasan Bupati Rembang tentang Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018;
3. Skor (Penyusunan pemandangan umum fraksi);
4. Penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Tahun 2018;
5. Skors (Penyusunan Jawaban Bupati);
6. Jawaban Bupati Atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Tahun 2018;
7. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : H. MAJID KAMIL MZ
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. DRUPODO, M. Si.
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. Fraksi Persatuan Pembangunan | : 10 orang |
| 2. Fraksi Demokrat | : 8 orang |
| 3. Fraksi Kebangkitan Bangsa | : 6 orang |
| 4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem | : 8 orang |
| 5. Fraksi Gerindra | : 5 orang |
| 6. Fraksi Karya Sejahtera | : 5 orang |
| 7. Fraksi Harapan | : 4 orang |
| Jumlah | <hr/> : 45 orang |

VII. ANGGOTA YANG HADIR

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. Fraksi Persatuan Pembangunan | : 7 orang |
| 2. Fraksi Demokrat | : 5 orang |
| 3. Fraksi Kebangkitan Bangsa | : 4 orang |
| 4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem | : 7 orang |
| 5. Fraksi Gerindra | : 3 orang |
| 6. Fraksi Karya Sejahtera | : 3 orang |
| 7. Fraksi Harapan | : 2 orang |
| Jumlah | <hr/> : 31 orang |

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| 1. Fraksi Persatuan Pembangunan | : 3 orang |
| 2. Fraksi Demokrat | : 3 orang |
| 3. Fraksi Kebangkitan Bangsa | : 2 orang |

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 1 orang
5. Fraksi Gerindra	: 2 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 1 orang
7. Fraksi Harapan	: 2 orang
Jumlah	: 14 orang

IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL MZ

LAGU INDONESIA RAYA

Asalamu'alaikumWr. Wb.

Yang terhormat

- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang kami hormati

- Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;
- Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda beserta Kepala Bagian dilingkungan Setda Kabupaten Rembang;
- Kepala Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Rembang;
- Camat Se Kabupaten Rembang;
- Serta para undangan dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali rapat paripurna, marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa , atas limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini Jum'at tanggal 2 Agustus 2019, kita berkesempatan bertemu untuk mengikuti dan melaksanakan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang dalam rangka Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD

Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 dengan keadaan sehat walafiat.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Amanat Pasal 107 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menjelaskan bahwa *“Rapat Paripurna DPRD untuk menetapkan Peraturan Daerah dan APBD dinyatakan memenuhi kuorum apabila rapat dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD ”*.

Adapun menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 31 orang. Dengan memperhatikan jumlah anggota yang hadir dan atas dasar ketentuan yang berlaku, maka keabsahan pelaksanaan rapat paripurna ini telah terpenuhi.

Selanjutnya dengan mengucapkan *“Bismillahirrohmanirrohim”* tepat pukul 14.25 WIB Rapat Paripurna I dalam rangka Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Perubahan APBD diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Perubahan APBD pada prinsipnya dilakukan untuk menyesuaikan APBD dengan perkembangan dan/atau oleh karena perubahan keadaan, jika terjadi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan / atau
- e. Keadaan luar biasa.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Sesuai agenda yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah dan TAPD pada tanggal 2 Agustus 2019 pagi tadi, dan atas dasar Pasal 12 ayat 5 Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, selengkapnya akan saya bacakan susunan acara pada rapat paripurna hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Penjelasan Bupati Atas Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019;
3. Skors (rapat fraksi untuk menyusun pandangan umum fraksi);
4. Penyampaian pandangan umum fraksi atas Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019;
5. Skors (penyusunan jawaban bupati);
6. Jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019;
7. Penutup.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Marilah kita masuki acara pokok pertama dalam rapat paripurna hari ini yaitu” Penjelasan Bupati Atas Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019”.

Kepada Saudara Bupati, waktu dan tempat dipersilahkan.

**=== PENJELASAN BUPATI ATAS RAPERDA TENTANG
PERUBAHAN APBD KAB. REMBANG TAHUN ANGGARAN 2019
===**

➤ *(Penjelasan Bupati Atas Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 terlampir)*

Terima kasih Saudara Bupati atas penyampaianannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Baru saja kita dengar bersama, penjelasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 oleh Saudara Bupati Rembang. Dari penjelasan tersebut, selanjutnya ditindak lanjuti dengan Pandangan Umum Fraksi atas Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019. Oleh karena dalam penyusunannya memerlukan waktu, maka rapat paripurna saya skors selama 15 (lima belas) menit.

(Ketuk palu 1 kali)

Waktu yang diberikan untuk menyusun pandangan umum fraksi telah habis, maka skors saya cabut dan rapat kita lanjutkan kembali.

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Marilah kita ikuti agenda pokok yang kedua, yaitu Penyampaian pandangan umum fraksi atas Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019.

Agar dalam penyampaian berjalan lancar, kepada yang ditunjuk sebagai juru bicara, saya minta menunjukkan jari terlebih dahulu :

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan | : Sdr. Zaimul Umam NS |
| 2. Fraksi Demokrat | : Sdr. Eka Siswa Kartika |
| 3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | : Sdr. Muh. Asnawi, S.Pd.I. |
| 4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem | : Sdri. Nanik Sri Sundari |
| 5. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya | : Sdr. Puji Santoso, S.P., M.H. |
| 6. Fraksi Karya Sejahtera | : Sdr. Ali Imron Wahyudi |
| 7. Fraksi Harapan | : Sdri. Nur Jannah |

Selanjutnya, secara berurutan dimulai dari Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dipersilahkan.

===== PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI =====

➤ *(Pandangan umum fraksi atas Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 terlampir)*

Terima kasih kepada juru bicara masing-masing fraksi atas penyampaian.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Acara selanjutnya yaitu Jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019. Namun sebelumnya, perlu kita berikan waktu kepada Saudara Bupati dalam menyusun jawaban ini.

Untuk itu, rapat paripurna saya skors kembali selama 10 (sepuluh) menit.

(Ketuk palu 1 kali)

Waktu yang diberikan kepada Saudara Bupati telah habis, maka skors saya cabut dan rapat kita lanjutkan kembali.

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Kita masuki agenda pokok ketiga yaitu Jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019.

Kepada Saudara Bupati, waktu dan tempat dipersilahkan.

=== JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI

===

➤ *(Jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 terlampir)*

Terimakasih Saudara Bupati atas penyampaian jawabannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Agenda pokok rapat paripurna telah kita lalui, maka selesai sudah acara rapat paripurna pada hari ini. Selesai rapat paripurna, pada hari ini juga akan dilaksanakan rapat Badan Anggaran bersama TAPD dengan acara penjelasan lanjutan atas Raperda, dilanjutkan dengan rapat Badan

Anggaran untuk melakukan pendalaman terhadap Raperda. Perlu kami sampaikan, bahwa Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 ini dalam pembahasannya dilakukan oleh Badan Anggaran dan TAPD, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, yang mana dalam pembahasannya dilakukan juga oleh komisi-komisi DPRD. Hal ini dikarenakan amanat Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 jo Pasal 20 ayat (3) Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Akhirnya, dengan mengucap "*Alhamdulillahirobbil 'alamiin*" tepat pukul 17.00 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

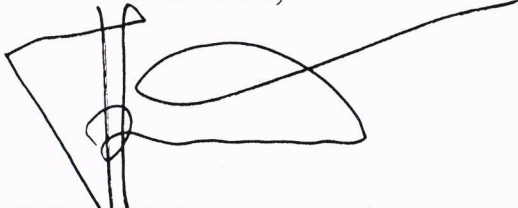
(Ketuk palu 3 kali)

Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya, serta mohon maaf atas segala kekurangan di dalam saya memimpin rapat.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

K E T U A,



H. MAJID KAMIL MZ

SEKRETARIS,



Drs. DRUPODO, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19670421 199303 1 009

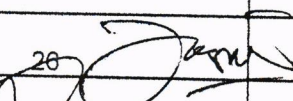
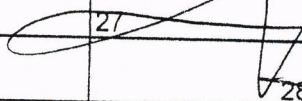
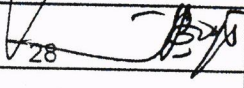
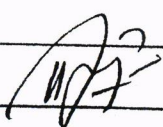
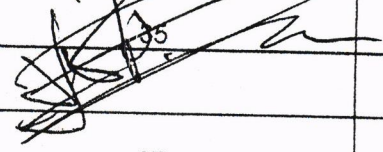
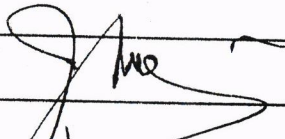
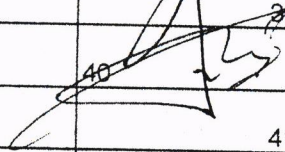
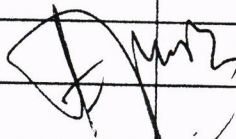
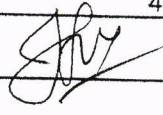
**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (I) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD,
Forum koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD dan
Camat Se Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Pengantar Nota Keuangan tentang Raperda
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;
- LAMPIRAN III : Pemandangan Umum Fraksi- Fraksi terhadap
Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran
2019;
- LAMPIRAN IV : Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum
Fraksi- Fraksi terhadap Raperda Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2019.

**RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS RAPERDA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019**

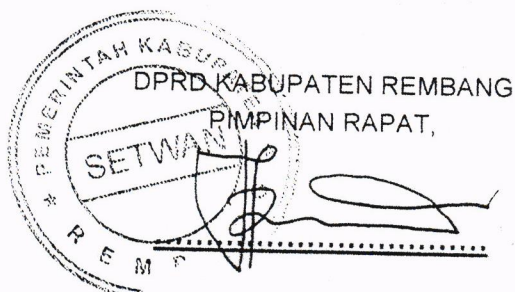
**HARI/TANGGAL : JUM'AT, 2 AGUSTUS 2019
PUKUL : 10.00 WIB**

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	3	
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	4	
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	HENRY PURWOKO, S.Pd.	Anggota	7	
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	8	
9	H. SUPADI	Anggota	9	
10	NUR HASYIM	Anggota	10	
	FRAKSI DEMOKRAT			
11	H. GUNASIH, S.E.	Wakil Ketua DPRD	11 ✓	
12	IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E, M.H.	Anggota	12	
13	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	13	
14	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	14	
15	H. ISLAHUDDIN	Anggota	15	
16	H. HARNO, S.E.	Anggota	16	
17	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	17	
18	MOHAMMAD HARIYADI	Anggota	18	
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	19 ✓	
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota	20	
21	ILYAS	Anggota	21	
22	SHOLEH, B.A	Anggota	22	
23	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi.	Anggota	23	
24	Drs. H. MUH SUBAWOTO	Anggota	24	

	FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM			
25	SUMARSIH	Wakil Ketua DPRD	25	
26	JASMANI	Anggota	26	
27	WIDODO	Anggota	27	
28	ALI IRCHAM, S.T.	Anggota	28	
29	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	29	
30	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	30	
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31	
32	SUSTIYONO	Anggota	32	
	FRAKSI PARTAI GERINDRA			
33	HERI KURNIAWAN, S.E.	Anggota	33	
33	H. CHASANUDDIN	Anggota	34	
34	PUJI SANTOSO, SP, M.H.	Anggota	35	
35	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota	36	
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37	
	FRAKSI KARYA SEJAHTERA			
38	H. ISMARI, S.H.	Anggota	38	
39	GATOT PAERAN, S.H, M.Si.	Anggota	39	
40	H. JOKO SUPRIHADI, S.H.	Anggota	40	
41	ALI IMRON WAHYUDI	Anggota	41	
	FRAKSI HARAPAN			
42	SUKARMAIN	Anggota	42	
43	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	43	
44	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd.	Anggota	44	
45	NUR JANNAH	Anggota	45	

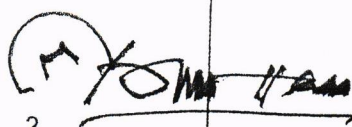
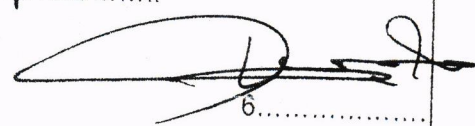
Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar

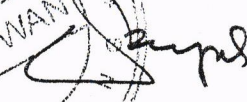


DAFTAR HADIR FORKOMPINDA
RAPAT PARIPURNA (1) DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS RAPERDA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019

HARI/TANGGAL : JUM'AT, 2 AGUSTUS 2019
 PUKUL : 10.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.	Bupati Rembang	1. 
2	H.BAYU ANDRIYANTO, S.E.	Wakil Bupati Rembang	2. 
3		Kejaksaan Negeri Rembang	3.
4		Pengadilan Negeri Rembang	4.
5	YOTOK SUNARYO, S.I.P	Dandim 0720 Rembang	5. 
6	EKO BUDI. S, SH	Kepolisian Resort Rembang	6. 
7		Pengadilan Agama Kab. Rembang	7.
8	Drs. SUBAKTI	Sekretaris Daerah	8. 

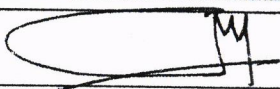
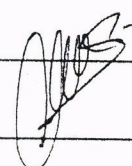
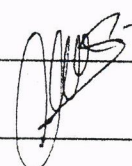
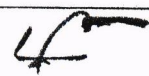
SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG



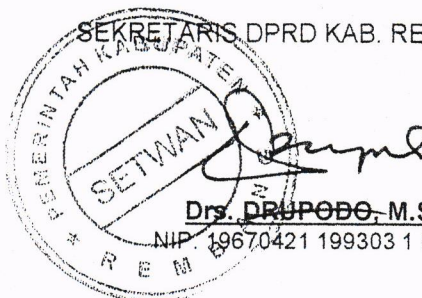
Drs. DRUPODO, M.Si
 NIP. 19670421 199303 1 009

DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS RAPERDA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019

HARI/TANGGAL : JUM'AT, 2 AGUSTUS 2019
 PUKUL : 10.00 WIB

NO	JABATAN	N A M A	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	<i>R. Santiaji Mulyo</i>	1 
2	CAMAT KALIORI		2 
3	CAMAT SUMBER	<i>Ames Cahyono</i>	3 
4	CAMAT SULANG	<i>Slamet Hujas</i>	4 
5	CAMAT BULU		5
6	CAMAT PAMOTAN		6
7	CAMAT GUNEM		7
8	CAMAT SALE		8
9	CAMAT LASEM	<i>L. H. H. H.</i>	9 
10	CAMAT PANCUR	<i>J. H. H. H.</i>	10 
11	CAMAT SEDAN		11
12	CAMAT SLUKE	<i>H. H. H. H.</i>	12 
13	CAMAT KRAGAN	<i>SUTARWI</i>	13 
14	CAMAT SARANG		14

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG



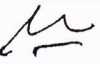
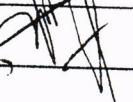
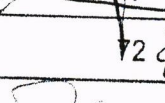
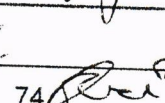
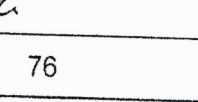
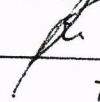
Drs. DRUPODO, M.Si
 NIP. 19670421 199303 1 009

DAFTAR HADIR SKPD
RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS RAPERDA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019

HARI/TANGGAL : JUM'AT, 2 AGUSTUS 2019
 PUKUL : 10.00 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI			1
2	STAF AHLI BUPATI			2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA	Noor Effendi	Ass II	7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN	NURPUKUNOMO	Kabag	8
9	BAG. HUKUM			9
10	BAG. HUMAS	ABDULLAH CHAPIF	Kesubag	10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	Agus Waz H	Kabag	11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN			12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT			13
14	BAG. ORGANISASI & KEPEGAWAIAN			14
15	BAG. UMUM			15
16	BPPKAD	MUSBIR	Kabag	16
17	INSPEKTORAT			17
18	BAPPEDA	CATUP SETYO XI		18
19	DINSOSP2KB	M. Muchaeron	Pelaksana..	19
20	B K D	Suparm n	Ka B Kes	20
21	B P B D			21
22	DPU TATA RUANG	SULTI HARDO	DPUTRAH	22
23	DINPERKIM	Joestian nurni	Kabin	23
24	DINAS KESEHATAN	Darmomo.	Kabid Toker.	24
25	DINDIKPORA	A. Ratih I C	Kabid Pora	25
26	DINPERINDAGKOP & UMKM	AKHSANUDDIN	Dinindagkop	26
27	DINTANPAN	Suratimin	Dintanpa	27
28	DINLUTKAN	Sofyan Chabid	Seh din	28
29	DINKOMINFO	Wartono		29
30	DINAS PERHUBUNGAN	Moh. Ikemuri	RT Radin	30

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
31	DINAS DUKCAPIL	Hoh. Saenuri	Kadus	31
32	DINPERMADES	Sudi Purnu	Kardi	32
33	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Djuharini	Kombagumpu	33
34	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			34
35	KANTOR KESBANGPOLINMAS	ADIMIKBSIH	KASI KETBANG	35
36	DINAS ARSIP & PERPUSTAKAAN	Agus Salim	hadan	36
37	DINAS PMPTSP NAKER			37
38	RSUD dr. R. SUTRASNO	Sutartik		38
39	SATPOL PP	H. WILALU YU	Kasat Pol PP	39
40	TIM PKK KAB. REMBANG			40
41	P D A M			41
42	PERCETAKAN DAERAH			42
43	PD. BANK PASAR			43
44	BANK JATENG CAB. REMBANG.			44
45	BRI CAB. REMBANG			45
46	PD BPR BKK LASEM			46
47	PT. R B S J			47
48	APOTIK DAERAH			48
49	KANTOR KEMENTRIAN AGAMA			49
50	DIPENDA PROPINSI			50
51	BPS KAB. REMBANG			51
52	RUMAH TAHANAN			52
53	PERHUTANI KPH MANTINGAN			53
54	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			54
55	KANTOR PERHUTANI SPH IV			55
56	KANTOR POS DAN GIRO			56
57	TELKOM REMBANG			57
58	PLN CAB. REMBANG			58
59	BAWASLU KAB. REMBANG			59
60	B P N KAB. REMBANG			60
61	KANTOR PAJAK			61
62	UP3AD (ASET DAERAH)			62
63	KANTOR PELABUHAN			63
64	KETUA KPI KAR REMBANG			64

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
66	PERN	H. MURICHT		66 
67	Radio Citra Bahari FM	Masudi	Reporter	67 
68	Seputar Mula - Com	Egy	Kuntawa	68 
69		Ega p	JA FICS	69 
70	Narator Rika	Dina Simal		70 
71	Lasmini	Capit		71 
72	Radar Kugus	Siful Anwar	reporter	72 
73	Chais Prasetyana	Dimbudpar	Kabid Panmascom	73 
74	A. Budo samu	BPRD	PLT Kolah	74 
75	Ind Dim	Agus	Int beam	75 
76				76
77				77
78				78
79				79
80				80
81				81
82				82
83				83
84				84
85				85
86				86
87				87
88				88
89				89
90				90
91				91
92				92
93				93
94				94
95				95
96				96
97				97
98				98
99				99

1	2	3	4	5
102				102
103				103
104				104
105				105
106				106
107				107
108				108
109				109
110				110
111				111
112				112
113				113
114				114
115				115
116				116
117				117
118				118
119				119
120				120
121				121
122				122
123				123
124				124
125				125
126				126
127				127
128				128
129				129
130				130

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

SETWAN

Drs. DRUPODO, M.Si



P E N G A N T A R
NOTA KEUANGAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG



TAHUN ANGGARAN
2019



BUPATI REMBANG

PENGANTAR NOTA KEUANGAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

Yang saya hormati, Sdr. Pimpinan DPRD, Ketua Komisi, Ketua Fraksi
dan segenap anggota DPRD;

Yang saya hormati, Rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Kabupaten Rembang;

Yang saya hormati, Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;

Yang saya hormati, Sdr. Staff Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah,
Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor,
Kepala Bagian dan Camat di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Rembang;

Yang saya hormati, Sdr. Pimpinan Organisasi Profesi, LSM dan
hadirin yang berbahagia.

Mengawali sambutan ini, perkenankanlah saya mengajak hadirin
untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas
limpahan rahmat, taufiq dan hidayah Nya, kita semua dapat menghadiri
Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penyampaian Pengantar Nota
Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran
2019.

Hadirin Sidang Dewan yang saya hormati

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 ini telah kitaawali dengan Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 yang penyusunannya berpedoman kepada :

1. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 38 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
9. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Rembang dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 019.6/2153/2019 tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
10. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Rembang dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 019.6/2152/2019 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Hadirin Sidang Dewan yang saya hormati,

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan, bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
4. Keadaan darurat;
5. Keadaan luar biasa.

Adanya Kebijakan Pemerintah sebagai dasar terjadinya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden RI Nomor 129 tahun 2018 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2019

2. PMK 187/PMK.07/2018 tentang Tatacara Penyaluran DAU Tambahan TA 2019
3. PMK 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas PMK 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
4. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No.12/PMK.07/2019 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019
5. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0002264 tentang Penyampaian Alokasi Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
6. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 422.7/5 Tahun 2019 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi daerah, kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 telah memenuhi syarat dalam Kebijakan Umum Anggaran untuk disusunnya Perubahan APBD, maka langkah yang akan ditempuh Pemerintah Kabupaten Rembang adalah :

1. Penyesuaian Pendapatan Daerah
2. Penyesuaian dan Pergeseran Anggaran Belanja Daerah
3. Penyesuaian Penerimaan Pembiayaan Daerah (SiLPA) atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018.

Berikut saya sampaikan Perubahan Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 :

PENDAPATAN DAERAH

Komponen Pendapatan Daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) semula sebesar Rp.291.855.438.071,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.18.746.154.000,00 atau 6,42% sehingga menjadi Rp.310.601.592.071,00 dengan rincian:
 - Pajak Daerah sebesar Rp.100.522.250.000,00
 - Retribusi Daerah sebesar Rp.24.102.329.000,00
 - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp.10.840.309.000,00
 - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp.175.136.704.071,00
2. Dana Perimbangan semula Rp.1.086.414.856.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.3.923.559.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp.1.090.338.415.000,00 dengan rincian:
 - Dana Transfer Umum semula Rp.842.646.897.000,00 bertambah sebesar Rp.3.923.559.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp.846.570.456.000,00
 - Dana Transfer Khusus tetap sebesar Rp.243.767.959.000,00
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah semula Rp.406.869.212.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.54.300.200.000,00 atau 13,34% sehingga menjadi sebesar Rp.461.169.412.000,00 dengan rincian
 - ❖ Pendapatan Hibah sebesar Rp.58.993.000.000,00
 - ❖ Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp.106.030.000.000,00
 - ❖ Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp.258.436.412.000,00
 - ❖ Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp.37.710.000.000,00

Total seluruh Pendapatan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 adalah Rp.1.862.109.419.071,00 naik sebesar Rp.76.969.913.000,00 atau 4,31% dari APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.1.785.139.506.071,00

BELANJA DAERAH

Pada sisi Belanja Daerah terdapat kenaikan sebesar Rp.103.425.330.697,00 terdiri dari :

Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan sebesar Rp.7.268.644.051,00 dengan rincian :

1. Belanja Pegawai berkurang sebesar Rp.13.437.612.572,00
2. Belanja Bunga bertambah sebesar Rp.500.000.000,00
3. Belanja Hibah naik sebesar Rp.7.293.392.000,00
4. Belanja Bantuan Sosial naik sebesar Rp.810.000.000,00
5. Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa naik sebesar Rp.4.740.000.000,00
6. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai Politik naik sebesar Rp.7.086.000.000,00
7. Belanja Tak Terduga turun sebesar Rp.276.864.623,00

Belanja Langsung

Pada Belanja Langsung terdapat kenaikan sebesar Rp.96.156.686.646,00 yang merupakan program dan kegiatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah se Kabupaten Rembang.

Beberapa Program dan Kegiatan yang tertampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 antara lain :

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan
4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan

5. Pembangunan Jalan dan Jembatan
6. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Perkebunan
8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan
9. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan
10. Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan

Total seluruh Belanja Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 adalah Rp.1.930.933.681.611,00 atau naik sebesar Rp.103.425.330.697,00 atau (5,65%) dari APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.1.827.508.350.914,00

PEMBIAYAAN DAERAH

Pada Penerimaan Pembiayaan Daerah terdapat kenaikan sebesar Rp.106.455.417.687,00, yang semula Rp.49.237.212.843,00 menjadi Rp.155.682.630.540,00 karena adanya penyesuaian SiLPA hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Pinjaman Jangka Pendek pada BLUD RSUD

Pada Pengeluaran Pembiayaan terdapat kenaikan sebesar Rp.80.000.000.000,00 yang semula Rp.6.868.368.000,00 menjadi sebesar Rp.86.868.368.000,00 karena pembayaran utang jangka pendek BLUD RSUD.

Sidang Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya saya sampaikan Ringkasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

PENDAPATAN DAERAH	Rp. 1.862.109.419.071,00
Pendapatan Asli Daerah	Rp. 310.601.592.071,00
Hasil Pajak Daerah	Rp. 100.522.250.000,00
Hasil Retribusi Daerah	Rp. 24.102.329.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp. 10.840.309.000,00
Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp. 175.136.704.071,00
Dana Perimbangan	Rp. 1.090.338.415.000,00
Dana Transfer Umum	Rp. 846.570.456.000,00
Dana Transfer Khusus	Rp. 243.767.959.000,00

Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp.	461.169.412.000,00
Hibah	Rp.	58.993.000.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp.	106.030.000.000,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp.	258.436.412.000,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	Rp.	37.710.000.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.862.109.419.071,00
BELANJA DAERAH	Rp.	1.930.933.681.611,19
Belanja Tidak Langsung	Rp.	1.151.306.363.256,19
Belanja Pegawai	Rp.	679.834.930.033,19
Belanja Bunga	Rp.	1.631.632.000,00
Belanja Hibah	Rp.	55.358.292.000,00
Belanja Bantuan Sosial	Rp.	8.094.660.000,00
Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	Rp.	16.684.474.900,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada - Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	Rp.	388.425.509.700,00
Belanja Tidak Terduga	Rp.	1.276.864.623,00
Belanja Langsung	Rp.	779.627.318.355,00
Belanja Pegawai	Rp.	194.066.867.834,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp.	350.073.316.316,00
Belanja Modal	Rp.	
Jumlah Belanja	Rp.	1.930.933.681.611,19
Surplus / (Defisit)	Rp.	(68.824.262.540,19)
PEMBIAYAAN DAERAH		
Penerimaan Pembiayaan Daerah		
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	Rp.	75.692.830.540,19
Penerimaan Pinjaman Jangka Pendek BLUD dari Lembaga Keuangan Bank	Rp.	80.000.000.000,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp.	155.692.630.540,19
Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
Penyertaan Modal	Rp.	3.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang	Rp.	3.868.368.000,00
Pembayaran Hutang Jangka Pendek BLUD	Rp.	80.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp.	86.868.368.000,00
Pembiayaan Netto	Rp.	68.824.262.540,19
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	-

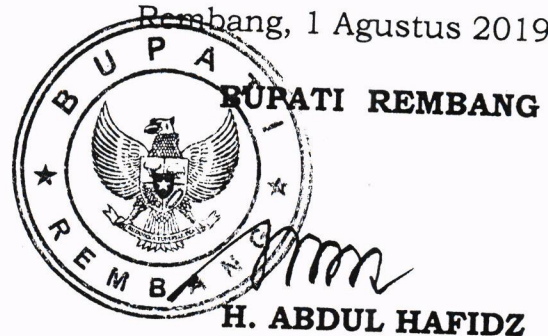
Rapat Dewan dan Hadirin yang Saya Hormati,

Demikian Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019, untuk segera dibahas melalui mekanisme pembahasan di DPRD dan selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Akhirnya tidak lupa saya menyampaikan terimakasih dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk Nya kepada kita sekalian.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 1 Agustus 2019

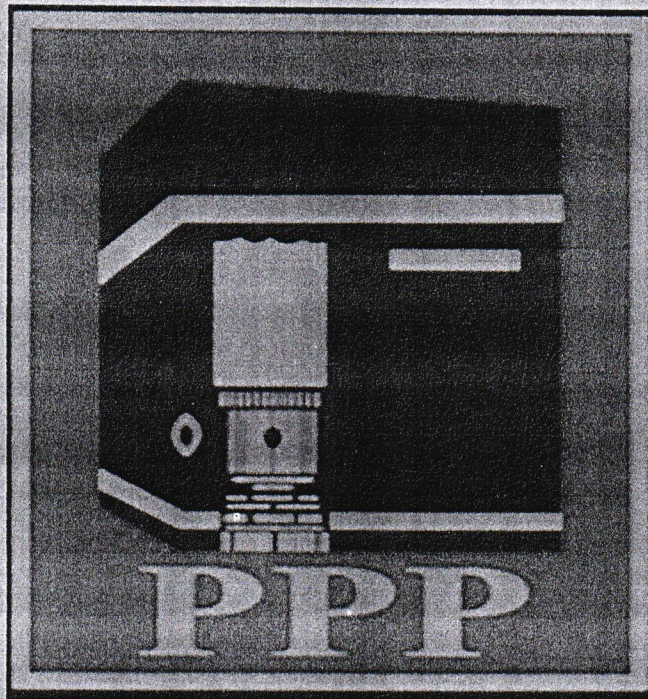


PEMANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBAGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

TERHADAP

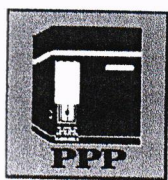
**RAPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2019**



**DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN REMBANG
Hari : Jum'at, 02 Agustus 2019
Dibacakan : MOCH ANSHORI, SH.**

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212 Rembang



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212

REMBANG

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

RAPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2019

Jum'at , 02 Agustus 2019

Dibacakan oleh : ZAIMUL UMAM NS.

Assalamu a,laikum Warohmatullahi wabarokatuh....

Selamat siang , dan Salam sejahtera bagi kita semua

Bismillah., Alhamdulillah., Assholatu Wassalamu a'la Rosulilla., Wa'alaa alihi wasohbihi wamawwalah., laahaula walaa quwwata illabillah..., Amma ba'da.....

Yang kami hormati :

=> Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang.

=> Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang.

- => Sdr. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang.
- => sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda, dan para Camat dilingkungan Kabupaten Rembang.
- => Sdr. Sekretaris Dewan beserta staf . Dan..
- => Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan, serta semua hadirin yang berbahagia.

Sebelum kami lanjutkan penyampaian Pemandangan Umum ini, terlebih dahulu marilah kita, selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT, atas segala limpahan Rohmat, Nikmat, Taufik dan HidayahNYA yang dikaruniakan pada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan hadir pada Rapat Paripurna ini , dalam keadaan sehat Wal afiat.

Sholawat dan salam, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita MUHAMMAD SAW, para shahabat, beserta seluruh keluarganya.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini , meskipun sedikit terlambat , kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyampaikan “ SELAMAT HARI JADI KOTA REMBANG YANG KE 278 “ Smoga kedepan Rembang Tambah Jaya Dan diberikan lebih baik dari tahun yang lalu, dan Pemerintahan Kabupaten Rembang diberikan Kelancaran serta Kemudahan dalam semua urusan , sehingga segera dapat mewujudkan Rembang yang sejahtera... Amiin.

Sdr. Bupati dan wakil Bupati, serta segenap Sidang Dewan yang kami Hormati...,

Mengawali penyampaian Pemandangan umum kami , terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang tahun 2019, yang paparan dan penjelasannya telah disampaikan oleh sdr. Bupati, dalam rapat paripurna, beberapa puluh menit yang lalu , pada hari ini , Jum'at , tanggal 02 Agustus 2019 , Kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Rembang , terutama kepada TAPD , yang telah bekerja keras, sehingga penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD tahun 2019 ini , dapat diselesaikan sesuai dengan jadual waktu yang direncanakan , sehingga dapat segera untuk dilakukan pembahasan .

Sidang Dewan yang kami hormati.....,

Setelah kami melakukan kajian dan telaah yang cukup , terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun 2019 ini , yang dimulai dari awal pembahasan KUA/PPAS Perubahan 2019 di Semarang , sampai disepakatinya KUPA/PPAS , oleh Pihak Excutif dan DPRD , pada hari Selasa , tanggal 30 Juli 2019 yang lalu , kami dari Fraksi Partai persatuan Pembangunan , dalam Pemandangan Umum ini, menyampaikan catatan sebagai usulan dan masukan , sebagai berikut :

1. Di dalam Laporan Realisasi APBD Induk Tahun Anggaran 2019 , sampai dengan triwulan ke II , dilaporkan bahwa realisasi kegiatan dari seluruh OPD , capaian progressnya baru sebesar 38,12 % , dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar 25,18 % , Progress tersebut termasuk dalam kategori *RENDAH* atau *LAMBAT* , Dan sampai pada ahir pembahasan KUA/PPAS Perubahan ini, capaian Progress Kumulatif pelaksanaan kegiatan dan penyerapan APBD Induk 2019, belum terbaca dengan jelas. Maka sehubungan dengan hal tersebut , agar penyerapan APBD Perubahan tahun 2019 bisa maksimal , dan agar tidak terjadi Silpa yang tinggi , kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, minta dengan sangat , agar Pihak Excutif dan semua Jajarannya , betul-betul meningkatkan kinerjanya , dengan bekerja keras dan semangat yang penuh optimis , sehingga dapat menyelesaikan semua program yang telah kita rencanakan
2. Di dalam penganggaran kegiatan, baik yang untuk Biaya Tidak Langsung maupun Biaya langsung , diminta agar selalu memprioritaskan kebutuhan yang mendasar , berpedoman pada azas manfaat , efisiensi dan kepatutan , sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku .
3. Mengevaluasi kinerja Bapeda , bahwa terjadinya keterlambatan pelaksanaan kegiatan, disebabkan karena adanya perancangan yang tidak matang , sehubungan dengan hal tersebut, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan minta , agar Bapeda dalam menyusun Perencanaan dari semua OPD, haruslah lebih cermat dan lebih matang , sehingga kedepan harus lebih baik.

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2019 ini , dan selanjutnya segera untuk dilakukan pembahasan.

Trima kasih atas segala perhatian, dan mohon maaf atas segala kekurannya.....

Billahi Taufiq wal Hidayah..., Wassalamu a'laikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.....

Rembang , 02 Agustus 2019

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA



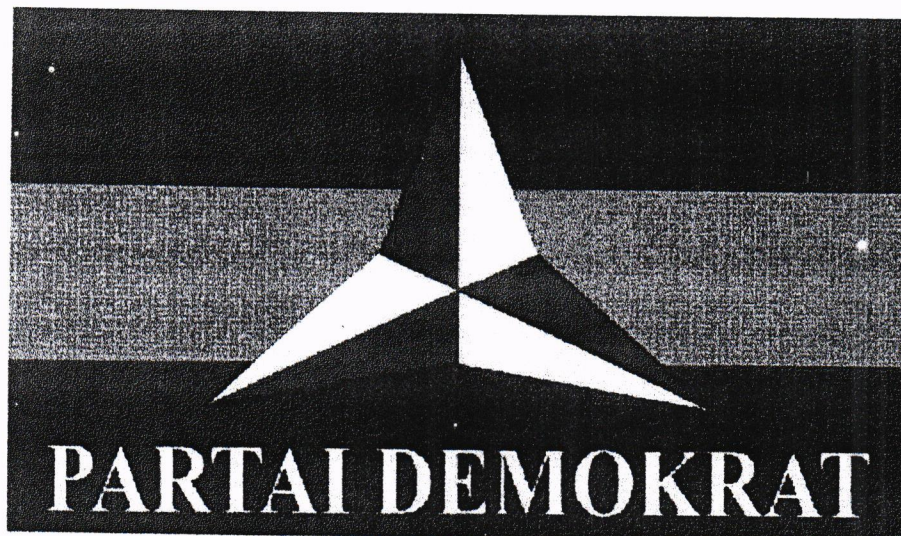
SUGIHARTO

SEKRETARIS



ZAIMUL UMAM NS

**PANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT
TERHADAP RAPERDA
TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2019**



**FRAKSI DEMOKRAT
DPRD KABUPATEN REMBANG**

**Rembang, 2 AGUSTUS 2019
Dibacakan oleh : EKA SISWA KARTIKA**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
FRAKSI DEMOKRAT
Jl. Diponegoro No. 88 Rembang
Telp. (0295) 691194

**PANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT
TERHADAP RAPERDA
TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

**JUM'AT, 2 AGUSTUS 2019
Dibacakan oleh : EKA SISWA KARTIKA**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat Siang dan Salam sejahtera bagi kita semua ;

Yang kami hormati :

1. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang
2. Saudara Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang
3. FORKOPIMDA Kabupaten Rembang
4. Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
5. Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian SETDA dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
6. Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang beserta Staff
7. Saudara Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan dan Segenap hadirin yang berbahagia

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga kita masih diberi kesehatan.

Mengawali Pandangan ini, kami mengajak para hadirin untuk mendo'akan para jamaah haji asal rembang yang menjalankan ibadah haji semoga diberi kesehatan dan keselamatan sampai pulang ke rembang menjadi haji yang mabrur.

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,

Pada kesempatan yang berbahagia ini ijinilah kami Fraksi Demokrat menyampaikan beberapa saran, pendapat dan masukan demi kebaikan Kabupaten Rembang kedepan, antara lain :

1. RAPBD Perubahan tahun 2019 ini berat sekali karena harus mengganggu kegiatan yang nilainya besar-besar, misalnya BOS dan PILKADES yang diambilkan dari kegiatan yang sifatnya penting yaitu pembangunan jalan yang justru perencanaannya sudah matang.

Keadaan seperti ini diakibatkan tidak cermat dalam hal perencanaannya.

2. Uang purna tugas atau tali asih yang rencananya akan diberikan kepada Kepala Desa yang purna tugas kami mohon di tinjau ulang kembali.

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,

Demikianlah pandangan umum Fraksi Demokrat ini kami sampaikan, akhirnya kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati, Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta segenap tamu undangan, Kami ucapkan terima kasih telah mengikuti dengan seksama penyampaian ini, Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf
Billahi Taufik Wal Hidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 2 Agustus 2019

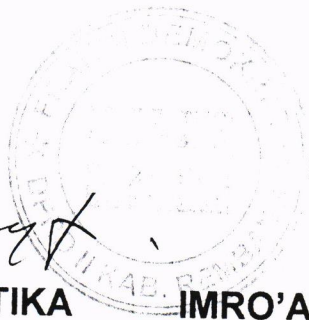
**FRAKSI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA

SEKRETARIS



EKA SISWA KARTIKA



IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E., M.H.



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG
RAPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Assalamu 'alaikum wr wb.

Yang kami Hormati, Bupati dan Wakil Bupati Rembang beserta jajarannya di lingkungan Pemkab Rembang

Yang Kami Hormati, segenap jajaran Forum Pimpinan Daerah Kabupaten

Yang kami Hormati, Pimpinan Sidang, Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang, beserta segenap anggota DPRD kabupaten Rembang.

Yang kami Hormati, Saudara Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD kabupaten Rembang beserta jajarannya.

Bismillahirrohmanirrohim,

Mengawali Pemandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini, Perkenalkanlah kami Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ikut menyampaikan selamat Hari Jadi Kabupaten Rembang yang ke 278 semoga Rembang menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya dan tidak sekedar jadi momentum sejarah dan kenangan saja, akan tetapi Hari Jadi diperingati menjadi Inspirasi Pembangunan, Inspirasi Bangkit dan Semangat / gairah dari ketidak berdayaan dan Kebiasaan Amin.

RAPBD Perubahan 2019 memang sebuah keniscayaan Peraturan Normatif yang harus dilaksanakan karena banyak faktor, pergeseran Anggaran, Penampungan bagi hasil pajak, Kepastian silpa Definitif, Dana Perimbangan dan lain-lain yang semuanya itu butuh Pencatatan Pembahasan Perubahan. Disisi lain FPKB butuh juga penjelasan : *Kenapa Pemkab sudah telat dalam menengrtukan Dabumen*

- A. ●. Bagaimana Silpa yang direncanakan Rp. 19. 237.000.000,- *KUA PPA > mengalami kenaikan Rp. 26.455.000.000,- justru dari sisi dan RAPBD Pendapatan yang sampai pertengahan tahun tidak mengalami kenaikan kecuali pada Pos Anggaran dana pembagian dan transfer umum Rp. 13.320.000.000,-.* *Perubahan*
- . Pada Pos Belanja Daerah yang mengalami kenaikan Rp. 3.555.000.000,- pada Belanja bagi Hasil Pemerintah Desa Bagaimana Pemkab bisa menjelaskan atas Keperuntukannya.

B. Fraksi PKB juga minta penjelasan bagaimana Pembangunan Infrastruktur jalan, Jembatan, Irigasi, Drainase sampai pada pertengahan tahun ini juga belum menunjukkan tanda-tanda prosentase pelaksanaan yang menggembirakan termasuk pelayanan Publik yang terus harus ditingkatkan oleh Pemkab Rembang.

Selaku Penanggung jawab mendorong kesejahteraan masyarakat secara umum serta melindungi hak jiwa, hak keturunan, hak sosial, hak pendidikan serta hak untuk sejahtera dan lain-lain.

- Ada tugas dan Kewajiban sosial yang sempat muncul di media masa terkait distribusi BPNT dan PKH yang masih dirasa butuh adanya pembenahan dan perbaikan jangan sampai terjadi tidak tepat waktu, tidak tepat sasaran apabila tidak tepat timbangan atau takaran apakah Pemkab tidak punya solusi?. Bagaimana jika diatur semacam distributor atau agen tidak hanya satu orang atau supaya tidak monopoli dan harga barang bisa bersaing dengan lainnya, seperti Kabupaten Jepara.
- Termasuk hak pemberian tunjangan pada mantan Kades yang kami anggap tidak rasional dan terlalu besar, tolong Pemerintah jelaskan apa dasar Hukumnya?.

Bukankah masih banyak sekali hak-hak masyarakat yang harus di Penuhi termasuk belanja wajib pegawai dan belanja Publik lainnya perlu diketahui bersama bahwa di Kabupaten sebelah, pemberian tali asih pada mantan Kades justru menjadi temuan BPK.

Demikian Pandangan Umum kami dari Fraksi PKB akan selalu siap bersama-sama Pemerintah kabupaten Rembang untuk ikut menjadikan pembangunan kedepan pada arah yang lebih baik, lebih Akuntabel, adapun kritik merupakan sebuah dinamika. Kritik bagian dari membangun dan bagian dari rasa Tresno atau memiliki.

Walla hul muwafiq

Illa aqwamitthariq

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Rembang, 2 Agustus 2019
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

Ketua

Muhammad Imron

Sekretaris

Ilyas





FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

PANDANGAN UMUM

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nasional Demokrat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang

Terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019

Hari / Tanggal : Jumat / 2 Agustus 2019

Dibacakan oleh :

Assalamu' alaikum Wr, Wb

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Merdeka.....Merdeka.....Merdeka....!!!

Yang terhormat, Sdr Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kab. Rembang

Yang terhormat, Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA)

Kab. Rembang

Yang Terhormat, Staf Ahli, Asisten Bupati, Semua Kabag di lingkungan Setda Rembang

Yang terhormat, Ka Dinas, Ka Badan , Ka Kantor dan Camat se- Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Sekretaris DPRD Kab. Rembang, Kabag beserta jajarannya.

Lsm, Rekan Wartawan, Ormas dan semua pihak yang telah hadir pada hari ini yang kami hormati

Hadirin Sidang Paripurna Yang Kami Muliakan,

Pada kempatan yang baik ini marilah kita mengucapkan Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas izin dan nikmatNya lah kita pada hari ini diberikan kesempatan menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang tentang pembahasan Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 , selanjutnya tak lupa Sholawat beriring salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang kita tunggu syafaatnya di Yaumul Akhir nanti.

Hadirin Sidang Paripurna yang Kami Muliakan,

Sebelum menanggapi penjelasan Saudara Bupati atas Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 , maka izinkan Kami Fraksi PDI Perjuangan Nasdem sebelumnya mengucapkan Selamat Hari Jadi Kabupaten Rembang yang ke 278, semoga Pemerintah Daerah, Aparatur Pemerintah, Tokoh Masyarakat, Alim Ulama dan Cedekiawan bersama dengan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Rembang selalu membangun suasana yang kondusif, demi mewujudkan suasana Bahagia, Aman, Nyaman, Tentram, dan Damai, sesuai dengan semboyan Rembang yang Madani. Aamiin.

Menanggapi Atas Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019, Kami Fraksi PDI Perjuangan Nasdem berpendapat :

- Dengan adanya selisih Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dimohon Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang bisa lebih memprioritaskan untuk digunakan dalam kegiatan Perbaikan Infrastruktur, karena sampai pertengahan Tahun ini Perbaikan Infrastruktur belum menunjukkan tanda-tanda pencapaian sesuai yang diharapkan.
- Kurang Maksimalnya pemungutan retribusi di Dinas Kelautan dan Perikanan karenakan proses penjualan ikan yang dilakukan diluar TPI (Tempat Pelelangan Ikan). Hal ini melanggar Peraturan Daerah tentang pengelolaan TPI (Tempat Pelelangan Ikan), maka dimohon Pemerintah Kabupaten dan

Dinas Kelautan dan Perikanan bersama dengan SatPol PP untuk bisa mentertibkan kegiatan di TPI (Tempat Pelelangan Ikan), agar pemungutan retribusi dapat lebih optimal.

- Dengan adanya berita yang berkembang terkait pemberian Tunjangan/Tali Asih kepada Kepala Desa, Kami Fraksi PDI Perjuangan Nasdem mengharapkan Kita bersama dapat menyikapi secara bijak terhadap hal tersebut, baik tentang aturan atau dasar hukum yang mendasarinya ataupun dengan jumlah nominal yang diterimakan.

Demikian telah kami sampaikan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan Nasdem, atas Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019. Semoga Pemerintah Kabupaten Rembang akan menjadi Lebih Baik kedepannya nanti. Aamiin..Aamiin..Aamiin Ya Robbal alamin.

Wabillahi taufiq wal Hidayah

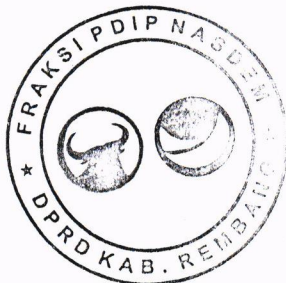
Wassalamu'alaikum Wr, Wb,

Merdeka....Merdeka....Merdeka....

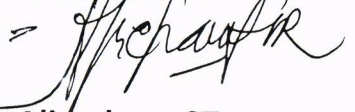
FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua


Jasmani



Sekretaris


Ali Archam, ST

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
DPRD KABUPATEN REMBANG**

ATAS

**RAPERDA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PERUBAHAN (APBD-P)
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019**



REMBANG, 2 AGUSTUS 2019

Pemandangan Umum
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN dan BELANJA DAERAH PERUBAHAN
(APBD-P) KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019

Disampaikan oleh H. Chasanuddin
Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Jumat 2 Agustus 2019

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Salam Indonesia Raya.....

Kepada Yang Terhormat dan kami Mulyakan Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Kepada Sdr. Pimpinan DPRD dan Segenap Anggota DPRD Rembang yang kami Hormati dan kami Mulyakan

Kepada Sdr. Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang yang kami Hormati dan kami Mulyakan

Yang kami hormati dan Kami mulyakan Sdr. Sekretaris Daerah dan Para Pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Serta Para Camat Se- Kabupaten Rembang;

Yang Kami hormati Sdr. Para Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan Ormas, Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia.

Mengawali kalimat pembuka, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga pada kesempatan siang hari yang baik ini, kita dapat bersama-sama menghadiri Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Rembang Tahun 2019 dalam keadaan lancar, semoga apa yang telah kita kerjakan ini menjadikan amal dan ibadah yang bermanfaat.

Selanjutnya sholawat serta salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Rosullullah Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan kebenaran bagi umat manusia, dan semoga kita termasuk dalam golongan yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amiin..Amiin ya Robbal Alamiin

Pimpinan Sidang dan Anggota Paripurna yang kami hormati dan kami muljakan,

Sehubungan dengan pembahasan Raperda APBD-P Kabupaten Rembang Fraksi Gerindra mendasar dari kepentingan masyarakat Kabupaten Rembang akan memberikan beberapa catatan-catatan sebagai berikut :

1. Dalam RPJMD Kabupaten Rembang bahwa angka kemiskinan ditargetkan turun menjadi 11,5 % sampai di Tahun 2021, namun pada tahun 2019 ini angka kemiskin masih pada angka 15, 5 %, sisa waktu 2 Tahun ini apakah bisa memenuhi angka 11,5 %. Mohon dijelaskan Program-program dari bupati serta strategi untuk mencapai target angka kemiskinan di Kabupaten Rembang tersebut!
2. Fraksi Gerindra mengingatkan kepada pemerintah daerah Kabupaten rembang, bahwa setiap tahun masyarakat Rembang mengalami bencana kekeringan, baik yang berupa kebutuhan air untuk kehidupan manusia maupun ternak maupun kebutuhan air untuk areal persawahan untuk tanaman. Untuk itu diperlukan pengelolaan air yang benar-benar bisa mencukupi kebutuhan masyarakat selama terjadi musim kemarau. Keberadaan embung, waduk, mata air, sumur air baik sumur tanah dalam maupun sumur dangkal. Saat ini keberadaannya sangat memprihatinkan, baru bulan masuk bulan agustus, tetapi banyak embung yang kering karena bocor, bendung sungai habis airnya karena terjadi sedimentasi, mata air pada kering karena hutan gundul, sungai jadi asin karena air laut mengalami pasang karena suplay air dari hulu tidak ada, PDAM kurang stok air dan lain sebagainya. Fenomena ini terjadi di Kabupaten Rembang setiap tahun. Maka diperlukan pembangunan infrastruktur yang kuat dan teknologi yang memadai agar bisa menyediakan air bersih, untuk kebutuhan rumah tangga, kebutuhan industri maupun untuk mencukupi kebutuhan hewan dan tanaman, terutama tanaman tembakau yang menjadi andalan petani Rembang. Hal ini sangat diperlukan agar kita tidak hanya menggantungkan bantuan air bersih dari Truck tangki yang hampir setiap tahun digunakan untuk memenuhi permintaan masyarakat. Selain itu perlu juga dilakukan pelestarian dan perlindungan sumber-sumber air yang semakin lama

- semakin mengecil agar air tidak habis pada generasi kita tetapi akan tetap lestari pada generasi penerus kita, untuk anak cucu kita. Mohon penjelasan!
3. Untuk mengatasi adanya bahaya kebakaran, Pemerintah Kabupaten Rembang perlu kiranya menjalin kerjasama kepada Perusahaan-perusahaan besar yang ada di Kabupaten rembang seperti PLTU dan Semen Gresik dan Perusahaan lainnya yang telah memiliki Mobil pemadam kebakaran sendiri. Hal ini sangat penting dilakukan agar ketika terjadi musibah kebakaran diwilayah yang berdekatan dengan lokasi tersebut bisa langsung diselesaikan tanpa harus menunggu lama karena sampai saat ini mobil kebakaran hanya ada di Kota Rembang. Karena yang sering terjadi ketika ada musibah kebakaran di wilayah rembang bagian timur maupun selatan, sudah dipastikan tidak bisa teratasi karena jarak tempuh yang sangat jauh. Kerjasama ini perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan ketersediaan mobil pemadam kebakaran yang ada serta tempat yang mungkin lebih bisa menjangkau untuk wilayah yang jauh dari kota. Mohon tanggapannya!

Pimpinan Sidang dan Anggota Paripurna yang kami hormati dan kami mulyakan,

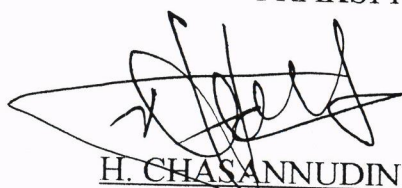
Demikian Pemandangan Umum ini kami sampaikan. Teriring doa dan semangat kerakyatan semoga Raperda ini bisa dibahas dengan penuh tanggung jawab, cermat dan tepat. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa selalu menuntun niat baik ini agar membuahkan hasil yang optimal, berguna, dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Rembang. Amiin Ya Robbal alamiin..

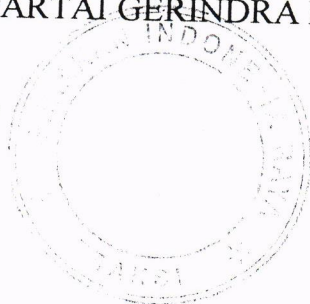
Billahitaufiq wal hidaayah,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 2 Agustus 2019

FRAKSI PARTAI GERINDRA DPRD REMBANG


H. CHASANNUDIN
Wakil Ketua




PUJI SANTOSO, SP. MH.
Sekretaris



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Sekretariat Jl. Diponegoro No 88 Rembang - Telp (0295) 693290



PANDANGAN UMUM FRAKSI KARYA SEJAHTERA DPRD KABUPATEN REMBANG

terhadap
RAPERDA PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG TA. 2018

Disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD
Kabupaten Rembang
Jum'at, 2 Agustus 2019

Assalamu'alaikum wa rohmatullohi wa barokatuh.

Yang kami hormati

- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang.
 - Saudara Pimpinan dan semua Anggota DPRD Kabupaten Rembang.
 - Saudara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
 - Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekda, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda dan Camat di kalangan Pemerintah Kabupaten Rembang.
- Para hadirin yang kami muliakan.

Mengawali acara ini perkenankanlah kami Fraksi Karya Sejahtera DPRD Kabupaten Rembang menghaturkan puji dan syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, juga mengucapkan “Sugeng Ambal Warsa Kabupaten Rembang ingkang kaping-278 (kalih atus pitung dasa wolu), mugi tansah pinaringan rohmah saha berkah saking Gusti Alloh”. Kami juga menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya rangkaian acara Hari Jadi ini, mudah-mudahan acara serupa bisa terselenggara pada tahun-tahun yang akan datang dengan modifikasi yang lebih baik lagi.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat

Menanggapi penjelasan Sdr. Bupati atas Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 yang baru saja disampaikan, ada hal-hal yang perlu kami sampaikan kepada Saudara Bupati sbb.

1. Mencermati status indikator sasaran KUA 2019 yang minus, FKS meminta penjelasan kepada Saudara Bupati antara lain;
 - Peningkatan PDRB perkapita tahun 2018 tercapai 26.540, tetapi kenapa target tahun 2019 hanya 23.000. Hal ini menunjukkan bawa tingkat pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Rembang tahun 2018 sudah relatif baik tetapi pada tahun 2019 bahkan menurun.
 - Capaian IPM tahun 2018 sebesar 14.70, kenapa target tahun 2019 hanya sebesar 10.50.

- Capaian kinerja Nilai Tukar Petani pada tahun 2018 sebesar 103.5, tetapi target tahun 2019 hanya sebesar 100.78, ini menunjukkan bahwa petani di Rembang pada tahun 2018 sudah pada tingkat sejahtera tetapi pada tahun 2019 nyaris miskin.

Atas hal-hal tersebut kami mohon penjelasan.

2. Terkait dengan Program ^{BPNT} ~~BNPT~~ (bantuan pangan non tunai) menurut pengamatan FKS banyak persoalan antara lain.

- Dari bantuan pemerintah pusat sebesar Rp. 110.000,- per-orang per-bulan, kami anggap angka itu terlalu mahal dalam pembelanjannya pada setiap e_warung yang ditunjuk dibandingkan dengan harga pasar.
- Kami juga mengamati terjadi peng-kondisian pengedropan beras dan telur pada warung-warung yang ditunjuk. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Sosial No. 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran BNPT.

Atas hal-hal tersebut kami mohon penjelasan.

3. Berdasar rilis BPS, pada bulan Juli 2019 inflasi nasional disumbang kenaikan harga cabe merah 0,20 % dan cabe rawit 0,06 %. Kalau kita melihat Raperda Inisiatif DPRD tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan, sudah ada treatment untuk memberdayakan petani yang bergerak pada bidang hortikultura termasuk petani cabe agar bisa sejahtera.

Pertanyaannya, sampai dimanakah pengawalan proses raperda tsb. sampai ke pengundangannya ?

4. Pada musim kemarau ini, banyak sekali bencana kebakaran bahkan pernah terjadi seminggu terjadi 3 kali kebakaran. Menghadapi bencana kebakaran ini, kami minta kepada Saudara Bupati untuk menambah armada pemadam kebakaran. Seyogyanya tiap kecamatan memiliki sekurangnya 1 armada pemadam kebakaran.

5. Dari pengawasan yang kami laksanakan, kami menemukan pembangunan embung yang belum umur setahun sudah tidak bisa difungsikan karena bocor ~~alias jebol~~, yakni embung Njanggan desa Selopuro kecamatan Lasem. Kenapa hal ini terjadi

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Demikian pandangan umum ini, bila ada kata-kata yang kurang berkenan pada penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Karya Sejahtera kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah senantiasa memberi petunjuk, bimbingan dan keselamatan kepada kita semua dalam mengemban amanah selaku abdi masyarakat dan abdi negara

Rahayu ingkang samya pinanggih - Wassalamu'alaikum wa rohmattullohi wa barokatuh.

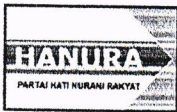
DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Ketua,

H. ISMARI

Sekretaris,

JOKO SUPRIHADI, SH



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI HARAPAN

Sekretariat: Jl. Diponegoro No.88 Rembang



**PANDANGAN UMUM
FRAKSI HARAPAN
DPRD KABUPATEN REMBANG**

terhadap
**RAPERDA PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG TA. 2019**

Disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD
Kabupaten Rembang
Hari Jum'at 2 Agustus 2019

Assalamu'alaikum wa rohmatullohi wa barokatuh.

Yang kami hormati

- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang.
- Saudara Pimpinan dan semua Anggota DPRD Kabupaten Rembang.
- Saudara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
- Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekda, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda dan Camat di kalangan Pemerintah Kabupaten Rembang.

Segala puji bagi Allah yang melimpahkan taufik rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Semoga Allah senantiasa memberi hidayah dan keselamatan kepada kita semua untuk mengemban amanah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang. Pada kesempatan ini kami mengucapkan “Selamat Hari Jadi Kabupaten Rembang yang ke-278, semoga dengan bertambahnya usia Kabupaten Rembang, semakin maju daerahnya semakin sejahtera masyarakatnya. Demikian pula kami ucapkan “selamat” kepada Jemaah Haji Kabupaten Rembang yang beberapa waktu yang lalu berangkat ke tanah suci menunaikan ibadah haji, semoga menjadi haji mabrur.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat

Setelah mendengarkan Penjelasan Sdr. Bupati atas Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 yang baru saja disampaikan, ada hal-hal yang perlu kami sampaikan dalam Pandangan Umum ini sbb.

- Untuk kesekian kalinya, DPRD “dipaksa” jalan cepat untuk membahas Rancangan Perda tentang APBD atau APBD Perubahan. Tapi tak mengapa, kita semua sudah terbiasa dengan situasi dan kondisi yang demikian. Namun demikian kami mengharap hal ini tidak berulang di tahun-tahun mendatang.
- Capaian kinerja rata-rata seluruh OPD (organisasi perangkat daerah) sampai dengan triwulan ke-2 (akhir Juni 2019) belum memuaskan, demikian pula penyerapan anggaran masih cukup

rendah. Padahal sisa waktu TA 2019 tinggal 5 (lima) bulan saja, belum ditambah dengan anggaran perubahan yg akan kita tetapkan ini. Pertanyaan kami bagaimana solusi Saudara Bupati untuk menyelesaikan hal yang mengkhawatirkan ini.

- Mengenai rencana pemberian tali asih kepada purna akti kepala desa sebesar Rp 20 juta perorang, mohon ditinjau kembali agar tidak terjadi persoalan dikemudian hari.

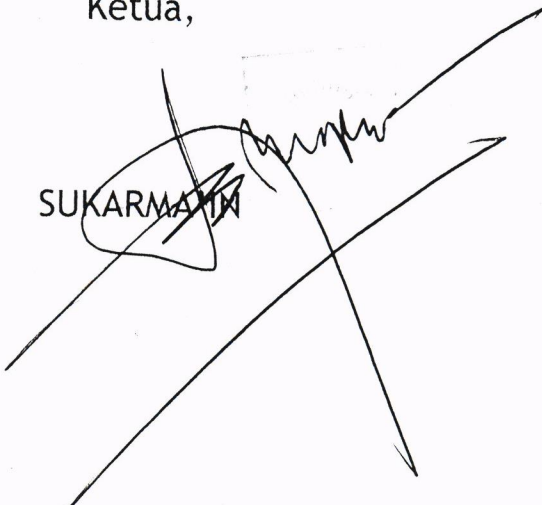
Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya Raperda ini akan dibahas oleh komisi-komisi DPRD bersama OPD. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan pada penyampaian Pandangan Umum Fraksi Harapan kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan rahmah dan berkah kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian membangun Kabupaten Rembang.

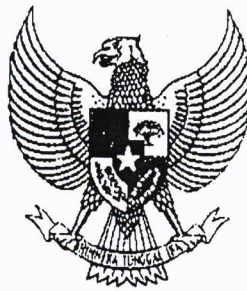
**DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSI HARAPAN**

Ketua,

Sekretaris,


SUKARMADIN

SAHNINGSIH, SE



**JAWABAN BUPATI REMBANG
ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI
DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG**



TAHUN ANGGARAN 2019



**JAWABAN BUPATI REMBANG
ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat :

- Saudara Pimpinan DPRD, Ketua Komisi, Ketua Fraksi dan segenap anggota DPRD;
- Rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;
- Saudara Pimpinan Organisasi Profesi, LSM dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali jawaban Saya atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Rembang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita masih diberi nikmat, kesehatan dan kebahagiaan.

Berkenaan dengan pertanyaan, saran, pendapat dan catatan yang disampaikan dalam Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Rembang, dapat saya jelaskan sebagai berikut :

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
	I. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	
1.	Agar penyerapan APBD Tahun Anggaran 2019 bisa maksimal Fraksi Persatuan Pembangunan meminta agar pihak eksekutif dan jajarannya meningkatkan kinerjanya sehingga dapat menyelesaikan semua program yang telah direncanakan dengan maksimal.	1. Akan kami lakukan langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran melalui rakor pengendalian pelaksanaan pembangunan secara berkala
2.	Dalam penganggaran kegiatan agar selalu memprioritaskan kebutuhan yang mendasar, berpedoman pada azas manfaat, efisiensi dan kepatutan dan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.	2. Bahwa pada APBD Penganggaran Belanja diutamakan pemenuhan urusan Wajib Belanja dan mengikat sebagaimana didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
3.	Sehubungan kinerja Bappeda Fraksi Partai Persatuan Pembangunan meminta agar dalam menyusun perencanaan semua opd dilakukan secara cermat dan lebih matang sehingga kedepan harus lebih baik.	3. Untuk perencanaan mendatang kami akan mendorong unit kerja yang membidangi perencanaan untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan melakukan koordinasi dengan perangkat daerah maupun stake holder agar lebih cermat dan tepat.

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
	II. FRAKSI DEMOKRAT	
1.	Penganggaran kegiatan BOS dan PILKADES yang diambil dari kegiatan yang bersifat penting yaitu pembangunan jalan yang mempunyai perencanaan lebih matang akibat dari tidak cermatnya dalam hal perencanaan anggaran	1. Bahwa penganggaran Dana BOS merupakan dana transfer dari pemerintah pusat yang langsung ditransfer ke masing-masing Bendahara Dana BOS masing-masing satuan pendidikan yang langsung digunakan untuk operasional Dana BOS pada satuan pendidikan ,adapun penganggaran dan pencatatannya dikonsolidasikan dalam APBD Kab. Rembang, adapun kegiatan Pilkades sesuai dengan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 untuk dianggarkan dalam APBD
2.	Pemberian uang purna tugas atau tali asih kepada Kepala Desa yang purna tugas mohon ditinjau kembali	2. Penganggaran Dana Purna Bakti/Penghasilan Lain yang sah bagi kepala desa sudah direncanakan oleh Pemkab Rembang yang dianggarkan dari rencana kenaikan pendapatan. Dana Purna Bakti yaitu sejumlah uang yang diberikan kepada Kepala Desa satu kali setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat, karena : Meninggal dunia ✓ Mengundukan diri ✓ Habis masa jabatan Dasar Hukum Pemberian Tali Asih Kepala Desa: 1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa 2) PP No. 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 82 "Penghasilan lain yang sah kepada desa diatur dengan Peraturan Bupati" 3) Mekanisme melalui Dana Bagi hasil pajak dan retribusi desa, masuk dalam APBDes

No	PERTANYAAN	JAWABAN
	<u>III. FRAKSI PKB</u>	
1.	SiLPA yang direncanakan Rp.19.237.000.000,- mengalami kenaikan Rp.26.455.000.000,-.	1 SiLPA pada APBD Tahun Anggaran 2019 direncanakan sebesar Rp.49.237.212.840,-, mengalami kenaikan sebesar Rp.106.455.417.697,19 menjadi Rp.155.692.630.540,19 terdiri dari Rp.26.455.417.697,19 untuk membiayai belanja pada Program/kegiatan OPD, sedangkan Rp.80.000.000.000,- adalah hutang jangka pendek RSUD-BLUD yang sampai bulan juli 2019 telah terbayarkan sebesar Rp.39.232.767.190,-
2.	Pendapatan tidak mengalami kenaikan, kecuali dana perimbangan	2. Dana Perimbangan, mengalami kenaikan sebesar Rp.3.923.559.000,- dikarenakan adanya PMK 12/PMK.07/2019 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)
3	Peruntukan Kenaikan Belanja Bagi Hasil Pemerintah Desa sebesar Rp.3.555.000.000,-	3 Lihat Jawaban Fraksi Demokrat
4	Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, darinase belum menunjukan prosentase pelaksanaan yang menggembirakan	4 Paket pengadaan barang jasa yang sudah ditenderkan melalui LPSE sebesar 50,84%. Terkait pengadaan langsung karena ada ketentuan pemrosesan secara elektronik (ePL), memerlukan kesiapan SDM pelaku pengadaan (PPK, Pejabat pengadaan dan Penyedia Jasa) Rata-rata fisik APBD 34,01% Kendala terkait PBJ : ➤ Pedoman penyusunan dokumen pemilihan untuk konstruksi (Peraturan Menteri PUPR No. 7 Tahun 2019) baru terbit akhir Maret 2019 sehingga tender baru efektif berjalan di awal Mei

No	PERTANYAAN	JAWABAN
5	Distribusi BPNT dan PKH, agar tidak terjadi monopoli dan harga bisa bersaing	➤ Untuk paket pengadaan langsung yang sudah berkontrak sebanyak 31,54% selebihnya dalam proses dan menunggu selesai produk konsultan 5 Saat ini Pemerintah Kabupaten Rembang dalam hal ini Dinas Sosial PPKB telah melaksanakan pemutakhiran BDT dan pada tanggal 27 Juni 2019 telah melaksanakan finalisasi closing untuk periode bulan Juli 2019, kami menunggu BNBA yang baru. Saat ini Dinas Sosial sudah bekerja sama dengan Polres Rembang untuk mensosialisasikan program ini dan akan dilaksanakan penegakkan hukum apabila terjadi pelanggaran hukum terhadap seluruh pelaku program ini mulai dari KPM, E Warung dan Suplayer BPNT, apabila ada pelanggaran bisa melapor ke Dinsos maupun ke Polres. Untuk agen E-warung penetapannya dilaksanakan oleh Bank Penyalur (BNI) berdasarkan survey kelayakan yang dilaksanakan bank didampingi Dinas Sosial. Sedangkan untuk distributor memang untuk menager suplayernya satu sedangkan suplayernya ada penggilingan padi di Kabupaten Rembang Kami sangat menghargai adanya pembenahan yang menyeluruh terhadap pelaksanaan program sosial ini, sehingga dapat terlaksana dengan lebih baik.,
6.	Dasar Hukum besaran Pemberian tunjangan Mantan Kades	6. Lihat Jawaban fraksi Demokrat

	PERTANYAAN	JAWABAN
	IV. FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM	
1.	Adanya selisih SILPA dimohon lebih diprioritaskan untuk kegiatan perbaikan infrastruktur yang sampai pertengahan tahun ini belum menunjukkan tanda-tanda pencapaian sesuai yang diharapkan.	1. • Paket pengadaan barang dan jasa yang sudah ditenderkan melalui LPSE sebesar 50,84% sedangkan rata-rata fisik APBD 34,01%. • Kendala terkait Pengadaan Barang dan Jasa dimana pedoman penyusunan dokumen pemilihan untuk konstruksi (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat) Nomor 7 Tahun 2019) baru terbit akhir Maret 2019 sehingga tender baru efektif berjalan diawal bulan mei. • Untuk pengadaan langsung karena ada ketentuan pemrosesan secara elektronik (ePL) memerlukan kesiapan SDM pelaku pengadaan (PPK, pejabat pengadaan dan penyedia jasa).
2.	Dimohon Dinas Kelautan dan Perikanan bersama Satpol PP untuk bisa menertibkan kegiatan di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) karena proses penjualan ikan yang dilakukan diluar TPI.	2. Upaya penertiban pelelangan ikan sudah dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan Satpol Air dan Pos TNI AL dan telah memberikan sanksi kepada kapal nelayan yang tidak patuh terhadap aturan pelelangan yang telah ditetapkan dan memberikan sanksi kepada bakul yang tidak melaksanakan transaksi lelang di TPI.
3.	Diharapkan kita bersama menyikapi secara bijak terkait pemberian Tunjangan/Tali Asih kepada Kepala Desa baik tentang aturan atau dasar hukum maupun nominal yang diterima.	3. Lihat jawaban pada Fraksi Demokrat.

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
	V. FRAKSI GERINDRA	
1.	Mohon penjelasan program dan strategi dari Pemkab Rembang untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan dikab. Rembang	1. Program dan strategi Pemerintah Kabupaten Rembang untuk pencapaian target penanggulangan kemiskinan : - Penurunan pengangguran dilakukan dengan perluasan kesempatan dan produktifitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan masyarakat dan pengembangan kesempatan kerja melalui pengembangan wirausaha muda, pengadaan bursa tenaga kerja. - Fasilitasi jejaring penanggulangan kemiskinan dan peran lembaga non pemerintah (BAZDA CSR) - Peningkatan kegiatan padat karya melalui penegasan dalam regulasi petunjuk pelaksanaan kegiatan dana desa yang harus dilaksanakan secara swakelola dan tenaga kerja dianjurkan menggunakan tenaga kerja lokal desa. - Pemberian bantuan jaminan kebutuhan dasar bagi lansia terlantar dan disabilitas terlantar yaitu biaya hidup dan jaminan kesehatan. - Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial dengan pemberian bantuan jaminan sosial, penyiapan bimbingan sosial bagi fakir miskin - Pemberian bantuan rumah tidak layak huni dan peningkatan kualitas permukiman kumuh serta peningkatan peran serta pemangku kepentingan dengan melibatkan dunia usaha dengan dana CSR dan Baznas. - Peningkatan usaha industri masyarakat miskin melalui pemberdayaan dan pengembangan usaha industri ekonomi keluarga miskin (industri rumahan).

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
	VI.FRAKSI KARYA SEJAHTERA DAN GOLONGAN KARYA	
1.	Peningkatan PDRB.	1. Capaian PDRB perkapita tahun 2018 sampai saat ini belum dipublish namun pertumbuhan ekonomi kabupaten Rembang pada tahun 2018 sebesar 5,90%.
2.	Capaian IPM.	2. Perlu kami sampaikan bahwa dalam RPJMD Target IPM tahun 2018 bukan 14,70 namun 68,5 sedangkan capaian IPM tahun 2018 sebesar 69,46. Sedangkan untuk tahun 2019 dalam RPJMD ditargetkan sebesar 68,8.
3.	Capaian kinerja Nilai Tukar Petani.	3. Target NTP tahun 2017 sebesar 100,58 dengan capaian 100,31 sedangkan target NTP tahun 2018 sebesar 100,68 sedangkan capaian untuk tahun 2018 belum dipublish namun setelah kami lakukan koordinasi dengan BPS bahwa capaian NTP Kab. Rembang tahun 2018 sebesar 101,8.
4.	Program Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT).	4. Menurut penjelasan dari suplayer BPNT bahwa harga beras yang dibeli dari para penggilingan padi yang bekerjasama dengan suplayer seharga Rp. 9.000,- x 9 kg = Rp. 81.000,- dan telur yang diberikan ke KPM 10 s/d 13 butir dengan harga Rp. 17.000,-. Selisih harga ini sebesar Rp. 12.000,- digunakan untuk biaya pengiriman ke titik bagi. Beras dengan kualitas layak makan di pasar rata rata harganya sebesar Rp. 9.000 s/d 10.000,- sehingga menurut kami harga tersebut sudah sesuai dengan harga pasar.

Rapat Dewan dan Hadirin yang Saya hormati,

Demikian jawaban atas pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Rembang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Untuk selanjutnya terhadap hal-hal yang masih membutuhkan penjelasan secara teknis, kami mempersilahkan untuk dibahas dan diperdalam dalam pembahasan komisi-komisi.

Akhirnya saya sampaikan terima kasih, semoga Allah SWT senantiasa memberi bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rembang, 2 Agustus 2019

BUPATI REMBANG

H. ABDUL HAFIDZ



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
R E M B A N G

RISALAH

RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019

Hari : Selasa
Tanggal : 6 Agustus 2019
Waktu : 09.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

I. JENIS RAPAT : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang

II. SIFAT RAPAT : Terbuka

III. ACARA RAPAT:

1. Pembukaan;
2. Laporan Banggar atas Hasil Pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;
3. Penyampaian Pendapat Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;
4. Persetujuan Penetapan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, dilanjutkan Penandatanganan Persetujuan dan Penyerahan Keputusan DPRD;
5. Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;
6. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : H. GUNASIH, S.E.
2. Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. DRUPODO, M. Si.
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	: 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 5 orang
2. Fraksi Demokrat	: 6 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 4 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 7 orang
5. Fraksi Gerindra	: 2 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 3 orang
Jumlah	: 31 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 5 orang
2. Fraksi Demokrat	: 2 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 2 orang

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 1 orang
5. Fraksi Gerindra	: 3 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: - orang
7. Fraksi Harapan	: 1 orang
Jumlah	: 14 orang

**IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. GUNASIH, S.E.**

LAGU INDONESIA RAYA

Asalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat

- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang kami hormati

- Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;
- Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda beserta Kepala Bagian dilingkungan Setda Kabupaten Rembang;
- Kepala Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Rembang;
- Camat Se Kabupaten Rembang;
- Dan para undangan serta hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas hidayah dan inayah yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini Selasa tanggal 6 Agustus 2019 kita masih berkesempatan bertemu di ruang rapat paripurna, untuk melaksanakan Rapat Paripurna Kedua dalam rangka pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019.

Pada pagi hari ini, kita kehilangan Kyai Sepuh wa murobbi panutan kita, yang selalu kita ikuti nasehatnya, syaikhina KH. Mbah Maemun Zubair. Innalillahi wainailaihi roji'un kami semua ikut berbelasungkawa.

Peserta rapat dan hadirin yang saya hormati.

Keabsahan kuorum Rapat Paripurna Kedua dalam rangka pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 ini, adalah sama dengan yang berlaku pada Rapat Paripurna Pertama pada tanggal 2 Agustus 2019, yaitu *dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD.*

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 107 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, yang menyebutkan bahwa rapat paripurna untuk menetapkan peraturan daerah dan APBD dinyatakan memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD.

Adapun menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD, bahwa dari sejumlah anggota DPRD Kabupaten Rembang sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir dalam Rapat Paripurna DPRD hari ini adalah sebanyak 31 orang. Dengan demikian kuorum rapat terpenuhi dan rapat paripurna dapat kita lanjutkan.

Dengan membaca "*Bismillahirrohmanirrohim*" tepat pukul 16.20 WIB, maka Rapat Paripurna hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati.

Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya akan saya bacakan susunan acara pada rapat paripurna ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan.
2. Laporan Badan Anggaran Atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019;
3. Pendapat Fraksi atas hasil Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019;
4. Persetujuan Penetapan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019, dilanjutkan penandatanganan persetujuan bersama dan penyerahan Keputusan DPRD ;
5. Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019;
6. Penutup.

Peserta Rapat dan hadirin yang berbahagia.

Marilah kita ikuti acara yang kedua, yaitu Laporan Badan Anggaran Atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019.

Untuk hal tersebut, saya minta kepada Saudara Drs. Drupodo, M.Si. untuk berkenan menyampaikannya. Dipersilahkan.

=== LAPORAN BADAN ANGGARAN ATAS HASIL PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD KAB. REMBANG T.A 2019 ===

➤ (*Laporan Badan Anggaran Atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 terlampir*)

Terima kasih Saudara Drs. Drupodo, M.Si. yang telah menyampaikan Laporan Badan Anggaran atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Memasuki acara ketiga yaitu Pendapat Fraksi atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019.

Kepada yang ditunjuk untuk menyampaikan Pendapat Fraksi, saya minta menunjukkan jari terlebih dahulu :

- 1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : Sdr. Muhammad Anshori
- 2. Fraksi Demokrat : Sdr. Eka Siswa Kartika
- 3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : Sdr. Muh. Asnawi, S.Pd.I.
- 4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem : Sdri. Nanik Sri Sundari
- 5. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya : Sdr. Puji Santoso, S.P.,M.H.
- 6. Fraksi Karya Sejahtera : Sdr. Ali Imron Wahyudi
- 7. Fraksi Harapan : Sdr. Sukarmain

Selanjutnya secara berurutan dimulai dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dipersilahkan.

Nama Fraksi	Setuju	Setuju dg. Pengubahan	Ditolak
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	✓		
Fraksi Demokrat	✓		
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	✓		
Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	✓		

Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya	✓		
Fraksi Karya Sejahtera	✓		
Fraksi Harapan	✓		

Terima kasih kepada juru bicara masing-masing fraksi atas penyampaiannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Berdasarkan laporan dari Badan Anggaran maupun pendapat dari masing-masing Fraksi, sudah dapat kita simpulkan apakah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 dapat disetujui , disetujui dengan pengubahan ataupun ditolak.

Oleh karena dalam persetujuannya perlu pengambilan keputusan terlebih dahulu dari anggota DPRD, maka saya tawarkan kepada rekan-rekan Anggota yang hadir pada rapat paripurna hari ini :

“Apakah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 yang disampaikan oleh Badan Anggaran DPRD melalui Laporannya dapat disetujui ?”

===== SETUJU =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Atas dasar persetujuan dari anggota, selanjutnya akan dilakukan penandatanganan persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD

Kabupaten Rembang atas Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019.

Agar berjalan lancar, saya minta kepada Sekretariat DPRD untuk memandu jalannya prosesi penandatanganan sekaligus penyerahan keputusan DPRD. Dipersilahkan.

**=== PENANDATANGANAN PERSETUJUAN BERSAMA DAN
PENYERAHAN KEPUTUSAN DPRD ===**

Terima kasih kepada Sekretariat DPRD atas bantuannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati.

Marilah kita ikuti acara kelima atau terakhir yaitu Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019.

Kepada Saudara Bupati, waktu dan tempat dipersilahkan.

===== PENDAPAT AKHIR BUPATI ATAS RAPERDA =====

➤ (*Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 terlampir*)

Terima kasih saudara Bupati, atas penyampaianannya.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.

Acara demi acara telah kita ikuti, maka selesai sudah acara rapat paripurna pada hari ini. Terima kasih kepada Saudara Bupati beserta jajarannya, rekan-rekan Anggota Badan Anggaran, dan Sekretaris DPRD beserta seluruh stafnya yang telah melaksanakan tugas dan

tanggungjawabnya dengan baik, sehingga pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 dapat terselesaikan sesuai waktu yang telah dijadwalkan.

Dan kepada yang telah mengikuti rapat paripurna, kami atas nama Pimpinan DPRD mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatian dan kehadirannya, serta mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan rapat paripurna pada hari ini.

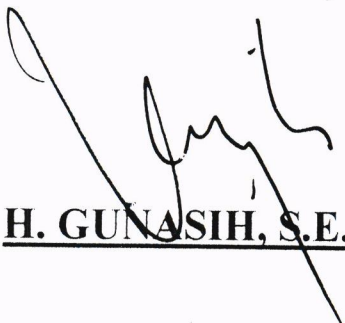
Akhirnya dengan mengucap “ *Alhamdulillahirobbil ‘alamin* “ tepat pukul 17.30 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

WAKIL KETUA,



H. GUNASIH, S.E.

SEKRETARIS,



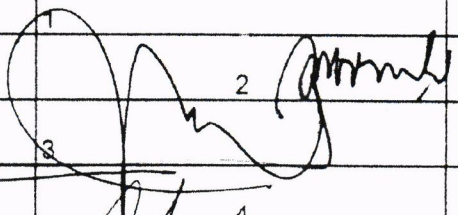
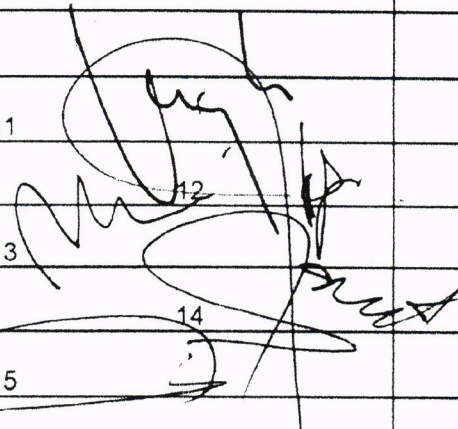
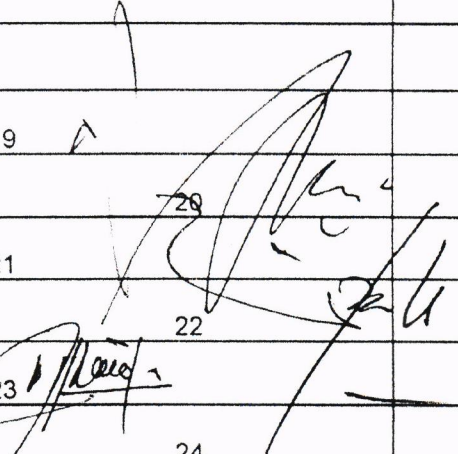
Drs. DRUPODO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670421 199303 1 009

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (II) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD dan Camat Se Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Laporan Banggar atas Hasil Pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;
- LAMPIRAN III : Pendapat Fraksi- Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;
- LAMPIRAN IV : Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;
- LAMPIRAN V : Keputusan DPRD Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Persetujuan Penetapan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019.

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS RAPERDA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019

HARI/TANGGAL : SELASA, 6 AGUSTUS 2019
PUKUL : 09.00 WIB

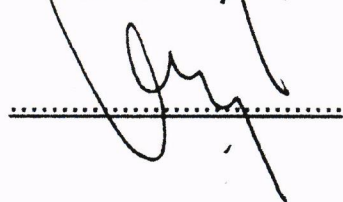
NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD		
2	SUGIHARTO	Anggota		
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota		
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota		
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota		
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota		
7	HENRY PURWOKO, S.Pd.	Anggota		
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota		
9	H. SUPADI	Anggota		
10	NUR HASYIM	Anggota		
	FRAKSI DEMOKRAT			
11	H. GUNASIH, S.E.	Wakil Ketua DPRD		
12	IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E. M.H.	Anggota		
13	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota		
14	EKA SISWA KARTIKA	Anggota		
15	H. ISLAHUDDIN	Anggota		
16	H. HARNO, S.E.	Anggota		
17	MUGIYARTO, S.T.	Anggota		
18	MOHAMMAD HARIYADI	Anggota		
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD		
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota		
21	ILYAS	Anggota		
22	SHOLEH, B.A	Anggota		
23	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi.	Anggota		
24	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota		

	FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM			
25	SUMARSIH	Wakil Ketua DPRD	25	
26	JASMANI	Anggota	26	
27	WIDODO	Anggota	27	
28	ALI IRCHAM, S.T.	Anggota	28	
29	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	29	
30	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	30	
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31	
32	SUSTIYONO	Anggota	32	
	FRAKSI PARTAI GERINDRA			
33	HERI KURNIAWAN, S.E.	Anggota	33	
33	H. CHASANUDDIN	Anggota	34	
34	PUJI SANTOSO, SP, M.H.	Anggota	35	
35	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota	36	
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37	
	FRAKSI KARYA SEJAHTERA			
38	H. ISMARI, S.H.	Anggota	38	
39	GATOT PAERAN, S.H, M.Si.	Anggota	39	
40	H. JOKO SUPRIHADI, S.H.	Anggota	40	
41	ALI IMRON WAHYUDI	Anggota	41	
	FRAKSI HARAPAN			
42	SUKARMAIN	Anggota	42	
43	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	43	
44	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd.	Anggota	44	
45	NUR JANNAH	Anggota	45	

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar

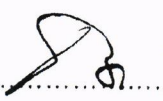
DPRD KABUPATEN REMBANG
PIMPINAN RAPAT,



DAFTAR HADIR FORKOMPINDA
RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS RAPERDA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019

HARI/TANGGAL : SELASA, 6 AGUSTUS 2019

PUKUL : 09.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.	Bupati Rembang	1. 
2	H.BAYU ANDRIYANTO,S.E.	Wakil Bupati Rembang	2. 
3		Kejaksaan Negeri Rembang	3.
4		Pengadilan Negeri Rembang	4.
5		Dandim 0720 Rembang	5.
6		Kepolisian Resort Rembang	6.
7		Pengadilan Agama Kab. Rembang	7.
8	Drs. SUBAKTI	Sekretaris Daerah	8. 

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG



Drs. DRUPODO, M.Si
NIP. 19670421 199303 1 009

DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS RAPERDA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019

HARI/TANGGAL : SELASA, 6 AGUSTUS 2019

PUKUL : 09.00 WIB

NO	JABATAN	N A M A	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	MUSTHOLIK	1
2	CAMAT KALIORI	Harjani	2
3	CAMAT SUMBER	ANIS CAHYONO	3
4	CAMAT SULANG	Idmet Haryadi	4
5	CAMAT BULU		5
6	CAMAT PAMOTAN		6
7	CAMAT GUNEM		7
8	CAMAT SALE		8
9	CAMAT LASEM	Ani Sunbani	9
10	CAMAT PANCUR		10
11	CAMAT SEDAN		11
12	CAMAT SLUKE		12
13	CAMAT KRAGAN		13
14	CAMAT SARANG		14

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG



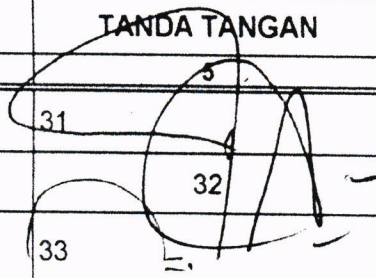
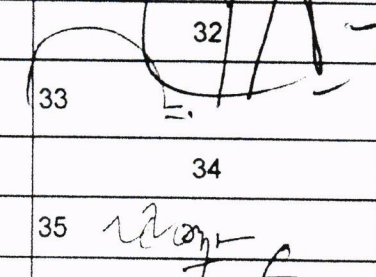
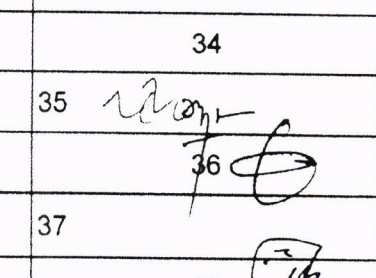
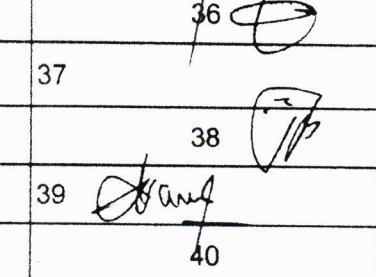
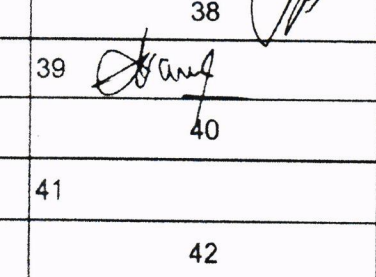
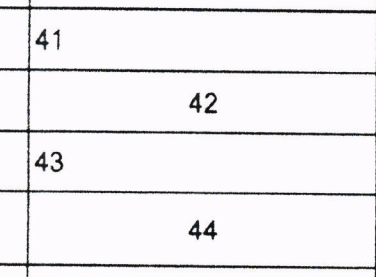
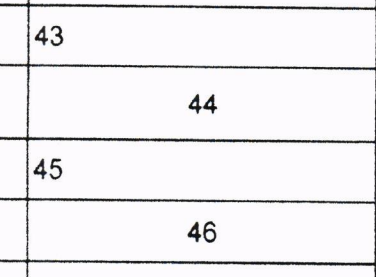
Drs. DRUPODO, M.Si
NIP. 19670421 199303 1 009

DAFTAR HADIR SKPD
RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS RAPERDA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019

HARI/TANGGAL : SELASA, 6 AGUSTUS 2019

PUKUL : 09.00 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI			1
2	STAF AHLI BUPATI			2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA			7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN	Eko Ardiyanto	Kasubag	8
9	BAG. HUKUM	Didik Pramono	Kasubag	9
10	BAG. HUMAS	A. Drajat		10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN			11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN			12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT	A. SULKHAN	KASUBAG	13
14	BAG. ORGANISASI & KEPEGAWAIAN			14
15	BAG. UMUM	Bahtiar		15
16	BPPKAD	Muskm	Febr	16
17	INSPEKTORAT	Tiheli W.	Irban II	17
18	BAPPEDA	Ismi Wahyuni	Kepu	18
19	DINSOSP2KB	HGAT	Sekret	19
20	B K D			20
21	B P B D	A. Budi Murni	BPKD	21
22	DPU TATA RUANG	SUT/HKRT	DPU	22
23	DINPERKIM	Soepriyandono		23
24	DINAS KESEHATAN	Darmono.	Pit. Selektor	24
25	DINDIKPORA	A. Patih K	Kabid	25
26	DINPERINDAGKOP & UMKM	Tri Handaya	Kabid	26
27	DINTANPAN	Suratman	Ka Dintapan	27
28	DINLUTKAN	Superman	Ka Dintapan	28
29	DINKOMINFO	Flay Kristiono	Kominfo	29
30	DINAS PERHUBUNGAN	Moh. Dwin	Kadus jls	30

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
31	DINAS DUKCAPIL	<i>Heri Saenri</i>	<i>Kabag</i>	31 
32	DINPERMADES	<i>Subro</i>	<i>Kusn</i>	32 
33	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	<i>Dari Pu Awanti</i>		33 
34	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			34
35	KANTOR KESBANGPOLINMAS	<i>KARTONO</i>	<i>KK</i>	35 
36	DINAS ARSIP & PERPUSTAKAAN	<i>Al Huda Huda</i>		36 
37	DINAS PMPTSP NAKER			37
38	RSUD dr. R. SUTRASNO	<i>Sutarfik</i>		38 
39	SATPOL PP	<i>PAIMUDJI</i>	<i>SEK DIN</i>	39 
40	TIM PKK KAB. REMBANG			40
41	P D A M			41
42	PERCETAKAN DAERAH			42
43	PD. BANK PASAR			43
44	BANK JATENG CAB. REMBANG			44
45	BRI CAB. REMBANG			45
46	PD BPR BKK LASEM			46
47	PT. R B S J			47
48	APOTIK DAERAH			48
49	KANTOR KEMENTRIAN AGAMA			49
50	DIPENDA PROPINSI			50
51	BPS KAB. REMBANG			51
52	RUMAH TAHANAN			52
53	PERHUTANI KPH MANTINGAN			53
54	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			54
55	KANTOR PERHUTANI SPH IV			55
56	KANTOR POS DAN GIRO			56
57	TELKOM REMBANG			57
58	PLN CAB. REMBANG			58
59	BAWASLU KAB. REMBANG			59
60	B P N KAB. REMBANG			60
61	KANTOR PAJAK			61
62	UP3AD (ASET DAERAH)			62
63	KANTOR PELABUHAN			63
64	KETUA KPU KAB. REMBANG			64
65	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG			65

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
66	Radio Cita Bahari FM	Masudi	Reporter	66 Masudi
67	Int Dim	Agus	Int	67
68	Radio	Chirnu	ht	68
69	Kerabat	Copran.	Int	69
70		Agus	TA KCS	70
71	MIMBAR RLKXI	H. MURLICH	REPORTER	71
72	Majalah Lohuvi	BOPEAD	Kampanye Program	72
73	Kelompok Mendek	Mulyanti		73
74	Didik Pramu	B. Hicun	Kampanye	74
75	ANGGOKO	- 1 -		75
76	Supri Anwar	Radar Keds	Reporter	76
77	Hari Muband	BAP KAN		77
78				78
79				79
80				80
81				81
82				82
83				83
84				84
85				85
86				86
87				87
88				88
89				89
90				90
91				91
92				92
93				93
94				94
95				95
96				96
97				97
98				98
99				99
100				100
101				101

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
102				102
103				103
104				104
105				105
106				106
107				107
108				108
109				109
110				110
111				111
112				112
113				113
114				114
115				115
116				116
117				117
118				118
119				119
120				120
121				121
122				122
123				123
124				124
125				125
126				126
127				127
128				128
129				129
130				130
131				131
132				132
133				133
134				134
135				135
136				136
137				137

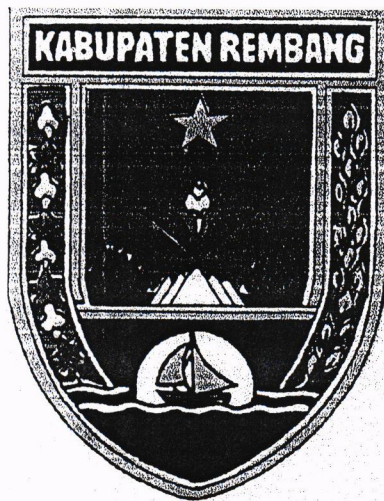
NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
138				138
139				139
140				140

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG



Drs. DRUPODO, M.Si
NIP. 19670421 199303 1 009

**LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD
KABUPATEN REMBANG**



**TENTANG
PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG
PERUBAHAN APBD KABUPATEN
REMBANG**

TAHUN ANGGARAN 2019

**LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RAPAT PARIPURNA HARI SELASA TANGGAL 6 AGUSTUS
2019 MEMBAHAS RAPERDA PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang Terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang saya hormati

- Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
- Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang
- Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda beserta Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Rembang
- Kepala OPD se Kabupaten Rembang
- Camat se Kabupaten Rembang serta para undangan dan hadirin semua yang berbahagia.

Berikut kami bacakan laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang tentang Pembahasan Raperda Perubahan APBD TA. 2019.

I. PENDAHULUAN :

1. bahwa Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 sebelum disepakati menjadi Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dilakukan pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD dan TAPD;
2. bahwa hasil pembahasan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 dilaporkan oleh Badan Anggaran pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

II. D A S A R.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
20. Surat Bupati Rembang Nomor 188.3/2146/2019 tanggal 31 Juli 2019 perihal Pengiriman Raperda;
21. Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang dengan TAPD Pemerintah Kabupaten Rembang tanggal 2 Agustus 2019 yang mengagendakan Penjadwalan Pembahasan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019.

III. PELAKSANAAN

- a. Rapat Badan Anggaran dengan TAPD Kabupaten Rembang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2019 Pukul 15.00. WIB. dengan agenda penjelasan lanjutan atas Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
- b. Rapat Internal Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2019 Pukul 16.00.WIB, dalam rangka Pendalaman Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
- c. Rapat Badan Anggaran dengan TAPD Kabupaten Rembang dilakukan pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019 Pukul 09.00. WIB. dengan agenda Pendalaman, Sinkronisasi, Harmonisasi hasil pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

IV. HASIL RAPAT

Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang telah melakukan pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, sebagaimana jadwal yang telah ditentukan. Adapun ringkasannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

RINGKASAN RAPBD PERUBAHAN 2019

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH (BERKURANG)	PEMBAHASAN		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		PERSETUJUAN	BERTAMBAH (BERKURANG)	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5 = 4-3	6	7 = 6-3	8 = 6-4
1	PENDAPATAN	1,785,139,506,071.00	1,862,109,419,071.00	76,969,913,000.00	1,862,109,419,071.00	76,969,913,000.00	-
1.1	Pendapatan Asli Daerah	291,855,438,071.00	310,601,592,071.00	18,746,154,000.00	310,601,592,071.00	18,746,154,000.00	-
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	96,850,500,000.00	100,522,250,000.00	3,671,750,000.00	100,522,250,000.00	3,671,750,000.00	-
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	23,158,499,000.00	24,102,329,000.00	943,830,000.00	24,102,329,000.00	943,830,000.00	-
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10,030,000,000.00	10,840,309,000.00	810,309,000.00	10,840,309,000.00	810,309,000.00	-
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	161,816,439,071.00	175,136,704,071.00	13,320,265,000.00	175,136,704,071.00	13,320,265,000.00	-
1.2	Dana Perimbangan	1,086,414,856,000.00	1,090,338,415,000.00	3,923,559,000.00	1,090,338,415,000.00	3,923,559,000.00	-
1.2.2	Dana Transfer Umum	842,646,897,000.00	846,570,456,000.00	3,923,559,000.00	846,570,456,000.00	3,923,559,000.00	-
1.2.3	Dana Transfer Khusus	243,767,959,000.00	243,767,959,000.00	-	243,767,959,000.00	-	-
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	406,869,212,000.00	461,169,412,000.00	54,300,200,000.00	461,169,412,000.00	54,300,200,000.00	-
1.3.1	Pendapatan Hibah	58,432,800,000.00	58,993,000,000.00	560,200,000.00	58,993,000,000.00	560,200,000.00	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	90,000,000,000.00	106,030,000,000.00	16,030,000,000.00	106,030,000,000.00	16,030,000,000.00	-
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	258,436,412,000.00	258,436,412,000.00	-	258,436,412,000.00	-	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	37,710,000,000.00	37,710,000,000.00	37,710,000,000.00	37,710,000,000.00	-
2.	BELANJA	1,827,508,350,914.00	1,930,933,681,611.19	103,425,330,697.19	1,930,933,681,611.19	103,425,330,697.19	-
2.1	Belanja Tidak Langsung	1,144,037,719,205.00	1,151,306,363,256.19	7,268,644,051.19	1,146,616,363,256.19	2,578,644,051.19	(4,690,000,000.00)
2.1.1	Belanja Pegawai	693,272,542,605.00	679,834,930,033.19	(13,437,612,571.81)	679,834,930,033.19	(13,437,612,571.81)	-
2.1.2	Belanja Bunga	1,131,632,000.00	1,631,632,000.00	500,000,000.00	1,631,632,000.00	500,000,000.00	-
2.1.4	Belanja Hibah	48,064,900,000.00	55,358,292,000.00	7,293,392,000.00	55,418,292,000.00	7,353,392,000.00	60,000,000.00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	7,284,660,000.00	8,094,660,000.00	810,000,000.00	8,094,660,000.00	810,000,000.00	-
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	11,944,474,900.00	16,684,474,900.00	4,740,000,000.00	11,984,474,900.00	40,000,000.00	(4,700,000,000.00)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	381,339,509,700.00	388,425,509,700.00	7,086,000,000.00	388,375,509,700.00	7,036,000,000.00	(50,000,000.00)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1,000,000,000.00	1,276,864,623.00	276,864,623.00	1,276,864,623.00	276,864,623.00	-

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH (BERKURANG)	PEMBAHASAN		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			PERSETUJUAN	BERTAMBAH (BERKURANG)	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5 = 4-3	6	7 = 6-3	8 = 6-4	
2.2	Belanja Langsung	683,470,631,709.00	779,627,318,355.00	96,156,686,646.00	784,317,318,355.00	100,846,686,646.00	4,690,000,000.00	
2.2.1	Belanja Pegawai	179,311,949,050.00	194,066,867,834.00	14,754,918,784.00	194,123,817,834.00	14,811,868,784.00	56,950,000.00	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	310,601,673,112.00	350,073,316,316.00	39,471,643,204.00	350,156,011,566.00	39,554,338,454.00	82,695,250.00	
2.2.3	Belanja Modal	193,557,009,547.00	235,487,134,205.00	41,930,124,658.00	240,037,488,955.00	46,480,479,408.00	4,550,354,750.00	
	Jumlah Belanja	1,827,508,350,914.00	1,930,933,681,611.19	103,425,330,697.19	1,930,933,681,611.19	103,425,330,697.19	-	
	surplus (devisit)	(42,368,844,843.00)	(68,824,262,540.19)	(26,455,417,697.19)	(68,824,262,540.19)	(26,455,417,697.19)	-	
3.	PEMBIAYAAN DAERAH							
3.1	Penerimaan Pembiayaan	49,237,212,843.00	155,692,630,540.19	106,455,417,697.19	155,692,630,540.19	106,455,417,697.19	-	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	49,237,212,843.00	75,692,630,540.19	26,455,417,697.19	75,692,630,540.19	26,455,417,697.19	-	
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	80,000,000,000.00	80,000,000,000.00	80,000,000,000.00	80,000,000,000.00	-	
	Jumlah penerimaan Pembiayaan	49,237,212,843.00	155,692,630,540.19	106,455,417,697.19	155,692,630,540.19	106,455,417,697.19	-	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	6,868,368,000.00	86,868,368,000.00	80,000,000,000.00	86,868,368,000.00	80,000,000,000.00	-	
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	-	3,000,000,000.00	-	-	
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	3,868,368,000.00	83,868,368,000.00	80,000,000,000.00	83,868,368,000.00	80,000,000,000.00	-	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	6,868,368,000.00	86,868,368,000.00	80,000,000,000.00	86,868,368,000.00	80,000,000,000.00	-	
	Pembiayaan Netto	42,368,844,843.00	68,824,262,540.19	26,455,417,697.19	68,824,262,540.19	26,455,417,697.19	-	
3.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

REKAPITULASI
ANGGARAN BELANJA SKPD RAPBD PERUBAHAN
2019

NO.	SKPD	JUMLAH			
		SEBELUM PERUBAHAN			
		PENDAPATAN	BELANJA		
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
1	DINPENDIKPORA	50,000,000.00	419,709,047,225.00	99,526,937,850.00	519,235,985,075.00
2	DINAS KESEHATAN	44,755,767,600.00	53,310,932,641.00	92,360,724,600.00	145,671,657,241.00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	105,000,000,000.00	26,918,245,300.00	100,719,696,000.00	127,637,941,300.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1,020,000,000.00	8,522,953,150.00	81,201,165,000.00	89,724,118,150.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1,115,000,000.00	4,936,457,750.00	17,655,939,440.00	22,592,397,190.00
6	SATPOL PP	-	6,323,578,200.00	7,461,556,000.00	13,785,134,200.00
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	1,483,727,900.00	1,532,100,000.00	3,015,827,900.00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	2,989,771,050.00	5,034,100,000.00	8,023,871,050.00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	-	5,160,660,250.00	12,829,964,000.00	17,990,624,250.00
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	20,750,000.00	4,943,505,650.00	5,016,070,000.00	9,959,575,650.00
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	121,535,000.00	13,779,567,150.00	50,037,244,519.00	63,816,811,669.00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	130,000,000.00	8,274,225,550.00	7,574,400,000.00	15,848,625,550.00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	3,434,890,233.00	3,183,786,000.00	6,618,676,233.00
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	3,539,472,750.00	4,303,306,000.00	7,842,778,750.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	1,225,489,000.00	5,647,905,350.00	16,965,780,000.00	22,613,685,350.00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	362,000,000.00	2,388,806,950.00	5,800,290,000.00	8,189,096,950.00
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1,019,000,000.00	2,813,878,600.00	5,537,805,000.00	8,351,683,600.00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	2,883,365,600.00	10,637,700,000.00	13,521,065,600.00
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	14,208,524,000.00	3,685,616,500.00	15,185,608,000.00	18,871,224,500.00
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOOPERASI DAN UKM	3,637,277,765.00	10,362,662,022.00	14,930,272,000.00	25,292,934,022.00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	19,884,881,000.00	-	19,884,881,000.00
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	771,327,550.00	-	771,327,550.00
23	SETDA	10,165,000,000.00	15,229,768,550.00	33,771,080,000.00	49,000,848,550.00
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	-	-	15,526,000,000.00	15,526,000,000.00
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	-	-	778,580,000.00	778,580,000.00
c	SETDA (BAGIAN UMUM)	90,000,000.00	15,229,768,550.00	7,103,000,000.00	22,332,768,550.00
d	SETDA (BAGIAN HUMAS)	45,000,000.00	-	4,245,000,000.00	4,245,000,000.00
e	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	-	-	2,005,200,000.00	2,005,200,000.00
f	SETDA (BAGIAN HUKUM)	-	-	945,000,000.00	945,000,000.00
g	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	10,030,000,000.00	-	2,063,300,000.00	2,063,300,000.00
h	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	-	-	1,105,000,000.00	1,105,000,000.00
24	SEKRETARIAT DPRD	-	4,706,626,338.00	38,919,572,000.00	43,626,198,338.00
25	KECAMATAN REMBANG	-	5,737,821,800.00	4,087,146,600.00	9,824,968,400.00
26	KECAMATAN KALIORI	-	2,304,363,400.00	847,890,000.00	3,152,253,400.00
27	KECAMATAN SULANG	-	2,299,972,250.00	1,016,450,000.00	3,316,422,250.00
28	KECAMATAN SUMBER	-	2,198,830,500.00	660,072,500.00	2,858,903,000.00
29	KECAMATAN BULU	-	2,091,557,800.00	814,924,000.00	2,906,481,800.00
30	KECAMATAN LASEM	-	2,421,238,850.00	879,590,000.00	3,300,828,850.00
31	KECAMATAN PANCUR	-	2,436,189,100.00	746,360,000.00	3,182,549,100.00
32	KECAMATAN SLUKE	-	1,544,609,200.00	768,147,500.00	2,312,756,700.00
33	KECAMATAN PAMOTAN	-	1,870,432,250.00	841,600,000.00	2,712,032,250.00
34	KECAMATAN GUNEM	-	1,724,823,900.00	674,560,000.00	2,399,383,900.00
35	KECAMATAN SALE	-	1,738,018,250.00	811,764,000.00	2,549,782,250.00
36	KECAMATAN KRAGAN	-	2,513,109,238.00	1,632,088,500.00	4,145,197,738.00
37	KECAMATAN SEDAN	-	2,201,440,250.00	739,839,000.00	2,941,279,250.00
38	KECAMATAN SARANG	-	2,467,538,100.00	1,398,250,000.00	3,865,788,100.00
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	-	4,558,777,850.00	6,324,470,000.00	10,883,247,850.00
40	BAPPEDA	-	3,673,469,700.00	7,520,000,000.00	11,193,469,700.00
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1,602,309,162,706.00	466,382,583,558.00	15,971,113,000.00	482,353,696,558.00
a	(SKPD)	109,025,094,706.00	15,617,406,958.00	15,971,113,000.00	31,588,519,958.00
b	(PPKD)	1,493,284,068,000.00	450,765,176,600.00	-	450,765,176,600.00
42	BKD	-	4,171,069,950.00	7,551,270,200.00	11,722,340,150.00
	JUMLAH	1,785,139,506,071.00	1,144,037,719,205.00	683,470,631,709.00	1,827,508,350,914.00

REKAPITULASI
ANGGARAN BELANJA SKPD RAPBD PERUBAHAN
2019

NO.	SKPD	JUMLAH			
		SEBELUM PERUBAHAN			
		PENDAPATAN	BELANJA		
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1	2	4	5	6	7
1	DINPENDIKPORA	50,000,000.00	419,709,047,225.00	99,526,937,850.00	519,235,985,075.00
2	DINAS KESEHATAN	44,755,767,600.00	53,310,932,641.00	92,360,724,600.00	145,671,657,241.00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	105,000,000,000.00	26,918,245,300.00	100,719,696,000.00	127,637,941,300.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1,020,000,000.00	8,522,953,150.00	81,201,165,000.00	89,724,118,150.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1,115,000,000.00	4,936,457,750.00	17,655,939,440.00	22,592,397,190.00
6	SATPOL PP	-	6,323,578,200.00	7,461,556,000.00	13,785,134,200.00
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	1,483,727,900.00	1,532,100,000.00	3,015,827,900.00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	2,989,771,050.00	5,034,100,000.00	8,023,871,050.00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	-	5,160,660,250.00	12,829,964,000.00	17,990,624,250.00
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	20,750,000.00	4,943,505,650.00	5,016,070,000.00	9,959,575,650.00
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	121,535,000.00	13,779,567,150.00	50,037,244,519.00	63,816,811,669.00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	130,000,000.00	8,274,225,550.00	7,574,400,000.00	15,848,625,550.00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	3,434,890,233.00	3,183,786,000.00	6,618,676,233.00
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	3,539,472,750.00	4,303,306,000.00	7,842,778,750.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	1,225,489,000.00	5,647,905,350.00	16,965,780,000.00	22,613,685,350.00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	362,000,000.00	2,388,806,950.00	5,800,290,000.00	8,189,096,950.00
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1,019,000,000.00	2,813,878,600.00	5,537,805,000.00	8,351,683,600.00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	2,883,365,600.00	10,637,700,000.00	13,521,065,600.00
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	14,208,524,000.00	3,685,616,500.00	15,185,608,000.00	18,871,224,500.00
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM	3,637,277,765.00	10,362,662,022.00	14,930,272,000.00	25,292,934,022.00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	19,884,881,000.00	-	19,884,881,000.00
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	771,327,550.00	-	771,327,550.00
23	SETDA	10,165,000,000.00	15,229,768,550.00	33,771,080,000.00	49,000,848,550.00
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	-	-	15,526,000,000.00	15,526,000,000.00
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	-	-	778,580,000.00	778,580,000.00
c	SETDA (BAGIAN UMUM)	90,000,000.00	15,229,768,550.00	7,103,000,000.00	22,332,768,550.00
d	SETDA (BAGIAN HUMAS)	45,000,000.00	-	4,245,000,000.00	4,245,000,000.00
e	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	-	-	2,005,200,000.00	2,005,200,000.00
f	SETDA (BAGIAN HUKUM)	-	-	945,000,000.00	945,000,000.00
g	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	10,030,000,000.00	-	2,063,300,000.00	2,063,300,000.00
h	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	-	-	1,105,000,000.00	1,105,000,000.00
24	SEKRETARIAT DPRD	-	4,706,626,338.00	38,919,572,000.00	43,626,198,338.00
25	KECAMATAN REMBANG	-	5,737,821,800.00	4,087,146,600.00	9,824,968,400.00
26	KECAMATAN KALIORI	-	2,304,363,400.00	847,890,000.00	3,152,253,400.00
27	KECAMATAN SULANG	-	2,299,972,250.00	1,016,450,000.00	3,316,422,250.00
28	KECAMATAN SUMBER	-	2,198,830,500.00	660,072,500.00	2,858,903,000.00
29	KECAMATAN BULU	-	2,091,557,800.00	814,924,000.00	2,906,481,800.00
30	KECAMATAN LASEM	-	2,421,238,850.00	879,590,000.00	3,300,828,850.00
31	KECAMATAN PANCUR	-	2,436,189,100.00	746,360,000.00	3,182,549,100.00
32	KECAMATAN SLUKE	-	1,544,609,200.00	768,147,500.00	2,312,756,700.00
33	KECAMATAN PAMOTAN	-	1,870,432,250.00	841,600,000.00	2,712,032,250.00
34	KECAMATAN GUNEM	-	1,724,823,900.00	674,560,000.00	2,399,383,900.00
35	KECAMATAN SALE	-	1,738,018,250.00	811,764,000.00	2,549,782,250.00
36	KECAMATAN KRAGAN	-	2,513,109,238.00	1,632,088,500.00	4,145,197,738.00
37	KECAMATAN SEDAN	-	2,201,440,250.00	739,839,000.00	2,941,279,250.00
38	KECAMATAN SARANG	-	2,467,538,100.00	1,398,250,000.00	3,865,788,100.00
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	-	4,558,777,850.00	6,324,470,000.00	10,883,247,850.00
40	BAPPEDA	-	3,673,469,700.00	7,520,000,000.00	11,193,469,700.00
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1,602,309,162,706.00	466,382,583,558.00	15,971,113,000.00	482,353,696,558.00
a	(SKPD)	109,025,094,706.00	15,617,406,958.00	15,971,113,000.00	31,588,519,958.00
b	(PPKD)	1,493,284,068,000.00	450,765,176,600.00	-	450,765,176,600.00
42	BKD	-	4,171,069,950.00	7,551,270,200.00	11,722,340,150.00
	JUMLAH	1,785,139,506,071.00	1,144,037,719,205.00	683,470,631,709.00	1,827,508,350,914.00

REKAPITULASI
 ANGGARAN BELANJA SKPD RAPBD PERUBAHAN
 2019

NO.	SKPD	JUMLAH			
		SETELAH PERUBAHAN			
		PENDAPATAN	BELANJA		
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1	2	8	9	10	11=9+10
1	DINPENDIKPORA	20,000,000.00	408,061,023,648.00	153,065,750,738.00	561,126,774,386.00
2	DINAS KESEHATAN	48,579,862,600.00	53,855,829,452.00	100,501,267,370.00	154,357,096,822.00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	110,000,000,000.00	27,062,296,325.00	110,648,819,392.00	137,711,115,717.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1,020,000,000.00	8,461,285,319.00	99,639,108,400.00	108,100,393,719.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1,115,000,000.00	5,094,132,179.00	12,890,549,640.00	17,984,681,819.00
6	SATPOL PP	-	6,472,649,393.00	5,583,456,000.00	12,056,105,393.00
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	1,328,390,049.00	1,542,408,000.00	2,870,798,049.00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	3,098,123,731.00	5,212,100,000.00	8,310,223,731.00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	-	5,270,378,073.00	12,829,964,000.00	18,100,342,073.00
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	20,750,000.00	4,825,695,281.00	4,966,070,000.00	9,791,765,281.00
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	121,535,000.00	12,806,103,426.00	48,629,844,519.00	61,435,947,945.00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	130,000,000.00	8,442,005,921.00	8,189,550,000.00	16,631,555,921.00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	3,250,144,338.00	3,183,786,000.00	6,433,930,338.00
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	3,455,779,809.00	5,405,806,000.00	8,861,585,809.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	1,225,489,000.00	5,301,683,436.00	15,640,780,000.00	20,942,463,436.00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	362,000,000.00	2,612,710,728.00	5,429,797,000.00	8,042,507,728.00
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	719,000,000.00	2,744,552,865.00	8,717,805,000.00	11,462,357,865.00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	2,690,799,903.00	10,574,595,000.00	13,265,394,903.00
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	14,208,524,000.00	3,688,354,148.00	15,179,612,700.00	18,867,966,848.00
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM	7,407,277,765.00	10,434,837,890.00	15,857,497,000.00	26,292,334,890.00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	21,213,274,000.00	-	21,213,274,000.00
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	770,756,324.00	-	770,756,324.00
23	SETDA	10,975,309,000.00	15,201,656,012.00	38,685,080,000.00	53,866,736,012.00
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	-	-	17,206,000,000.00	17,206,000,000.00
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	-	-	978,580,000.00	978,580,000.00
c	SETDA (BAGIAN UMUM)	90,000,000.00	15,201,656,012.00	7,790,000,000.00	22,991,656,012.00
d	SETDA (BAGIAN HUMAS)	45,000,000.00	-	4,255,000,000.00	4,255,000,000.00
e	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	-	-	2,005,200,000.00	2,005,200,000.00
f	SETDA (BAGIAN HUKUM)	-	-	1,095,000,000.00	1,095,000,000.00
g	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	10,840,309,000.00	-	4,150,300,000.00	4,150,300,000.00
h	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	-	-	1,205,000,000.00	1,205,000,000.00
24	SEKRETARIAT DPRD	-	4,669,402,442.00	37,922,885,000.00	42,592,287,442.00
25	KECAMATAN REMBANG	-	5,925,978,669.00	6,880,862,600.00	12,806,841,269.00
26	KECAMATAN KALIORI	-	2,197,389,706.00	894,890,000.00	3,092,279,706.00
27	KECAMATAN SULANG	-	2,038,315,616.00	1,143,450,000.00	3,181,765,616.00
28	KECAMATAN SUMBER	-	1,980,376,895.00	702,572,500.00	2,682,949,395.00
29	KECAMATAN BULU	-	1,826,913,497.00	877,424,000.00	2,704,337,497.00
30	KECAMATAN LASEM	-	2,313,334,620.00	925,090,000.00	3,238,424,620.00
31	KECAMATAN PANCUR	-	2,058,174,207.00	796,360,000.00	2,854,534,207.00
32	KECAMATAN SLUKE	-	1,612,199,136.00	807,647,500.00	2,419,846,636.00
33	KECAMATAN PAMOTAN	-	1,683,852,659.00	887,100,000.00	2,570,952,659.00
34	KECAMATAN GUNEM	-	1,582,178,054.00	725,060,000.00	2,307,238,054.00
35	KECAMATAN SALE	-	1,715,598,330.00	899,439,000.00	2,615,037,330.00
36	KECAMATAN KRAGAN	-	2,044,404,323.00	1,657,963,500.00	3,702,367,823.00
37	KECAMATAN SEDAN	-	1,910,612,681.00	839,389,000.00	2,750,001,681.00
38	KECAMATAN SARANG	-	2,408,604,080.00	1,433,225,000.00	3,841,829,080.00
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	-	4,104,779,083.00	7,679,470,000.00	11,784,249,083.00
40	BAPPEDA	-	3,635,155,011.00	7,905,981,340.00	11,541,136,351.00
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1,666,204,671,706.00	487,181,033,568.19	16,657,743,156.00	503,838,776,724.19
a	(SKPD)	114,696,844,706.00	15,709,600,345.19	16,657,743,156.00	32,367,343,501.19
b	(PPKD)	1,551,507,827,000.00	471,471,433,223.00	-	471,471,433,223.00
42	BKD	-	4,275,598,429.00	7,617,119,000.00	11,892,717,429.00
	JUMLAH	1,862,109,419,071.00	1,151,306,363,256.19	779,627,318,355.00	1,930,933,681,611.19

REKAPITULASI
 ANGGARAN BELANJA SKPD RAPBD PERUBAHAN
 2019

NO.	SKPD	BERTAMBAH (BERKURANG)			
		PENDAPATAN	BELANJA		
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1	2	12=8-4	13=9-5	14=10-6	15=13+14
1	DINPENDIKPORA	(30,000,000.00)	(11,648,023,577.00)	53,538,812,888.00	41,890,789,311.00
2	DINAS KESEHATAN	3,824,095,000.00	544,896,811.00	8,140,542,770.00	8,685,439,581.00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	5,000,000,000.00	144,051,025.00	9,929,123,392.00	10,073,174,417.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	(61,667,831.00)	18,437,943,400.00	18,376,275,569.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	157,674,429.00	(4,765,389,800.00)	(4,607,715,371.00)
6	SATPOL PP	-	149,071,193.00	(1,878,100,000.00)	(1,729,028,807.00)
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	(155,337,851.00)	10,308,000.00	(145,029,851.00)
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	108,352,681.00	178,000,000.00	286,352,681.00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	-	109,717,823.00	-	109,717,823.00
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	-	(117,810,369.00)	(50,000,000.00)	(167,810,369.00)
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-	(973,463,724.00)	(1,407,400,000.00)	(2,380,863,724.00)
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	167,780,371.00	615,150,000.00	782,930,371.00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	(184,745,895.00)	-	(184,745,895.00)
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	(83,692,941.00)	1,102,500,000.00	1,018,807,059.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	-	(346,221,914.00)	(1,325,000,000.00)	(1,671,221,914.00)
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	223,903,778.00	(370,493,000.00)	(146,589,222.00)
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	(300,000,000.00)	(69,325,735.00)	3,180,000,000.00	3,110,674,265.00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	(192,565,697.00)	(63,105,000.00)	(255,670,697.00)
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	2,737,648.00	(5,995,300.00)	(3,257,652.00)
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM	3,770,000,000.00	72,175,868.00	927,225,000.00	999,400,868.00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	1,328,393,000.00	-	1,328,393,000.00
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	(571,226.00)	-	(571,226.00)
23	SETDA	810,309,000.00	(28,112,538.00)	4,914,000,000.00	4,885,887,462.00
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	-	-	1,680,000,000.00	1,680,000,000.00
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	-	-	200,000,000.00	200,000,000.00
c	SETDA (BAGIAN UMUM)	-	(28,112,538.00)	687,000,000.00	658,887,462.00
d	SETDA (BAGIAN HUMAS)	-	-	10,000,000.00	10,000,000.00
e	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	-	-	-	-
f	SETDA (BAGIAN HUKUM)	-	-	150,000,000.00	150,000,000.00
g	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	810,309,000.00	-	2,087,000,000.00	2,087,000,000.00
h	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	-	-	100,000,000.00	100,000,000.00
24	SEKRETARIAT DPRD	-	(37,223,896.00)	(996,687,000.00)	(1,033,910,896.00)
25	KECAMATAN REMBANG	-	188,156,869.00	2,793,716,000.00	2,981,872,869.00
26	KECAMATAN KALIORI	-	(106,973,694.00)	47,000,000.00	(59,973,694.00)
27	KECAMATAN SULANG	-	(261,656,634.00)	127,000,000.00	(134,656,634.00)
28	KECAMATAN SUMBER	-	(218,453,605.00)	42,500,000.00	(175,953,605.00)
29	KECAMATAN BULU	-	(264,644,303.00)	62,500,000.00	(202,144,303.00)
30	KECAMATAN LASEM	-	(107,904,230.00)	45,500,000.00	(62,404,230.00)
31	KECAMATAN PANCUR	-	(378,014,893.00)	50,000,000.00	(328,014,893.00)
32	KECAMATAN SLUKE	-	67,589,936.00	39,500,000.00	107,089,936.00
33	KECAMATAN PAMOTAN	-	(186,579,591.00)	45,500,000.00	(141,079,591.00)
34	KECAMATAN GUNEM	-	(142,645,846.00)	50,500,000.00	(92,145,846.00)
35	KECAMATAN SALE	-	(22,419,920.00)	87,675,000.00	65,255,080.00
36	KECAMATAN KRAGAN	-	(468,704,915.00)	25,875,000.00	(442,829,915.00)
37	KECAMATAN SEDAN	-	(290,827,569.00)	99,550,000.00	(191,277,569.00)
38	KECAMATAN SARANG	-	(58,934,020.00)	34,975,000.00	(23,959,020.00)
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	-	(453,998,767.00)	1,355,000,000.00	901,001,233.00
40	BAPPEDA	-	(38,314,689.00)	385,981,340.00	347,666,651.00
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	63,895,509,000.00	20,798,450,010.19	686,630,156.00	21,485,080,166.19
a	(SKPD)	5,671,750,000.00	92,193,387.19	686,630,156.00	778,823,543.19
b	(PPKD)	58,223,759,000.00	20,706,256,623.00	-	20,706,256,623.00
42	BKD	-	104,528,479.00	65,848,800.00	170,377,279.00
	JUMLAH	76,969,913,000.00	7,268,644,051.19	96,156,686,646.00	103,425,330,697.19

REKAPITULASI
ANGGARAN BELANJA SKPD RAPBD PERUBAHAN
2019

NO.	SKPD	PEMBAHASAN			
		PERSETUJUAN			
		PENDAPATAN	BELANJA		
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1	2	16	17	18	19=17+18
1	DINPENDIKPORA	20,000,000.00	408,061,023,648.00	153,015,750,738.00	561,076,774,386.00
2	DINAS KESEHATAN	48,579,862,600.00	53,855,829,452.00	100,507,937,370.00	154,363,766,822.00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	110,000,000,000.00	27,062,296,325.00	110,648,819,392.00	137,711,115,717.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1,020,000,000.00	8,461,285,319.00	104,239,108,400.00	112,700,393,719.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1,115,000,000.00	5,094,132,179.00	12,930,549,640.00	18,024,681,819.00
6	SATPOL PP	-	6,472,649,393.00	5,583,456,000.00	12,056,105,393.00
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	1,328,390,049.00	1,542,408,000.00	2,870,798,049.00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	3,098,123,731.00	5,212,100,000.00	8,310,223,731.00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	-	5,270,378,073.00	12,829,964,000.00	18,100,342,073.00
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	20,750,000.00	4,825,695,281.00	4,966,070,000.00	9,791,765,281.00
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	121,535,000.00	12,806,103,426.00	48,979,844,519.00	61,785,947,945.00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	130,000,000.00	8,442,005,921.00	8,289,550,000.00	16,731,555,921.00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	3,250,144,338.00	3,183,786,000.00	6,433,930,338.00
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	3,455,779,809.00	5,405,806,000.00	8,861,585,809.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	1,225,489,000.00	5,301,683,436.00	15,640,780,000.00	20,942,463,436.00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	362,000,000.00	2,612,710,728.00	5,429,797,000.00	8,042,507,728.00
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	719,000,000.00	2,744,552,865.00	8,717,805,000.00	11,462,357,865.00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	2,690,799,903.00	10,574,595,000.00	13,265,394,903.00
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	14,208,524,000.00	3,688,354,148.00	15,179,612,700.00	18,867,966,848.00
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM	7,407,277,765.00	10,434,837,890.00	15,857,497,000.00	26,292,334,890.00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	21,213,274,000.00	-	21,213,274,000.00
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	770,756,324.00	-	770,756,324.00
23	SETDA	10,975,309,000.00	15,201,656,012.00	38,685,080,000.00	53,886,736,012.00
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	-	-	17,206,000,000.00	17,206,000,000.00
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	-	-	978,580,000.00	978,580,000.00
c	SETDA (BAGIAN UMUM)	90,000,000.00	15,201,656,012.00	7,790,000,000.00	22,991,656,012.00
d	SETDA (BAGIAN HUMAS)	45,000,000.00	-	4,255,000,000.00	4,255,000,000.00
e	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	-	-	2,005,200,000.00	2,005,200,000.00
f	SETDA (BAGIAN HUKUM)	-	-	1,095,000,000.00	1,095,000,000.00
g	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	10,840,309,000.00	-	4,150,300,000.00	4,150,300,000.00
h	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	-	-	1,205,000,000.00	1,205,000,000.00
24	SEKRETARIAT DPRD	-	4,669,402,442.00	37,566,215,000.00	42,235,617,442.00
25	KECAMATAN REMBANG	-	5,925,978,669.00	6,880,862,600.00	12,806,841,269.00
26	KECAMATAN KALIORI	-	2,197,389,706.00	894,890,000.00	3,092,279,706.00
27	KECAMATAN SULANG	-	2,038,315,616.00	1,143,450,000.00	3,181,765,616.00
28	KECAMATAN SUMBER	-	1,980,376,895.00	702,572,500.00	2,682,949,395.00
29	KECAMATAN BULU	-	1,826,913,497.00	877,424,000.00	2,704,337,497.00
30	KECAMATAN LASEM	-	2,313,334,620.00	925,090,000.00	3,238,424,620.00
31	KECAMATAN PANCUR	-	2,058,174,207.00	796,360,000.00	2,854,534,207.00
32	KECAMATAN SLUKE	-	1,612,199,136.00	807,647,500.00	2,419,846,636.00
33	KECAMATAN PAMOTAN	-	1,683,852,659.00	887,100,000.00	2,570,952,659.00
34	KECAMATAN GUNEM	-	1,582,178,054.00	725,060,000.00	2,307,238,054.00
35	KECAMATAN SALE	-	1,715,598,330.00	899,439,000.00	2,615,037,330.00
36	KECAMATAN KRAGAN	-	2,044,404,323.00	1,657,963,500.00	3,702,367,823.00
37	KECAMATAN SEDAN	-	1,910,612,681.00	839,389,000.00	2,750,001,681.00
38	KECAMATAN SARANG	-	2,408,604,080.00	1,433,225,000.00	3,841,829,080.00
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	-	4,104,779,083.00	7,679,470,000.00	11,784,249,083.00
40	BAPPEDA	-	3,635,155,011.00	7,905,981,340.00	11,541,136,351.00
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1,666,204,671,706.00	482,491,033,568.19	16,657,743,156.00	499,146,776,724.19
a	(SKPD)	114,696,844,706.00	15,709,600,345.19	16,657,743,156.00	32,367,343,501.19
b	(PPKD)	1,551,507,827,000.00	466,781,433,223.00	-	466,781,433,223.00
42	BKD	-	4,275,598,429.00	7,617,119,000.00	11,892,717,429.00
	JUMLAH	1,862,109,419,071.00	1,146,616,363,256.19	784,317,318,355.00	1,930,933,681,611.19

REKAPITULASI
ANGGARAN BELANJA SKPD RAPBD PERUBAHAN
2019

NO.	SKPD	PEMBAHASAN			
		BERTAMBAH (BERKURANG)			
		PENDAPATAN	BELANJA		
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1	2	20=16-4	21=17-5	22=18-6	23=21+22
1	DINPENDIKPORA	(30,000,000.00)	(11,648,023,577.00)	53,488,812,888.00	41,840,789,311.00
2	DINAS KESEHATAN	3,824,095,000.00	544,896,811.00	8,147,212,770.00	8,692,109,581.00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	5,000,000,000.00	144,051,025.00	9,929,123,392.00	10,073,174,417.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	(61,667,831.00)	23,037,943,400.00	22,976,275,569.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	157,674,429.00	(4,725,389,800.00)	(4,567,715,371.00)
6	SATPOL PP	-	149,071,193.00	(1,878,100,000.00)	(1,729,028,807.00)
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	(155,337,851.00)	10,308,000.00	(145,029,851.00)
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	108,352,681.00	178,000,000.00	286,352,681.00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	-	109,717,823.00	-	109,717,823.00
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	-	(117,810,369.00)	(50,000,000.00)	(167,810,369.00)
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-	(973,463,724.00)	(1,057,400,000.00)	(2,030,863,724.00)
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	167,780,371.00	715,150,000.00	882,930,371.00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	-	(184,745,895.00)	-	(184,745,895.00)
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	(83,692,941.00)	1,102,500,000.00	1,018,807,059.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	-	(346,221,914.00)	(1,325,000,000.00)	(1,671,221,914.00)
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	223,903,778.00	(370,493,000.00)	(146,589,222.00)
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	(300,000,000.00)	(69,325,735.00)	3,180,000,000.00	3,110,674,265.00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	(192,565,697.00)	(63,105,000.00)	(255,670,697.00)
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	2,737,648.00	(5,995,300.00)	(3,257,652.00)
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM	3,770,000,000.00	72,175,868.00	927,225,000.00	999,400,868.00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	1,328,393,000.00	-	1,328,393,000.00
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	(571,226.00)	-	(571,226.00)
23	SETDA	810,309,000.00	(28,112,538.00)	4,914,000,000.00	4,885,887,462.00
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	-	-	1,680,000,000.00	1,680,000,000.00
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	-	-	200,000,000.00	200,000,000.00
c	SETDA (BAGIAN UMUM)	-	(28,112,538.00)	687,000,000.00	658,887,462.00
d	SETDA (BAGIAN HUMAS)	-	-	10,000,000.00	10,000,000.00
e	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	-	-	-	-
f	SETDA (BAGIAN HUKUM)	-	-	150,000,000.00	150,000,000.00
g	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	810,309,000.00	-	2,087,000,000.00	2,087,000,000.00
h	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	-	-	100,000,000.00	100,000,000.00
24	SEKRETARIAT DPRD	-	(37,223,896.00)	(1,353,357,000.00)	(1,390,580,896.00)
25	KECAMATAN REMBANG	-	188,156,869.00	2,793,716,000.00	2,981,872,869.00
26	KECAMATAN KALIORI	-	(106,973,694.00)	47,000,000.00	(59,973,694.00)
27	KECAMATAN SULANG	-	(261,656,634.00)	127,000,000.00	(134,656,634.00)
28	KECAMATAN SUMBER	-	(218,453,605.00)	42,500,000.00	(175,953,605.00)
29	KECAMATAN BULU	-	(264,644,303.00)	62,500,000.00	(202,144,303.00)
30	KECAMATAN LASEM	-	(107,904,230.00)	45,500,000.00	(62,404,230.00)
31	KECAMATAN PANCUR	-	(378,014,893.00)	50,000,000.00	(328,014,893.00)
32	KECAMATAN SLUKE	-	67,589,936.00	39,500,000.00	107,089,936.00
33	KECAMATAN PAMOTAN	-	(186,579,591.00)	45,500,000.00	(141,079,591.00)
34	KECAMATAN GUNEM	-	(142,645,846.00)	50,500,000.00	(92,145,846.00)
35	KECAMATAN SALE	-	(22,419,920.00)	87,675,000.00	65,255,080.00
36	KECAMATAN KRAGAN	-	(468,704,915.00)	25,875,000.00	(442,829,915.00)
37	KECAMATAN SEDAN	-	(290,827,569.00)	99,550,000.00	(191,277,569.00)
38	KECAMATAN SARANG	-	(58,934,020.00)	34,975,000.00	(23,959,020.00)
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	-	(453,998,767.00)	1,355,000,000.00	901,001,233.00
40	BAPPEDA	-	(38,314,689.00)	385,981,340.00	347,666,651.00
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	63,895,509,000.00	16,108,450,010.19	686,630,156.00	16,795,080,166.19
a	(SKPD)	5,671,750,000.00	92,193,387.19	686,630,156.00	778,823,543.19
b	(PPKD)	58,223,759,000.00	16,016,256,623.00	-	16,016,256,623.00
42	BKD	-	104,528,479.00	65,848,800.00	170,377,279.00
	JUMLAH	76,969,913,000.00	2,578,644,051.19	100,846,686,646.00	103,425,330,697.19

REKAPITULASI
ANGGARAN BELANJA SKPD RAPBD PERUBAHAN
2019

NO.	SKPD	PEMBAHASAN			
		BERTAMBAH (BERKURANG)			
		PENDAPATAN	BELANJA		JUMLAH
1	2		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	
		24=16-8	25=17-9	26=18-10	27=25+26
1	DINPENDIKPORA	-	-	(50,000,000.00)	(50,000,000.00)
2	DINAS KESEHATAN	-	-	6,670,000.00	6,670,000.00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	-	-	-	-
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-	4,600,000,000.00	4,600,000,000.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	40,000,000.00	40,000,000.00
6	SATPOL PP	-	-	-	-
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	-	-	-
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	-
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	-	-
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	-	-	-	-
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-	-	350,000,000.00	350,000,000.00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	100,000,000.00	100,000,000.00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	-
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-	-
15	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	-
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	-	-	-	-
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	-	-	-
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-	-
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM	-	-	-	-
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-
23	SETDA	-	-	-	-
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	-	-	-	-
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	-	-	-	-
c	SETDA (BAGIAN UMUM)	-	-	-	-
d	SETDA (BAGIAN HUMAS)	-	-	-	-
e	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	-	-	-	-
f	SETDA (BAGIAN HUKUM)	-	-	-	-
g	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	-	-	-	-
h	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	-	-	-	-
24	SEKRETARIAT DPRD	-	-	(356,670,000.00)	(356,670,000.00)
25	KECAMATAN REMBANG	-	-	-	-
26	KECAMATAN KALIORI	-	-	-	-
27	KECAMATAN SULANG	-	-	-	-
28	KECAMATAN SUMBER	-	-	-	-
29	KECAMATAN BULU	-	-	-	-
30	KECAMATAN LASEM	-	-	-	-
31	KECAMATAN PANCUR	-	-	-	-
32	KECAMATAN SLUKE	-	-	-	-
33	KECAMATAN PAMOTAN	-	-	-	-
34	KECAMATAN GUNEM	-	-	-	-
35	KECAMATAN SALE	-	-	-	-
36	KECAMATAN KRAGAN	-	-	-	-
37	KECAMATAN SEDAN	-	-	-	-
38	KECAMATAN SARANG	-	-	-	-
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	-	-	-	-
40	BAPPEDA	-	-	-	-
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	(4,690,000,000.00)	-	(4,690,000,000.00)
a	(SKPD)	-	-	-	-
b	(PPKD)	-	(4,690,000,000.00)	-	(4,690,000,000.00)
42	BKD	-	-	-	-
	JUMLAH	-	(4,690,000,000.00)	4,690,000,000.00	-

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH (BERKURANG)	PEMBAHASAN			KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		PERSETUJUAN	BERTAMBAH (BERKURANG)	BERTAMBAH (BERKURANG)	
1	2	3	4	5 = 4-3	6	7= 6-3	8 = 6-4	9
1.1	Pendapatan Asli Daerah	291.855.438.071,00	310.601.592.071,00	18.746.154.000,00	310.601.592.071,00	18.746.154.000,00	-	
1.1.1	Pajak Daerah	96.850.500.000,00	100.522.250.000,00	3.671.750.000,00	100.522.250.000,00	3.671.750.000,00	-	
1.1.2	Retribusi Daerah	23.158.499.000,00	24.102.329.000,00	943.830.000,00	24.102.329.000,00	943.830.000,00	-	
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keayaan Daerah yang Dipisahkan	10.030.000.000,00	10.840.309.000,00	810.309.000,00	10.840.309.000,00	810.309.000,00	-	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	161.816.439.071,00	175.136.704.071,00	13.320.265.000,00	175.136.704.071,00	13.320.265.000,00	-	
1.2	Dana Perimbangan	1.086.414.856.000,00	1.090.338.415.000,00	3.923.559.000,00	1.090.338.415.000,00	3.923.559.000,00	-	
1.2.2	Dana Transfer Umum	842.646.897.000,00	846.570.456.000,00	3.923.559.000,00	846.570.456.000,00	3.923.559.000,00	-	
1.2.3	Dana Transfer Khusus	243.767.959.000,00	243.767.959.000,00	-	243.767.959.000,00	-	-	
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	406.869.212.000,00	461.169.412.000,00	54.300.200.000,00	461.169.412.000,00	54.300.200.000,00	-	
1.3.1	Pendapatan Hibah	58.432.800.000,00	58.993.000.000,00	560.200.000,00	58.993.000.000,00	560.200.000,00	-	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah lainnya	90.000.000.000,00	106.030.000.000,00	16.030.000.000,00	106.030.000.000,00	16.030.000.000,00	-	
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi	258.436.412.000,00	258.436.412.000,00	-	258.436.412.000,00	-	-	
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	37.710.000.000,00	37.710.000.000,00	37.710.000.000,00	37.710.000.000,00	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.785.139.506.071,00	1.862.109.419.071,00	76.969.913.000,00	1.862.109.419.071,00	76.969.913.000,00	-	

PROYEKSI PEMBIAYAAN RAPBD PERUBAHAN 2019

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH (BERKURANG)	PEMBAHASAN			KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		PERSETUJUAN	BERTAMBAH (BERKURANG)	BERTAMBAH (BERKURANG)	
1	2	3	4	5 = 4-3	6	7= 6-3	8 = 6-4	9
3.1	Penerimaan Pembiayaan	49.237.212.843,00	155.692.630.540,19	106.455.417.697,19	155.692.630.540,19	106.455.417.697,19	-	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	49.237.212.843,00	75.692.630.540,19	26.455.417.697,19	75.692.630.540,19	26.455.417.697,19	-	
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah		80.000.000.000,00	80.000.000.000,00	80.000.000.000,00	80.000.000.000,00	-	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	49.237.212.843,00	155.692.630.540,19	106.455.417.697,19	155.692.630.540,19	106.455.417.697,19	-	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	6.868.368.000,00	86.868.368.000,00	80.000.000.000,00	86.868.368.000,00	80.000.000.000,00	-	
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	3.000.000.000,00	-	-	
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	3.868.368.000,00	83.868.368.000,00	80.000.000.000,00	83.868.368.000,00	80.000.000.000,00	-	
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.868.368.000,00	86.868.368.000,00	80.000.000.000,00	86.868.368.000,00	80.000.000.000,00	-	

REKAPITULASI PENDAPATAN ASLI DAERAH PER SKPD

NO	SKPD	PROYEKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH				
		JUMLAH				
		SEBELUM PERUBAHAN				
		Hasil Pajak Daerah	Hasil Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7=+3+4+5+6
1	DINPENDIKPORA		50.000.000			50.000.000,00
2	DINAS KESEHATAN		215.000.000,00		44.540.767.600,00	44.755.767.600,00
3	RSU R. SOETRASNO				105.000.000.000,00	105.000.000.000,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		1.000.000.000,00		20.000.000,00	1.020.000.000,00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		1.115.000.000,00			1.115.000.000,00
6	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA		20.750.000,00			20.750.000,00
7	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		121.535.000,00			121.535.000,00
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		130.000.000,00			130.000.000,00
9	DINAS PERHUBUNGAN		1.225.489.000,00			1.225.489.000,00
10	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		362.000.000,00			362.000.000,00
11	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		1.019.000.000,00			1.019.000.000,00
12	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		13.929.715.000,00		278.809.000,00	14.208.524.000,00
13	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM		3.635.010.000,00		2.267.765,00	3.637.277.765,00
14	SEKRETARIAT DAERAH	-	135.000.000,00	10.030.000.000,00	-	10.165.000.000,00
	Bag. Umum		90.000.000			90.000.000,00
	Bag. Administrasi Perekonomian			10.030.000.000		10.030.000.000,00
	Bag. Kesejahteraan Rakyat					-
	Bag. Humas		45.000.000			45.000.000,00
15	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)	96.850.500.000	200.000.000		11.974.594.706	109.025.094.706,00
	JUMLAH	96.850.500.000,00	23.158.499.000,00	10.030.000.000,00	181.818.439.071,00	291.855.438.071,00

NO	SKPD	PROYEKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH				
		JUMLAH				
		SETELAH PERUBAHAN				
		Hasil Pajak Daerah	Hasil Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	JUMLAH
1	2	8	9	10	11	12=8+9+10+11
1	DINPENDIKPORA		20.000.000			20.000.000,00
2	DINAS KESEHATAN		1.329.830.000,00		47.250.032.600,00	48.579.862.600,00
3	RSU R. SOETRASNO				110.000.000.000,00	110.000.000.000,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		1.000.000.000,00		20.000.000,00	1.020.000.000,00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		1.115.000.000,00			1.115.000.000,00
6	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA		20.750.000,00			20.750.000,00
7	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		121.535.000,00			121.535.000,00
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		130.000.000,00			130.000.000,00
9	DINAS PERHUBUNGAN		1.214.489.000,00		11.000.000,00	1.225.489.000,00
10	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		362.000.000,00			362.000.000,00
11	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		719.000.000,00			719.000.000,00
12	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		13.929.715.000,00		278.809.000,00	14.208.524.000,00
13	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM		3.805.010.000,00		3.602.267.765,00	7.407.277.765,00
14	SEKRETARIAT DAERAH	-	135.000.000,00	10.840.309.000,00	-	10.975.309.000,00
	Bag. Umum		90.000.000			90.000.000,00
	Bag. Administrasi Perekonomian			10.840.309.000		10.840.309.000,00
	Bag. Kesejahteraan Rakyat					-
	Bag. Humas		45.000.000			45.000.000,00
15	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)	100.522.250.000	200.000.000		13.974.594.706,00	114.696.844.706,00
	JUMLAH	100.522.250.000,00	24.102.329.000,00	10.840.309.000,00	175.136.704.071,00	310.601.592.071,00

NO	SKPD	PROYEKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH				
		JUMLAH				
		BERTAMBAH(BERKURANG)				
		Hasil Pajak Daerah	Hasil Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	JUMLAH
1	2	13=8-3	14=9-4	15=10-5	16=11-6	17=13+14+15+16
1	DINPENDIKPORA	-	(30.000.000,00)	-	-	(30.000.000,00)
2	DINAS KESEHATAN	-	1.114.830.000,00	-	2.709.265.000,00	3.824.095.000,00
3	RSU R. SOETRASNO	-	-	-	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-	-	-	-
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	-	-	-
6	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	-	-	-	-	-
7	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-	-	-	-	-
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-	-
9	DINAS PERHUBUNGAN	-	(11.000.000,00)	-	11.000.000,00	-
10	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-	-
11	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	-	(300.000.000,00)	-	-	(300.000.000,00)
12	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-	-	-
13	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM	-	170.000.000,00	-	3.600.000.000,00	3.770.000.000,00
14	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	810.309.000,00	-	810.309.000,00
	Bag. Umum	-	-	-	-	-
	Bag. Administrasi Perekonomian	-	-	810.309.000,00	-	810.309.000,00
	Bag. Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	-
	Bag. Humas	-	-	-	-	-
15	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)	3.671.750.000,00	-	-	2.000.000.000,00	5.671.750.000,00
	JUMLAH	3.671.750.000,00	943.830.000,00	810.309.000,00	13.320.265.000,00	18.746.154.000,00

NO	SKPD	PROYEKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH				
		PEMBAHASAN				
		PERSETUJUAN				
		Hasil Pajak Daerah	Hasil Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	JUMLAH
1	2	18	19	20	21	22=18+19+20+21
1	DINPENDIKPORA		20.000.000			20.000.000,00
2	DINAS KESEHATAN		1.329.830.000,00		47.250.032.600,00	48.579.862.600,00
3	RSU R. SOETRASNO				110.000.000.000,00	110.000.000.000,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		1.000.000.000,00		20.000.000,00	1.020.000.000,00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		1.115.000.000,00			1.115.000.000,00
6	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA		20.750.000,00			20.750.000,00
7	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		121.535.000,00			121.535.000,00
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		130.000.000,00			130.000.000,00
9	DINAS PERHUBUNGAN		1.214.489.000,00		11.000.000,00	1.225.489.000,00
10	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		362.000.000,00			362.000.000,00
11	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		719.000.000,00			719.000.000,00
12	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		13.929.715.000,00		278.809.000,00	14.208.524.000,00
13	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM		3.805.010.000,00		3.602.267.765,00	7.407.277.765,00
14	SEKRETARIAT DAERAH	-	135.000.000,00	10.840.309.000,00	-	10.975.309.000,00
	Bag. Umum		90.000.000			90.000.000,00
	Bag. Administrasi Perekonomian			10.840.309.000		10.840.309.000,00
	Bag. Kesejahteraan Rakyat					-
	Bag. Humas		45.000.000			45.000.000,00
15	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)	100.522.250.000	200.000.000		13.974.594.706,00	114.696.844.706,00
	JUMLAH	100.522.250.000,00	24.102.329.000,00	10.840.309.000,00	175.136.704.071,00	310.601.592.071,00

REKAPITULASI PENDAPATAN ASLI DAERAH PER

NO	SKPD	PROYEKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH				
		PEMBAHASAN				
		BERTAMBAH(BERKURANG)				
		Hasil Pajak Daerah	Hasil Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	JUMLAH
1	2	23=18-3	24=19-4	25=20-5	26=21-6	27=23+24+25+26
1	DINPENDIKPORA	-	(30.000.000,00)	-	-	(30.000.000,00)
2	DINAS KESEHATAN	-	1.114.830.000,00	-	2.709.265.000,00	3.824.095.000,00
3	RSU R. SOETRASNO	-	-	-	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-	-	-	-
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	-	-	-
6	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	-	-	-	-	-
7	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-	-	-	-	-
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-	-
9	DINAS PERHUBUNGAN	-	(11.000.000,00)	-	11.000.000,00	-
10	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-	-
11	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	-	(300.000.000,00)	-	-	(300.000.000,00)
12	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-	-	-
13	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM	-	170.000.000,00	-	3.600.000.000,00	3.770.000.000,00
14	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	810.309.000,00	-	810.309.000,00
	Bag. Umum	-	-	-	-	-
	Bag. Administrasi Perekonomian	-	-	810.309.000,00	-	810.309.000,00
	Bag. Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	-
	Bag. Humas	-	-	-	-	-
15	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)	3.671.750.000,00	-	-	2.000.000.000,00	5.671.750.000,00
	JUMLAH	3.671.750.000,00	943.830.000,00	810.309.000,00	13.320.265.000,00	18.746.154.000,00

REKAPITULASI PENDAPATAN ASLI DAERAH PE

NO	SKPD	PROYEKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH				
		PEMBAHASAN				
		BERTAMBAH(BERKURANG)				
		Hasil Pajak Daerah	Hasil Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	JUMLAH
1	2	28=18-8	29=19-9	30=20-10	31=21-11	32
1	DINPENDIKPORA	-	-	-	-	-
2	DINAS KESEHATAN	-	-	-	-	-
3	RSU R. SOETRASNO	-	-	-	-	-
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-	-	-	-
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	-	-	-
6	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	-	-	-	-	-
7	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-	-	-	-	-
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-	-
9	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	-	-
10	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-	-
11	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	-	-	-	-	-
12	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-	-	-
13	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM	-	-	-	-	-
14	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	-	-
	Bag. Umum	-	-	-	-	-
	Bag. Administrasi Perekonomian	-	-	-	-	-
	Bag. Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	-
	Bag. Humas	-	-	-	-	-
15	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	-	-	-

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	PEMBAHASAN			KETERANGAN	
		3	4		PERSETUJUAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	BERTAMBAH / (BERKURANG)		
			SEBELUM PERUB.						SETELAH PERUB.
1	2			5	6	7 = 6 - 3	8 = 6 - 4	9	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	1.493.284.068.000,00	1.551.507.827.000,00	58.223.759.000,00	1.551.507.827.000,00	58.223.759.000,00			
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2	DANA PERIMBANGAN	1.086.414.856.000,00	1.090.338.415.000,00	3.923.559.000,00	1.090.338.415.000,00	3.923.559.000,00			
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1	Dana Transfer Umum	842.646.897.000,00	846.570.456.000,00	3.923.559.000,00	846.570.456.000,00	3.923.559.000,00			
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2	Dana Transfer Khusus	243.767.959.000,00	243.767.959.000,00	-	243.767.959.000,00	-			
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	406.869.212.000,00	461.169.412.000,00	54.300.200.000,00	461.169.412.000,00	54.300.200.000,00			
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	58.432.800.000,00	58.993.000.000,00	560.200.000,00	58.993.000.000,00	560.200.000,00			
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak dan Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	90.000.000.000,00	106.030.000.000,00	16.030.000.000,00	106.030.000.000,00	16.030.000.000,00			
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	258.436.412.000,00	258.436.412.000,00	-	258.436.412.000,00	-			
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	37.710.000.000,00	37.710.000.000,00	37.710.000.000,00	37.710.000.000,00			
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	450.765.176.600,00	471.471.433.223,00	20.706.256.623,00	466.781.433.223,00	16.016.256.623,00	(4.690.000.000,00)		
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	450.765.176.600,00	471.471.433.223,00	20.706.256.623,00	466.781.433.223,00	16.016.256.623,00	(4.690.000.000,00)		
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2	Belanja Bunga	1.131.632.000,00	1.631.632.000,00	500.000.000,00	1.631.632.000,00	500.000.000,00	-		
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4	Belanja Hibah	48.064.900.000,00	55.358.292.000,00	7.293.392.000,00	55.418.292.000,00	7.353.392.000,00	60.000.000,00		
	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	23.076.900.000,00	23.695.500.000,00	618.600.000,00	23.695.500.000,00	618.600.000,00	-		
	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.975.000.000,00	3.097.792.000,00	122.792.000,00	3.097.792.000,00	122.792.000,00	-		
	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	730.000.000,00	760.000.000,00	30.000.000,00	760.000.000,00	30.000.000,00	-		
	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	-	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-		
	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	6.415.000.000,00	6.278.000.000,00	(137.000.000,00)	6.338.000.000,00	(77.000.000,00)	60.000.000,00		
	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	85.000.000,00	140.000.000,00	55.000.000,00	140.000.000,00	55.000.000,00	-		
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	590.000.000,00	1.530.000.000,00	940.000.000,00	1.530.000.000,00	940.000.000,00	-		
	DININDAGKOP & UKM	125.000.000,00	165.000.000,00	40.000.000,00	165.000.000,00	40.000.000,00	-		
	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	14.068.000.000,00	18.167.000.000,00	4.099.000.000,00	18.167.000.000,00	4.099.000.000,00	-		
	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	-	1.375.000.000,00	1.375.000.000,00	1.375.000.000,00	1.375.000.000,00	-		
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	7.284.660.000,00	8.094.660.000,00	810.000.000,00	8.094.660.000,00	810.000.000,00	-		
	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	1.372.160.000,00	1.372.160.000,00	-	1.372.160.000,00	-	-		
	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	500.000.000,00	500.000.000,00	-	500.000.000,00	-	-		
	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.412.500.000,00	6.222.500.000,00	810.000.000,00	6.222.500.000,00	810.000.000,00	-		
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	11.944.474.900,00	16.684.474.900,00	4.740.000.000,00	11.984.474.900,00	40.000.000,00	(4.700.000.000,00)		
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	11.944.474.900,00	16.684.474.900,00	4.740.000.000,00	11.984.474.900,00	40.000.000,00	(4.700.000.000,00)		
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	381.339.509.700,00	388.425.509.700,00	7.086.000.000,00	388.375.509.700,00	7.036.000.000,00	(50.000.000,00)		
	DINAS KESEHATAN	5.050.000.000,00	5.050.000.000,00	-	5.050.000.000,00	-	-		
	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	-	7.786.000.000,00	7.786.000.000,00	7.786.000.000,00	7.786.000.000,00	-		
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	116.762.141.700,00	116.062.141.700,00	(700.000.000,00)	116.012.141.700,00	(750.000.000,00)	(50.000.000,00)		
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DANA DESA)	258.436.412.000,00	258.436.412.000,00	-	258.436.412.000,00	-	-		
	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.090.956.000,00	1.090.956.000,00	-	1.090.956.000,00	-	-		
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.276.864.623,00	276.864.623,00	1.276.864.623,00	276.864.623,00	-		
	SURPLUS / (DEFISIT)	1.042.518.891.400,00	1.080.036.393.777,00	37.517.502.377,00	1.084.726.393.777,00	42.207.502.377,00	4.690.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	PEMBAHASAN			KETERANGAN
		SEBELUM PERUB.	SETELAH PERUB.		PERSETUJUAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8 = 6 - 4	9
4.04.4.04.01.00.00.6	PEMBIAYAAN DAERAH							
4.04.4.04.01.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	49.237.212.843,00	155.692.630.540,19	106.455.417.697,19	155.692.630.540,19	106.455.417.697,19	-	
4.04.4.04.01.00.00.6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	49.237.212.843,00	75.692.630.540,19	26.455.417.697,19	75.692.630.540,19	26.455.417.697,19	-	
4.04.4.04.01.00.00.6.1.2	Penerimaan Pinjaman daerah		80.000.000.000,00	80.000.000.000,00	80.000.000.000,00	80.000.000.000,00	-	
4.04.4.04.01.00.00.6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	6.868.368.000,00	86.868.368.000,00	80.000.000.000,00	86.868.368.000,00	80.000.000.000,00	-	
4.04.4.04.01.00.00.6.2.2	Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	3.000.000.000,00	-	-	
4.04.4.04.01.00.00.6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	3.868.368.000,00	83.868.368.000,00	80.000.000.000,00	83.868.368.000,00	80.000.000.000,00	-	
4.04.4.04.01.00.00.6.2.5	Restitusi atas Kelebihan Penetapan Pajak	-	-	-	-	-	-	
	PEMBIAYAAN NETTO	42.368.844.843,00	68.824.262.540,19	26.455.417.697,19	68.824.262.540,19	26.455.417.697,19	-	

REKAPITULASI
BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO.	ORGANISASI	JUMLAH (Rp)							
		SEBELUM PERUBAHAN							
		Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintah Desa	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	Belanja Tidak Terduga	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 3+4+5+6+7+8+9
1	DINPENDIKPORA	419.709.047.225,00							419.709.047.225,00
2	DINAS KESEHATAN	53.310.932.641,00							53.310.932.641,00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	26.918.245.300,00							26.918.245.300,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8.522.953.150,00							8.522.953.150,00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.936.457.750,00							4.936.457.750,00
6	SATPOL PP	6.323.578.200,00							6.323.578.200,00
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.483.727.900,00							1.483.727.900,00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.989.771.050,00							2.989.771.050,00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	5.160.660.250,00							5.160.660.250,00
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	4.943.505.650,00							4.943.505.650,00
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	13.779.567.150,00							13.779.567.150,00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8.274.225.550,00							8.274.225.550,00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.434.890.233,00							3.434.890.233,00
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.539.472.750,00							3.539.472.750,00
15	DINAS PERHUBUNGAN	5.647.905.350,00							5.647.905.350,00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.388.806.950,00							2.388.806.950,00
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	2.813.878.600,00							2.813.878.600,00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2.883.365.600,00							2.883.365.600,00
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.685.616.500,00							3.685.616.500,00
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM	10.362.662.022,00							10.362.662.022,00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	19.884.881.000,00							19.884.881.000,00
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	771.327.550,00							771.327.550,00
23	SETDA	15.229.768.550,00							15.229.768.550,00
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)								
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)								
c	SETDA (BAGIAN UMUM)	15.229.768.550,00							15.229.768.550,00
d	SETDA (BAGIAN HUMAS)								
e	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)								
f	SETDA (BAGIAN HUKUM)								
g	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)								
h	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)								
24	SEKRETARIAT DPRD	4.706.626.338,00							4.706.626.338,00
25	KECAMATAN REMBANG	5.737.821.800,00							5.737.821.800,00
26	KECAMATAN KALIORI	2.304.363.400,00							2.304.363.400,00
27	KECAMATAN SULANG	2.299.972.250,00							2.299.972.250,00
28	KECAMATAN SUMBER	2.198.830.500,00							2.198.830.500,00
29	KECAMATAN BULU	2.091.557.800,00							2.091.557.800,00
30	KECAMATAN LASEM	2.421.238.850,00							2.421.238.850,00
31	KECAMATAN PANCUR	2.436.189.100,00							2.436.189.100,00
32	KECAMATAN SLUKE	1.544.609.200,00							1.544.609.200,00
33	KECAMATAN PAMOTAN	1.870.432.250,00							1.870.432.250,00
34	KECAMATAN GUNEM	1.724.823.900,00							1.724.823.900,00
35	KECAMATAN SALE	1.738.018.250,00							1.738.018.250,00
36	KECAMATAN KRAGAN	2.513.109.238,00							2.513.109.238,00
37	KECAMATAN SEDAN	2.201.440.250,00							2.201.440.250,00
38	KECAMATAN SARANG	2.467.538.100,00							2.467.538.100,00
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	4.558.777.850,00							4.558.777.850,00
40	BAPPEDA	3.673.469.700,00							3.673.469.700,00
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	15.617.406.958,00	1.131.632.000,00	11.944.474.900,00	48.064.900.000,00	7.284.660.000,00	381.339.509.700,00	1.000.000.000,00	466.382.583.558,00
a	(SKPD)	15.617.406.958,00							15.617.406.958,00
b	(PPKD)		1.131.632.000,00	11.944.474.900,00	48.064.900.000,00	7.284.660.000,00	381.339.509.700,00	1.000.000.000,00	450.765.176.600,00
42	BKD	4.171.069.950,00							4.171.069.950,00
	JUMLAH	693.272.542.605,00	1.131.632.000,00	11.944.474.900,00	48.064.900.000,00	7.284.660.000,00	381.339.509.700,00	1.000.000.000,00	1.144.037.719.205,00

REKAPITULASI
BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO.	ORGANISASI	JUMLAH (Rp)							
		SETELAH PERUBAHAN							
		Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintah Desa	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	Belanja Tidak Terduga	JUMLAH
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18 = 11+12+13+14+15+16+17
1	DINPENDIKPORA	408.061.023.648,00							408.061.023.648,00
2	DINAS KESEHATAN	53.855.829.452,00							53.855.829.452,00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	27.062.296.325,00							27.062.296.325,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8.461.285.319,00							8.461.285.319,00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.094.132.179,00							5.094.132.179,00
6	SATPOL PP	6.472.649.393,00							6.472.649.393,00
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.328.390.049,00							1.328.390.049,00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.098.123.731,00							3.098.123.731,00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	5.270.378.073,00							5.270.378.073,00
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	4.825.695.281,00							4.825.695.281,00
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	12.806.103.426,00							12.806.103.426,00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8.442.005.921,00							8.442.005.921,00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.250.144.338,00							3.250.144.338,00
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.455.779.809,00							3.455.779.809,00
15	DINAS PERHUBUNGAN	5.301.683.436,00							5.301.683.436,00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.612.710.728,00							2.612.710.728,00
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	2.744.552.865,00							2.744.552.865,00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2.690.799.903,00							2.690.799.903,00
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.688.354.148,00							3.688.354.148,00
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM	10.434.837.890,00							10.434.837.890,00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	21.213.274.000,00							21.213.274.000,00
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	770.756.324,00							770.756.324,00
23	SETDA	15.201.656.012,00							15.201.656.012,00
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)								
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)								
c	SETDA (BAGIAN UMUM)	15.201.656.012,00							15.201.656.012,00
d	SETDA (BAGIAN HUMAS)								
e	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)								
f	SETDA (BAGIAN HUKUM)								
g	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)								
h	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)								
24	SEKRETARIAT DPRD	4.669.402.442,00							4.669.402.442,00
25	KECAMATAN REMBANG	5.925.978.669,00							5.925.978.669,00
26	KECAMATAN KALIORI	2.197.389.706,00							2.197.389.706,00
27	KECAMATAN SULANG	2.038.315.616,00							2.038.315.616,00
28	KECAMATAN SUMBER	1.980.376.895,00							1.980.376.895,00
29	KECAMATAN BULU	1.826.913.497,00							1.826.913.497,00
30	KECAMATAN LASEM	2.313.334.620,00							2.313.334.620,00
31	KECAMATAN PANCUR	2.058.174.207,00							2.058.174.207,00
32	KECAMATAN SLUKE	1.612.199.136,00							1.612.199.136,00
33	KECAMATAN PAMOTAN	1.683.852.659,00							1.683.852.659,00
34	KECAMATAN GUNEM	1.582.178.054,00							1.582.178.054,00
35	KECAMATAN SALE	1.715.598.330,00							1.715.598.330,00
36	KECAMATAN KRAGAN	2.044.404.323,00							2.044.404.323,00
37	KECAMATAN SEDAN	1.910.612.681,00							1.910.612.681,00
38	KECAMATAN SARANG	2.408.604.080,00							2.408.604.080,00
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	4.104.779.083,00							4.104.779.083,00
40	BAPPEDA	3.635.155.011,00							3.635.155.011,00
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	15.709.600.345,19	1.631.632.000,00	16.684.474.900,00	55.358.292.000,00	8.094.660.000,00	388.425.509.700,00	1.276.864.623,00	487.181.033.568,19
a	(SKPD)	15.709.600.345,19							15.709.600.345,19
b	(PPKD)		1.631.632.000,00	16.684.474.900,00	55.358.292.000,00	8.094.660.000,00	388.425.509.700,00	1.276.864.623,00	471.471.433.223,00
42	BKD	4.275.598.429,00							4.275.598.429,00
	JUMLAH	879.834.830.033,19	1.631.632.000,00	16.684.474.900,00	55.358.292.000,00	8.094.660.000,00	388.425.509.700,00	1.276.864.623,00	1.151.306.383.256,19

REKAPITULASI
BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO.	ORGANISASI	BERTAMBAH (BERKURANG)							
		Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintah Desa	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	Belanja Tidak Terduga	JUMLAH
1	2	19 = 11-3	20 = 12-4	21 = 13-5	22 = 14-6	23 = 15-7	24 = 16-8	25 = 17-9	26=19+20+21+22+23+24+25
1	DINPENDIKPORA	(11.648.023.577,00)	-	-	-	-	-	-	(11.648.023.577,00)
2	DINAS KESEHATAN	544.896.811,00	-	-	-	-	-	-	544.896.811,00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	144.051.025,00	-	-	-	-	-	-	144.051.025,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	(61.667.831,00)	-	-	-	-	-	-	(61.667.831,00)
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	157.674.429,00	-	-	-	-	-	-	157.674.429,00
6	SATPOL PP	149.071.193,00	-	-	-	-	-	-	149.071.193,00
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	(155.337.851,00)	-	-	-	-	-	-	(155.337.851,00)
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	108.352.681,00	-	-	-	-	-	-	108.352.681,00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	109.717.823,00	-	-	-	-	-	-	109.717.823,00
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	(117.810.369,00)	-	-	-	-	-	-	(117.810.369,00)
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	(973.463.724,00)	-	-	-	-	-	-	(973.463.724,00)
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	167.780.371,00	-	-	-	-	-	-	167.780.371,00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	(184.745.895,00)	-	-	-	-	-	-	(184.745.895,00)
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	(83.692.941,00)	-	-	-	-	-	-	(83.692.941,00)
15	DINAS PERHUBUNGAN	(346.221.914,00)	-	-	-	-	-	-	(346.221.914,00)
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	223.903.778,00	-	-	-	-	-	-	223.903.778,00
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	(69.325.735,00)	-	-	-	-	-	-	(69.325.735,00)
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	(192.565.697,00)	-	-	-	-	-	-	(192.565.697,00)
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.737.648,00	-	-	-	-	-	-	2.737.648,00
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM	72.175.868,00	-	-	-	-	-	-	72.175.868,00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	1.328.393.000,00	-	-	-	-	-	-	1.328.393.000,00
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	(571.226,00)	-	-	-	-	-	-	(571.226,00)
23	SETDA	(28.112.538,00)	-	-	-	-	-	-	(28.112.538,00)
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	-	-	-	-	-	-	-	-
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	-	-	-	-	-	-	-	-
c	SETDA (BAGIAN UMUM)	(28.112.538,00)	-	-	-	-	-	-	(28.112.538,00)
d	SETDA (BAGIAN HUMAS)	-	-	-	-	-	-	-	-
e	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	-	-	-	-	-	-	-	-
f	SETDA (BAGIAN HUKUM)	-	-	-	-	-	-	-	-
g	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	-	-	-	-	-	-	-	-
h	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	-	-	-	-	-	-	-	-
24	SEKRETARIAT DPRD	(37.223.896,00)	-	-	-	-	-	-	(37.223.896,00)
25	KECAMATAN REMBANG	188.156.869,00	-	-	-	-	-	-	188.156.869,00
26	KECAMATAN KALIORI	(106.973.694,00)	-	-	-	-	-	-	(106.973.694,00)
27	KECAMATAN SULANG	(261.656.634,00)	-	-	-	-	-	-	(261.656.634,00)
28	KECAMATAN SUMBER	(218.453.605,00)	-	-	-	-	-	-	(218.453.605,00)
29	KECAMATAN BULU	(264.644.303,00)	-	-	-	-	-	-	(264.644.303,00)
30	KECAMATAN LASEM	(107.904.230,00)	-	-	-	-	-	-	(107.904.230,00)
31	KECAMATAN PANCUR	(378.014.893,00)	-	-	-	-	-	-	(378.014.893,00)
32	KECAMATAN SLUKE	67.589.936,00	-	-	-	-	-	-	67.589.936,00
33	KECAMATAN PAMOTAN	(186.579.591,00)	-	-	-	-	-	-	(186.579.591,00)
34	KECAMATAN GUNEM	(142.645.846,00)	-	-	-	-	-	-	(142.645.846,00)
35	KECAMATAN SALE	(22.419.920,00)	-	-	-	-	-	-	(22.419.920,00)
36	KECAMATAN KRAGAN	(468.704.915,00)	-	-	-	-	-	-	(468.704.915,00)
37	KECAMATAN SEDAN	(290.827.569,00)	-	-	-	-	-	-	(290.827.569,00)
38	KECAMATAN SARANG	(58.934.020,00)	-	-	-	-	-	-	(58.934.020,00)
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	(453.998.767,00)	-	-	-	-	-	-	(453.998.767,00)
40	BAPPEDA	(38.314.689,00)	-	-	-	-	-	-	(38.314.689,00)
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	92.193.387,19	500.000.000,00	4.740.000.000,00	7.293.392.000,00	810.000.000,00	7.086.000.000,00	276.864.623,00	20.798.450.010,19
a	(SKPD)	92.193.387,19	-	-	-	-	-	-	92.193.387,19
b	(PPKD)	-	500.000.000,00	4.740.000.000,00	7.293.392.000,00	810.000.000,00	7.086.000.000,00	276.864.623,00	20.706.256.623,00
42	BKD	104.528.479,00	-	-	-	-	-	-	104.528.479,00
	JUMLAH	(13.437.612.571,81)	500.000.000,00	4.740.000.000,00	7.293.392.000,00	810.000.000,00	7.086.000.000,00	276.864.623,00	7.268.644.051,19

REKAPITULASI
BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO.	ORGANISASI	PEMBAHASAN PERSETUJUAN							
		Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintah Desa	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	Belanja Tidak Terduga	JUMLAH
		27	28	29	30	31	32	33	34 = 27+28+29+30+31+32+33
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34 = 27+28+29+30+31+32+33
1	DINPENDIKPORA	408.061.023.648,00							408.061.023.648,00
2	DINAS KESEHATAN	53.855.829.452,00							53.855.829.452,00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	27.062.296.325,00							27.062.296.325,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8.461.285.319,00							8.461.285.319,00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.094.132.179,00							5.094.132.179,00
6	SATPOL PP	6.472.649.393,00							6.472.649.393,00
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.328.390.049,00							1.328.390.049,00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.098.123.731,00							3.098.123.731,00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	5.270.378.073,00							5.270.378.073,00
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	4.825.695.281,00							4.825.695.281,00
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	12.806.103.426,00							12.806.103.426,00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8.442.005.921,00							8.442.005.921,00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.250.144.338,00							3.250.144.338,00
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.455.779.809,00							3.455.779.809,00
15	DINAS PERHUBUNGAN	5.301.683.436,00							5.301.683.436,00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.612.710.728,00							2.612.710.728,00
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	2.744.552.865,00							2.744.552.865,00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2.690.799.903,00							2.690.799.903,00
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.688.354.148,00							3.688.354.148,00
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM	10.434.837.890,00							10.434.837.890,00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	21.213.274.000,00							21.213.274.000,00
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	770.756.324,00							770.756.324,00
23	SETDA	15.201.656.012,00							15.201.656.012,00
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)								
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)								
c	SETDA (BAGIAN UMUM)	15.201.656.012,00							15.201.656.012,00
d	SETDA (BAGIAN HUMAS)								
e	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)								
f	SETDA (BAGIAN HUKUM)								
g	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)								
h	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)								
24	SEKRETARIAT DPRD	4.669.402.442,00							4.669.402.442,00
25	KECAMATAN REMBANG	5.925.978.669,00							5.925.978.669,00
26	KECAMATAN KALIORI	2.197.389.706,00							2.197.389.706,00
27	KECAMATAN SULANG	2.038.315.616,00							2.038.315.616,00
28	KECAMATAN SUMBER	1.980.376.895,00							1.980.376.895,00
29	KECAMATAN BULU	1.826.913.497,00							1.826.913.497,00
30	KECAMATAN LASEM	2.313.334.620,00							2.313.334.620,00
31	KECAMATAN PANCUR	2.058.174.207,00							2.058.174.207,00
32	KECAMATAN SLUKE	1.612.199.136,00							1.612.199.136,00
33	KECAMATAN PAMOTAN	1.683.852.659,00							1.683.852.659,00
34	KECAMATAN GUNEM	1.582.178.054,00							1.582.178.054,00
35	KECAMATAN SALE	1.715.598.330,00							1.715.598.330,00
36	KECAMATAN KRAGAN	2.044.404.323,00							2.044.404.323,00
37	KECAMATAN SEDAN	1.910.612.681,00							1.910.612.681,00
38	KECAMATAN SARANG	2.408.604.080,00							2.408.604.080,00
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	4.104.779.083,00							4.104.779.083,00
40	BAPPEDA	3.635.155.011,00							3.635.155.011,00
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	15.709.600.345,19	1.631.632.000,00	11.984.474.900,00	55.418.292.000,00	8.094.660.000,00	388.375.509.700,00	1.276.864.623,00	482.491.033.568,19
a	(SKPD)	15.709.600.345,19							15.709.600.345,19
b	(PPKD)		1.631.632.000,00	11.984.474.900,00	55.418.292.000,00	8.094.660.000,00	388.375.509.700,00	1.276.864.623,00	482.491.033.568,19
42	BKD	4.275.598.429,00							4.275.598.429,00
JUMLAH		879.834.930.033,19	1.631.632.000,00	11.984.474.900,00	55.418.292.000,00	8.094.660.000,00	388.375.509.700,00	1.276.864.623,00	1.146.818.383.258,19

REKAPITULASI
BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO.	ORGANISASI	PEMBAHASAN							
		BERTAMBAH (BERKURANG)							
		Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintah Desa	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	Belanja Tidak Terduga	JUMLAH
1	2	35 = 27-3	36 = 28-4	37 = 29-5	38 = 30-6	39 = 31-7	40 = 32-8	41 = 33-9	42 = 35+36+37+38+39+40+41
1	DINPENDIKPORA	(11.648.023.577,00)	-	-	-	-	-	-	(11.648.023.577,00)
2	DINAS KESEHATAN	544.896.811,00	-	-	-	-	-	-	544.896.811,00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	144.051.025,00	-	-	-	-	-	-	144.051.025,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	(61.667.831,00)	-	-	-	-	-	-	(61.667.831,00)
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	157.674.429,00	-	-	-	-	-	-	157.674.429,00
6	SATPOL PP	149.071.193,00	-	-	-	-	-	-	149.071.193,00
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	(155.337.851,00)	-	-	-	-	-	-	(155.337.851,00)
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	108.352.681,00	-	-	-	-	-	-	108.352.681,00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	109.717.823,00	-	-	-	-	-	-	109.717.823,00
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	(117.810.369,00)	-	-	-	-	-	-	(117.810.369,00)
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	(973.463.724,00)	-	-	-	-	-	-	(973.463.724,00)
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	167.780.371,00	-	-	-	-	-	-	167.780.371,00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	(184.745.895,00)	-	-	-	-	-	-	(184.745.895,00)
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	(83.692.941,00)	-	-	-	-	-	-	(83.692.941,00)
15	DINAS PERHUBUNGAN	(346.221.914,00)	-	-	-	-	-	-	(346.221.914,00)
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	223.903.778,00	-	-	-	-	-	-	223.903.778,00
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	(69.325.735,00)	-	-	-	-	-	-	(69.325.735,00)
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	(192.565.697,00)	-	-	-	-	-	-	(192.565.697,00)
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.737.648,00	-	-	-	-	-	-	2.737.648,00
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM	72.175.868,00	-	-	-	-	-	-	72.175.868,00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	1.328.393.000,00	-	-	-	-	-	-	1.328.393.000,00
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	(571.226,00)	-	-	-	-	-	-	(571.226,00)
23	SETDA	(28.112.538,00)	-	-	-	-	-	-	(28.112.538,00)
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	-	-	-	-	-	-	-	-
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	-	-	-	-	-	-	-	-
c	SETDA (BAGIAN UMUM)	(28.112.538,00)	-	-	-	-	-	-	(28.112.538,00)
d	SETDA (BAGIAN HUMAS)	-	-	-	-	-	-	-	-
e	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	-	-	-	-	-	-	-	-
f	SETDA (BAGIAN HUKUM)	-	-	-	-	-	-	-	-
g	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	-	-	-	-	-	-	-	-
h	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	-	-	-	-	-	-	-	-
24	SEKRETARIAT DPRD	(37.223.896,00)	-	-	-	-	-	-	(37.223.896,00)
25	KECAMATAN REMBANG	188.156.869,00	-	-	-	-	-	-	188.156.869,00
26	KECAMATAN KALIORI	(106.973.694,00)	-	-	-	-	-	-	(106.973.694,00)
27	KECAMATAN SULANG	(261.656.634,00)	-	-	-	-	-	-	(261.656.634,00)
28	KECAMATAN SUMBER	(218.453.605,00)	-	-	-	-	-	-	(218.453.605,00)
29	KECAMATAN BULU	(264.644.303,00)	-	-	-	-	-	-	(264.644.303,00)
30	KECAMATAN LASEM	(107.904.230,00)	-	-	-	-	-	-	(107.904.230,00)
31	KECAMATAN PANCUR	(378.014.893,00)	-	-	-	-	-	-	(378.014.893,00)
32	KECAMATAN SLUKE	67.589.936,00	-	-	-	-	-	-	67.589.936,00
33	KECAMATAN PAMOTAN	(186.579.591,00)	-	-	-	-	-	-	(186.579.591,00)
34	KECAMATAN GUNEM	(142.645.846,00)	-	-	-	-	-	-	(142.645.846,00)
35	KECAMATAN SALE	(22.419.920,00)	-	-	-	-	-	-	(22.419.920,00)
36	KECAMATAN KRAGAN	(468.704.915,00)	-	-	-	-	-	-	(468.704.915,00)
37	KECAMATAN SEDAN	(290.827.569,00)	-	-	-	-	-	-	(290.827.569,00)
38	KECAMATAN SARANG	(58.934.020,00)	-	-	-	-	-	-	(58.934.020,00)
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	(453.998.767,00)	-	-	-	-	-	-	(453.998.767,00)
40	BAPPEDA	(38.314.689,00)	-	-	-	-	-	-	(38.314.689,00)
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	92.193.387,19	500.000.000,00	40.000.000,00	7.353.392.000,00	810.000.000,00	7.036.000.000,00	276.864.623,00	16.108.450.010,19
a	(SKPD)	92.193.387,19	-	-	-	-	-	-	92.193.387,19
b	(PPKD)	-	500.000.000,00	40.000.000,00	7.353.392.000,00	810.000.000,00	7.036.000.000,00	276.864.623,00	16.016.256.623,00
42	BKD	104.528.479,00	-	-	-	-	-	-	104.528.479,00
	JUMLAH	(13.437.812.571,81)	500.000.000,00	40.000.000,00	7.353.392.000,00	810.000.000,00	7.036.000.000,00	276.864.623,00	2.578.844.051,19

REKAPITULASI
BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO.	ORGANISASI	HASIL PEMBAHASAN							
		BERTAMBAH (BERKURANG)							
		Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintah Desa	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	Belanja Tidak Terduga	JUMLAH
1	2	43 = 27-11	44 = 28-12	45 = 29-13	46 = 30-14	47 = 31-15	48 = 32-16	49 = 33-17	50 = 43+44+45+46+47+48+49
1	DINPENDIKPORA	-	-	-	-	-	-	-	-
2	DINAS KESEHATAN	-	-	-	-	-	-	-	-
3	RSUD dr R. SOETRASNO	-	-	-	-	-	-	-	-
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-	-	-	-	-	-	-
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SATPOL PP	-	-	-	-	-	-	-	-
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	-	-	-	-	-	-	-
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	-	-	-	-	-	-
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-	-	-	-	-	-	-	-
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-	-	-	-	-
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	-	-	-	-	-
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-	-	-	-	-	-
15	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	-	-	-	-	-
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-	-	-	-	-
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	-	-	-	-	-	-	-	-
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	-	-	-	-	-	-	-
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-	-	-	-	-	-
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM	-	-	-	-	-	-	-	-
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-	-	-	-	-
23	SETDA	-	-	-	-	-	-	-	-
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	-	-	-	-	-	-	-	-
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	-	-	-	-	-	-	-	-
c	SETDA (BAGIAN UMUM)	-	-	-	-	-	-	-	-
d	SETDA (BAGIAN HUMAS)	-	-	-	-	-	-	-	-
e	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	-	-	-	-	-	-	-	-
f	SETDA (BAGIAN HUKUM)	-	-	-	-	-	-	-	-
g	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	-	-	-	-	-	-	-	-
h	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	-	-	-	-	-	-	-	-
24	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-
25	KECAMATAN REMBANG	-	-	-	-	-	-	-	-
26	KECAMATAN KALIORI	-	-	-	-	-	-	-	-
27	KECAMATAN SULANG	-	-	-	-	-	-	-	-
28	KECAMATAN SUMBER	-	-	-	-	-	-	-	-
29	KECAMATAN BULU	-	-	-	-	-	-	-	-
30	KECAMATAN LASEM	-	-	-	-	-	-	-	-
31	KECAMATAN PANCUR	-	-	-	-	-	-	-	-
32	KECAMATAN SLUKE	-	-	-	-	-	-	-	-
33	KECAMATAN PAMOTAN	-	-	-	-	-	-	-	-
34	KECAMATAN GUNEM	-	-	-	-	-	-	-	-
35	KECAMATAN SALE	-	-	-	-	-	-	-	-
36	KECAMATAN KRAGAN	-	-	-	-	-	-	-	-
37	KECAMATAN SEDAN	-	-	-	-	-	-	-	-
38	KECAMATAN SARANG	-	-	-	-	-	-	-	-
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	-	-	-	-	-	-	-	-
40	BAPPEDA	-	-	-	-	-	-	-	-
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	(4.700.000.000,00)	60.000.000,00	-	(50.000.000,00)	-	(4.690.000.000,00)
a	(SKPD)	-	-	-	-	-	-	-	-
b	(PPKD)	-	-	(4.700.000.000,00)	60.000.000,00	-	(50.000.000,00)	-	(4.690.000.000,00)
42	BKD	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	(4.700.000.000,00)	60.000.000,00	-	(50.000.000,00)	-	(4.690.000.000,00)

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG

NO.	SKPD	JUMLAH			
		SEBELUM PERUBAHAN			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5
1	DINPENDIKPORA	28,582,772,000.00	30,044,080,886.00	40,900,084,964.00	99,526,937,850.00
2	DINAS KESEHATAN	34,498,312,000.00	52,272,168,624.00	5,590,243,976.00	92,360,724,600.00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	45,569,151,000.00	39,450,849,000.00	15,699,696,000.00	100,719,696,000.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3,585,692,000.00	2,195,069,000.00	75,420,404,000.00	81,201,165,000.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1,626,206,000.00	8,664,240,440.00	7,365,493,000.00	17,655,939,440.00
6	SATPOL PP	2,446,634,000.00	1,902,252,000.00	3,112,670,000.00	7,461,556,000.00
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	981,627,000.00	534,543,000.00	15,930,000.00	1,532,100,000.00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	869,316,000.00	1,833,806,100.00	2,330,977,900.00	5,034,100,000.00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	3,866,010,000.00	8,093,279,000.00	870,675,000.00	12,829,964,000.00
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	1,266,590,000.00	2,965,639,360.00	783,840,640.00	5,016,070,000.00
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	2,086,125,000.00	45,601,713,344.00	2,349,406,175.00	50,037,244,519.00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1,926,926,000.00	4,055,567,540.00	1,591,906,460.00	7,574,400,000.00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1,319,705,000.00	1,861,581,000.00	2,500,000.00	3,183,786,000.00
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	995,815,000.00	3,216,191,000.00	91,300,000.00	4,303,306,000.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	1,707,269,000.00	11,205,931,000.00	4,052,580,000.00	16,965,780,000.00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	769,474,000.00	1,485,852,950.00	3,544,963,050.00	5,800,290,000.00
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	903,825,000.00	2,917,855,000.00	1,716,125,000.00	5,537,805,000.00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2,544,250,000.00	6,836,345,000.00	1,257,105,000.00	10,637,700,000.00
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4,738,717,000.00	4,907,155,240.00	5,539,735,760.00	15,185,608,000.00
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM	2,428,900,000.00	3,831,516,138.00	8,669,855,862.00	14,930,272,000.00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-
23	SETDA	17,847,319,000.00	14,496,657,890.00	1,427,103,110.00	33,771,080,000.00
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	13,096,545,000	2,429,455,000	-	15,526,000,000.00
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	240,550,000	530,530,000	7,500,000	778,580,000.00
c	SETDA (BAGIAN UMUM)	1,397,794,000	4,492,706,000	1,212,500,000	7,103,000,000.00
d	SETDA (BAGIAN HUMAS)	867,210,000	3,328,590,000	49,200,000	4,245,000,000.00
e	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	828,125,000	1,177,075,000	-	2,005,200,000.00
f	SETDA (BAGIAN HUKUM)	571,175,000	358,823,290	15,001,710	945,000,000.00
g	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	469,120,000	1,587,379,400	6,800,600	2,063,300,000.00
h	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	376,800,000	592,099,200	136,100,800	1,105,000,000.00
24	SEKRETARIAT DPRD	1,224,973,000.00	36,286,670,000.00	1,407,929,000.00	38,919,572,000.00
25	KECAMATAN REMBANG	1,303,585,000.00	965,590,560.00	1,817,971,040.00	4,087,146,600.00
26	KECAMATAN KALIORI	328,320,000.00	373,320,000.00	146,250,000.00	847,890,000.00
27	KECAMATAN SULANG	344,809,000.00	465,641,000.00	206,000,000.00	1,016,450,000.00
28	KECAMATAN SUMBER	220,044,000.00	415,028,500.00	25,000,000.00	660,072,500.00
29	KECAMATAN BULU	336,110,000.00	294,014,000.00	184,800,000.00	814,924,000.00
30	KECAMATAN LASEM	311,372,350.00	452,217,650.00	116,000,000.00	879,590,000.00
31	KECAMATAN PANCUR	334,570,000.00	401,790,000.00	10,000,000.00	746,360,000.00
32	KECAMATAN SLUKE	290,195,000.00	339,730,000.00	138,222,500.00	768,147,500.00
33	KECAMATAN PAMOTAN	328,600,000.00	371,000,000.00	142,000,000.00	841,600,000.00
34	KECAMATAN GUNEM	275,200,000.00	360,453,560.00	38,906,440.00	674,560,000.00
35	KECAMATAN SALE	367,091,000.00	345,399,000.00	99,274,000.00	811,764,000.00
36	KECAMATAN KRAGAN	359,045,000.00	788,881,500.00	484,162,000.00	1,632,088,500.00
37	KECAMATAN SEDAN	374,886,000.00	328,353,000.00	36,600,000.00	739,839,000.00
38	KECAMATAN SARANG	296,900,000.00	586,350,000.00	515,000,000.00	1,398,250,000.00
39	INSPEKTORAT	3,939,575,000.00	2,081,895,000.00	303,000,000.00	6,324,470,000.00
40	BAPPEDA	1,781,444,000.00	5,007,156,000.00	731,400,000.00	7,520,000,000.00
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	4,764,022,000.00	6,411,192,330.00	4,795,898,670.00	15,971,113,000.00
a	(SKPD)	4,764,022,000.00	6,411,192,330.00	4,795,898,670.00	15,971,113,000.00
b	(PPKD)				-
42	BKD	1,570,572,700.00	5,954,697,500.00	26,000,000.00	7,551,270,200.00
	JUMLAH	179,311,949,050.00	310,601,673,112.00	193,557,009,547.00	683,470,631,709.00

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG

NO.	SKPD	JUMLAH			
		SETELAH PERUBAHAN			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal	JUMLAH
1	2	7	8	9	10 = 7+8+9
1	DINPENDIKPORA	39,578,211,300.00	64,205,453,896.00	49,282,085,542.00	153,065,750,738.00
2	DINAS KESEHATAN	36,771,112,684.00	50,134,078,460.00	13,596,076,226.00	100,501,267,370.00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	44,353,019,000.00	43,033,849,392.00	23,261,951,000.00	110,648,819,392.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3,581,292,000.00	2,279,780,750.00	93,778,035,650.00	99,639,108,400.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1,743,506,000.00	5,769,706,940.00	5,377,336,700.00	12,890,549,640.00
6	SATPOL PP	2,514,534,000.00	1,873,924,100.00	1,194,997,900.00	5,583,456,000.00
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	963,497,000.00	554,316,000.00	24,595,000.00	1,542,408,000.00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	883,530,000.00	1,997,592,100.00	2,330,977,900.00	5,212,100,000.00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	3,800,005,000.00	8,145,084,000.00	884,875,000.00	12,829,964,000.00
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	1,256,940,000.00	2,810,289,360.00	898,840,640.00	4,966,070,000.00
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	2,186,405,000.00	43,433,317,844.00	3,010,121,675.00	48,629,844,519.00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1,980,977,000.00	4,859,139,840.00	1,349,433,160.00	8,189,550,000.00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1,272,955,000.00	1,892,522,000.00	18,309,000.00	3,183,786,000.00
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1,187,882,500.00	4,167,923,500.00	50,000,000.00	5,405,806,000.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	1,700,559,000.00	11,143,791,000.00	2,796,430,000.00	15,640,780,000.00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	690,404,000.00	1,447,389,950.00	3,292,003,050.00	5,429,797,000.00
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	977,825,000.00	3,523,855,000.00	4,216,125,000.00	8,717,805,000.00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	1,758,050,000.00	7,322,745,000.00	1,493,800,000.00	10,574,595,000.00
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4,699,067,000.00	4,720,844,660.00	5,759,701,040.00	15,179,612,700.00
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM	2,459,975,000.00	4,783,378,388.00	8,614,143,612.00	15,857,497,000.00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-
23	SETDA	18,859,624,000.00	18,771,485,900.00	1,053,970,100.00	38,685,080,000.00
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	13,814,005,000	3,337,495,000	54,500,000	17,206,000,000.00
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	248,900,000	722,180,000	7,500,000	978,580,000.00
c	SETDA (BAGIAN UMUM)	1,479,044,000	5,968,456,000	342,500,000	7,790,000,000.00
d	SETDA (BAGIAN HUMAS)	833,605,000	3,210,051,000	211,344,000	4,255,000,000.00
e	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	812,000,000	1,177,075,000	16,125,000	2,005,200,000.00
f	SETDA (BAGIAN HUKUM)	676,300,000	401,348,300	17,351,700	1,095,000,000.00
g	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	607,370,000	3,319,129,400	223,800,600	4,150,300,000.00
h	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	388,400,000	635,751,200	180,848,800	1,205,000,000.00
24	SEKRETARIAT DPRD	1,149,093,000.00	35,286,969,000.00	1,486,823,000.00	37,922,885,000.00
25	KECAMATAN REMBANG	1,613,153,000.00	1,602,577,760.00	3,665,131,840.00	6,880,862,600.00
26	KECAMATAN KALIORI	357,030,000.00	371,070,000.00	166,790,000.00	894,890,000.00
27	KECAMATAN SULANG	370,348,000.00	561,891,000.00	211,211,000.00	1,143,450,000.00
28	KECAMATAN SUMBER	234,194,000.00	424,878,500.00	43,500,000.00	702,572,500.00
29	KECAMATAN BULU	375,710,000.00	296,914,000.00	204,800,000.00	877,424,000.00
30	KECAMATAN LASEM	384,352,350.00	476,337,650.00	64,400,000.00	925,090,000.00
31	KECAMATAN PANCUR	346,785,000.00	404,575,000.00	45,000,000.00	796,360,000.00
32	KECAMATAN SLUKE	323,595,000.00	345,830,000.00	138,222,500.00	807,647,500.00
33	KECAMATAN PAMOTAN	324,700,000.00	400,400,000.00	162,000,000.00	887,100,000.00
34	KECAMATAN GUNEM	261,100,000.00	403,760,000.00	60,200,000.00	725,060,000.00
35	KECAMATAN SALE	416,755,000.00	380,410,000.00	102,274,000.00	899,439,000.00
36	KECAMATAN KRAGAN	316,520,000.00	833,781,500.00	507,662,000.00	1,657,963,500.00
37	KECAMATAN SEDAN	397,036,000.00	385,753,000.00	56,600,000.00	839,389,000.00
38	KECAMATAN SARANG	329,420,000.00	658,805,000.00	445,000,000.00	1,433,225,000.00
39	INSPEKTORAT	4,676,995,000.00	2,406,075,000.00	596,400,000.00	7,679,470,000.00
40	BAPPEDA	2,026,684,000.00	5,307,384,340.00	571,913,000.00	7,905,981,340.00
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5,349,712,000.00	6,658,632,486.00	4,649,398,670.00	16,657,743,156.00
a	(SKPD)	5,349,712,000.00	6,658,632,486.00	4,649,398,670.00	16,657,743,156.00
b	(PPKD)				-
42	BKD	1,594,315,000.00	5,996,804,000.00	26,000,000.00	7,617,119,000.00
	JUMLAH	194,066,867,834.00	350,073,316,316.00	235,487,134,205.00	779,627,318,355.00

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG

NO.	SKPD	BERTAMBAH (BERKURANG)			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal	JUMLAH
1	2	11 = 7-3	12 = 8-4	13 = 9-5	14 = 11+12+13
1	DINPENDIKPORA	10,995,439,300.00	34,161,373,010.00	8,382,000,578.00	53,538,812,888.00
2	DINAS KESEHATAN	2,272,800,684.00	(2,138,090,164.00)	8,005,832,250.00	8,140,542,770.00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	(1,216,132,000.00)	3,583,000,392.00	7,562,255,000.00	9,929,123,392.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	(4,400,000.00)	84,711,750.00	18,357,631,650.00	18,437,943,400.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	117,300,000.00	(2,894,533,500.00)	(1,988,156,300.00)	(4,765,389,800.00)
6	SATPOL PP	67,900,000.00	(28,327,900.00)	(1,917,672,100.00)	(1,878,100,000.00)
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	(18,130,000.00)	19,773,000.00	8,665,000.00	10,308,000.00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	14,214,000.00	163,786,000.00	-	178,000,000.00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	(66,005,000.00)	51,805,000.00	14,200,000.00	-
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	(9,650,000.00)	(155,350,000.00)	115,000,000.00	(50,000,000.00)
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	100,280,000.00	(2,168,395,500.00)	660,715,500.00	(1,407,400,000.00)
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	54,051,000.00	803,572,300.00	(242,473,300.00)	615,150,000.00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL	(46,750,000.00)	30,941,000.00	15,809,000.00	-
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	192,067,500.00	951,732,500.00	(41,300,000.00)	1,102,500,000.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	(6,710,000.00)	(62,140,000.00)	(1,256,150,000.00)	(1,325,000,000.00)
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	(79,070,000.00)	(38,463,000.00)	(252,960,000.00)	(370,493,000.00)
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	74,000,000.00	606,000,000.00	2,500,000,000.00	3,180,000,000.00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	(786,200,000.00)	486,400,000.00	236,695,000.00	(63,105,000.00)
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	(39,650,000.00)	(186,310,580.00)	219,965,280.00	(5,995,300.00)
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM	31,075,000.00	951,862,250.00	(55,712,250.00)	927,225,000.00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-
23	SETDA	1,012,305,000.00	4,274,828,010.00	(373,133,010.00)	4,914,000,000.00
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	717,460,000.00	908,040,000.00	54,500,000.00	1,680,000,000.00
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	8,350,000.00	191,650,000.00	-	200,000,000.00
c	SETDA (BAGIAN UMUM)	81,250,000.00	1,475,750,000.00	(870,000,000.00)	687,000,000.00
d	SETDA (BAGIAN HUMAS)	(33,605,000.00)	(118,539,000.00)	162,144,000.00	10,000,000.00
e	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	(16,125,000.00)	-	16,125,000.00	-
f	SETDA (BAGIAN HUKUM)	105,125,000.00	42,525,010.00	2,349,990.00	150,000,000.00
g	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	138,250,000.00	1,731,750,000.00	217,000,000.00	2,087,000,000.00
h	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	11,600,000.00	43,652,000.00	44,748,000.00	100,000,000.00
24	SEKRETARIAT DPRD	(75,880,000.00)	(999,701,000.00)	78,894,000.00	(996,687,000.00)
25	KECAMATAN REMBANG	309,568,000.00	636,987,200.00	1,847,160,800.00	2,793,716,000.00
26	KECAMATAN KALIORI	28,710,000.00	(2,250,000.00)	20,540,000.00	47,000,000.00
27	KECAMATAN SULANG	25,539,000.00	96,250,000.00	5,211,000.00	127,000,000.00
28	KECAMATAN SUMBER	14,150,000.00	9,850,000.00	18,500,000.00	42,500,000.00
29	KECAMATAN BULU	39,600,000.00	2,900,000.00	20,000,000.00	62,500,000.00
30	KECAMATAN LASEM	72,980,000.00	24,120,000.00	(51,600,000.00)	45,500,000.00
31	KECAMATAN PANCUR	12,215,000.00	2,785,000.00	35,000,000.00	50,000,000.00
32	KECAMATAN SLUKE	33,400,000.00	6,100,000.00	-	39,500,000.00
33	KECAMATAN PAMOTAN	(3,900,000.00)	29,400,000.00	20,000,000.00	45,500,000.00
34	KECAMATAN GUNEM	(14,100,000.00)	43,306,440.00	21,293,560.00	50,500,000.00
35	KECAMATAN SALE	49,664,000.00	35,011,000.00	3,000,000.00	87,675,000.00
36	KECAMATAN KRAGAN	(42,525,000.00)	44,900,000.00	23,500,000.00	25,875,000.00
37	KECAMATAN SEDAN	22,150,000.00	57,400,000.00	20,000,000.00	99,550,000.00
38	KECAMATAN SARANG	32,520,000.00	72,455,000.00	(70,000,000.00)	34,975,000.00
39	INSPEKTORAT	737,420,000.00	324,180,000.00	293,400,000.00	1,355,000,000.00
40	BAPPEDA	245,240,000.00	300,228,340.00	(159,487,000.00)	385,981,340.00
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	585,690,000.00	247,440,156.00	(146,500,000.00)	686,630,156.00
a	(SKPD)	585,690,000.00	247,440,156.00	(146,500,000.00)	686,630,156.00
b	(PPKD)	-	-	-	-
42	BKD	23,742,300.00	42,106,500.00	-	65,848,800.00
	JUMLAH	14,754,918,784.00	39,471,643,204.00	41,930,124,658.00	96,156,686,646.00

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG

NO.	SKPD	PEMBAHASAN			
		PERSETUJUAN			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal	JUMLAH
1	2	15	16	17	18 = 15+16+17
1	DINPENDIKPORA	39,545,361,300.00	64,238,303,896.00	49,232,085,542.00	153,015,750,738.00
2	DINAS KESEHATAN	36,771,112,684.00	50,140,748,460.00	13,596,076,226.00	100,507,937,370.00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	44,353,019,000.00	43,033,849,392.00	23,261,951,000.00	110,648,819,392.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3,581,292,000.00	2,379,780,750.00	98,278,035,650.00	104,239,108,400.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1,743,506,000.00	5,809,706,940.00	5,377,336,700.00	12,930,549,640.00
6	SATPOL PP	2,514,534,000.00	1,873,924,100.00	1,194,997,900.00	5,583,456,000.00
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	963,497,000.00	554,316,000.00	24,595,000.00	1,542,408,000.00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	883,530,000.00	1,997,592,100.00	2,330,977,900.00	5,212,100,000.00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	3,800,005,000.00	8,145,084,000.00	884,875,000.00	12,829,964,000.00
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	1,256,940,000.00	2,810,289,360.00	898,840,640.00	4,966,070,000.00
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	2,186,405,000.00	43,783,317,844.00	3,010,121,675.00	48,979,844,519.00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1,980,977,000.00	4,859,139,840.00	1,449,433,160.00	8,289,550,000.00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1,272,955,000.00	1,892,522,000.00	18,309,000.00	3,183,786,000.00
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1,187,882,500.00	4,167,923,500.00	50,000,000.00	5,405,806,000.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	1,700,559,000.00	11,143,791,000.00	2,796,430,000.00	15,640,780,000.00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	690,404,000.00	1,447,389,950.00	3,292,003,050.00	5,429,797,000.00
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	977,825,000.00	3,523,855,000.00	4,216,125,000.00	8,717,805,000.00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	1,758,050,000.00	7,322,745,000.00	1,493,800,000.00	10,574,595,000.00
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4,699,067,000.00	4,720,844,660.00	5,759,701,040.00	15,179,612,700.00
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM	2,459,975,000.00	4,783,378,388.00	8,614,143,612.00	15,857,497,000.00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-
23	SETDA	18,957,074,000.00	18,674,035,900.00	1,053,970,100.00	38,685,080,000.00
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	13,911,455,000	3,240,045,000	54,500,000	17,206,000,000.00
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	248,900,000	722,180,000	7,500,000	978,580,000.00
c	SETDA (BAGIAN UMUM)	1,479,044,000	5,968,456,000	342,500,000	7,790,000,000.00
d	SETDA (BAGIAN HUMAS)	833,605,000	3,210,051,000	211,344,000	4,255,000,000.00
e	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	812,000,000	1,177,075,000	16,125,000	2,005,200,000.00
f	SETDA (BAGIAN HUKUM)	676,300,000	401,348,300	17,351,700	1,095,000,000.00
g	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	607,370,000	3,319,129,400	223,800,600	4,150,300,000.00
h	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	388,400,000	635,751,200	180,848,800	1,205,000,000.00
24	SEKRETARIAT DPRD	1,151,943,000.00	34,927,449,000.00	1,486,823,000.00	37,566,215,000.00
25	KECAMATAN REMBANG	1,613,153,000.00	1,602,223,010.00	3,665,486,590.00	6,880,862,600.00
26	KECAMATAN KALIORI	357,030,000.00	371,070,000.00	166,790,000.00	894,890,000.00
27	KECAMATAN SULANG	370,348,000.00	561,891,000.00	211,211,000.00	1,143,450,000.00
28	KECAMATAN SUMBER	234,194,000.00	424,878,500.00	43,500,000.00	702,572,500.00
29	KECAMATAN BULU	375,710,000.00	296,914,000.00	204,800,000.00	877,424,000.00
30	KECAMATAN LASEM	384,352,350.00	476,337,650.00	64,400,000.00	925,090,000.00
31	KECAMATAN PANCUR	346,785,000.00	404,575,000.00	45,000,000.00	796,360,000.00
32	KECAMATAN SLUKE	323,595,000.00	345,830,000.00	138,222,500.00	807,647,500.00
33	KECAMATAN PAMOTAN	324,700,000.00	400,400,000.00	162,000,000.00	887,100,000.00
34	KECAMATAN GUNEM	261,100,000.00	403,760,000.00	60,200,000.00	725,060,000.00
35	KECAMATAN SALE	416,755,000.00	380,410,000.00	102,274,000.00	899,439,000.00
36	KECAMATAN KRAGAN	316,520,000.00	833,781,500.00	507,662,000.00	1,657,963,500.00
37	KECAMATAN SEDAN	397,036,000.00	385,753,000.00	56,600,000.00	839,389,000.00
38	KECAMATAN SARANG	329,420,000.00	658,805,000.00	445,000,000.00	1,433,225,000.00
39	INSPEKTORAT	4,666,495,000.00	2,416,575,000.00	596,400,000.00	7,679,470,000.00
40	BAPPEDA	2,026,684,000.00	5,307,384,340.00	571,913,000.00	7,905,981,340.00
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5,349,712,000.00	6,658,632,486.00	4,649,398,670.00	16,657,743,156.00
a	(SKPD)	5,349,712,000.00	6,658,632,486.00	4,649,398,670.00	16,657,743,156.00
b	(PPKD)				
42	BKD	1,594,315,000.00	5,996,804,000.00	26,000,000.00	7,617,119,000.00
	JUMLAH	194,123,817,834.00	350,156,011,566.00	240,037,488,955.00	784,317,318,355.00

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG

NO.	SKPD	PEMBAHASAN			
		BERTAMBAH (BERKURANG)			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal	JUMLAH
1	2	19 = 15-3	20 = 16-4	21 = 17-5	22 = 19+20+21
1	DINPENDIKPORA	10,962,589,300.00	34,194,223,010.00	8,332,000,578.00	53,488,812,888.00
2	DINAS KESEHATAN	2,272,800,684.00	(2,131,420,164.00)	8,005,832,250.00	8,147,212,770.00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	(1,216,132,000.00)	3,583,000,392.00	7,562,255,000.00	9,929,123,392.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	(4,400,000.00)	184,711,750.00	22,857,631,650.00	23,037,943,400.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	117,300,000.00	(2,854,533,500.00)	(1,988,156,300.00)	(4,725,389,800.00)
6	SATPOL PP	67,900,000.00	(28,327,900.00)	(1,917,672,100.00)	(1,878,100,000.00)
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	(18,130,000.00)	19,773,000.00	8,665,000.00	10,308,000.00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	14,214,000.00	163,786,000.00	-	178,000,000.00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	(66,005,000.00)	51,805,000.00	14,200,000.00	-
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	(9,650,000.00)	(155,350,000.00)	115,000,000.00	(50,000,000.00)
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	100,280,000.00	(1,818,395,500.00)	660,715,500.00	(1,057,400,000.00)
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	54,051,000.00	803,572,300.00	(142,473,300.00)	715,150,000.00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	(46,750,000.00)	30,941,000.00	15,809,000.00	-
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	192,067,500.00	951,732,500.00	(41,300,000.00)	1,102,500,000.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	(6,710,000.00)	(62,140,000.00)	(1,256,150,000.00)	(1,325,000,000.00)
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	(79,070,000.00)	(38,463,000.00)	(252,960,000.00)	(370,493,000.00)
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	74,000,000.00	606,000,000.00	2,500,000,000.00	3,180,000,000.00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	(786,200,000.00)	486,400,000.00	236,695,000.00	(63,105,000.00)
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	(39,650,000.00)	(186,310,580.00)	219,965,280.00	(5,995,300.00)
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM	31,075,000.00	951,862,250.00	(55,712,250.00)	927,225,000.00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-
23	SETDA	1,109,755,000.00	4,177,378,010.00	(373,133,010.00)	4,914,000,000.00
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	814,910,000.00	810,590,000.00	54,500,000.00	1,680,000,000.00
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	8,350,000.00	191,650,000.00	-	200,000,000.00
c	SETDA (BAGIAN UMUM)	81,250,000.00	1,475,750,000.00	(870,000,000.00)	687,000,000.00
d	SETDA (BAGIAN HUMAS)	(33,605,000.00)	(118,539,000.00)	162,144,000.00	10,000,000.00
e	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	(16,125,000.00)	-	16,125,000.00	-
f	SETDA (BAGIAN HUKUM)	105,125,000.00	42,525,010.00	2,349,990.00	150,000,000.00
g	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	138,250,000.00	1,731,750,000.00	217,000,000.00	2,087,000,000.00
h	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	11,600,000.00	43,652,000.00	44,748,000.00	100,000,000.00
24	SEKRETARIAT DPRD	(73,030,000.00)	(1,359,221,000.00)	78,894,000.00	(1,353,357,000.00)
25	KECAMATAN REMBANG	309,568,000.00	636,632,450.00	1,847,515,550.00	2,793,716,000.00
26	KECAMATAN KALIORI	28,710,000.00	(2,250,000.00)	20,540,000.00	47,000,000.00
27	KECAMATAN SULANG	25,539,000.00	96,250,000.00	5,211,000.00	127,000,000.00
28	KECAMATAN SUMBER	14,150,000.00	9,850,000.00	18,500,000.00	42,500,000.00
29	KECAMATAN BULU	39,600,000.00	2,900,000.00	20,000,000.00	62,500,000.00
30	KECAMATAN LASEM	72,980,000.00	24,120,000.00	(51,600,000.00)	45,500,000.00
31	KECAMATAN PANCUR	12,215,000.00	2,785,000.00	35,000,000.00	50,000,000.00
32	KECAMATAN SLUKE	33,400,000.00	6,100,000.00	-	39,500,000.00
33	KECAMATAN PAMOTAN	(3,900,000.00)	29,400,000.00	20,000,000.00	45,500,000.00
34	KECAMATAN GUNEM	(14,100,000.00)	43,306,440.00	21,293,560.00	50,500,000.00
35	KECAMATAN SALE	49,664,000.00	35,011,000.00	3,000,000.00	87,675,000.00
36	KECAMATAN KRAGAN	(42,525,000.00)	44,900,000.00	23,500,000.00	25,875,000.00
37	KECAMATAN SEDAN	22,150,000.00	57,400,000.00	20,000,000.00	99,550,000.00
38	KECAMATAN SARANG	32,520,000.00	72,455,000.00	(70,000,000.00)	34,975,000.00
39	INSPEKTORAT	726,920,000.00	334,680,000.00	293,400,000.00	1,355,000,000.00
40	BAPPEDA	245,240,000.00	300,228,340.00	(159,487,000.00)	385,981,340.00
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	585,690,000.00	247,440,156.00	(146,500,000.00)	686,630,156.00
a	(SKPD)	585,690,000.00	247,440,156.00	(146,500,000.00)	686,630,156.00
b	(PPKD)	-	-	-	-
42	BKD	23,742,300.00	42,106,500.00	-	65,848,800.00
	JUMLAH	14,811,868,784.00	39,554,338,454.00	46,480,479,408.00	100,846,686,646.00

V. PENUTUP

Demikian Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dalam Persetujuan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

Rembang, 6 Agustus 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

BADAN ANGGARAN

Wakil Ketua,

ttd

H. GUNASIH, S. E.

Sekretaris,

ttd

Drs. DRUPODO, M. Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19670421 199303 1 009

Sesuai dengan aslinya
Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang



Drs. DRUPODO, M. Si.

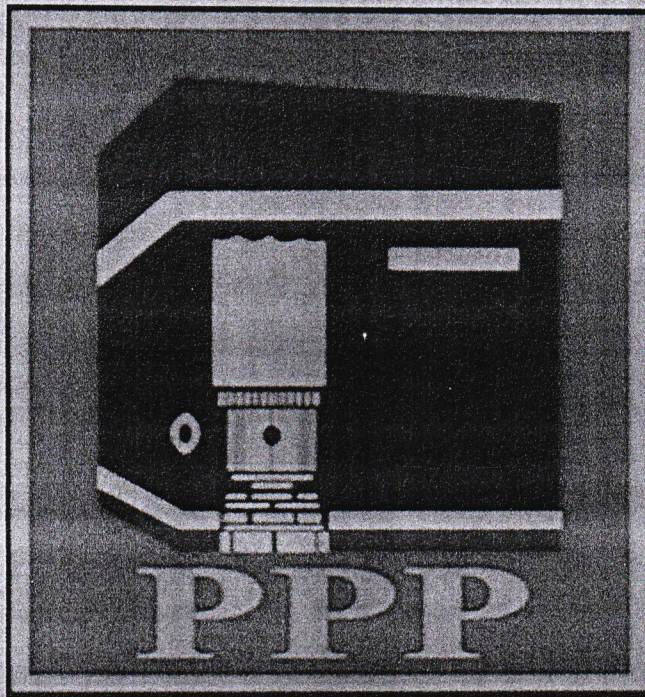
Pembina Utama Muda
NIP. 19670421 199303 1 009

PENDAPAT AKHIR

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBAGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

TERHADAP

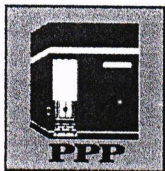
**RAPERDA TENTANG PERUBAHAN APBDKABUPATEN REMBANG
TAHUNANGGARAN 2019**



**DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN REMBANG
Hari: Selasa, 06 Agustus 2019
Dibacakan : Moch Anshori, SH.**

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212 Rembang



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212

REMBANG

PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

RAPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG

TAHUN ANGGARAN 2019

Selasa , 06 Agustus 2019

Dibacakan oleh : MOCH ANSHORI, SH.

Assalamu a,laikum Warohmatullahi wabarokatuh....

Selamat siang , dan Salam sejahtera bagi kita semua

Bismillah., Alhamdulillah., Assholatu Wassalamu a'la Rosulilla., Laahaula walaa quwwata illabillah..., Amma ba'da.....

Yang kami hormati :

=> Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang.

=> Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang.

- => Sdr. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang.
- => sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda, dan para Camat dilingkungan Kabupaten Rembang.
- => Sdr. Sekretaris Dewan beserta staf . Dan..
- => Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan, serta semua hadirin yang berbahagia.

Sebelum kami lanjutkan , terlebih dahulu marilah kita, selalu memanjatkan puji dan syukur kepada ALLAH SWT, atas semua limpahan Rohmat dan NikmatNYA , yang dikaruniakan pada kita , sehingga sampai saat ini, kita masih diberi kesempatan hadir dalam Rapat Paripurna ini , dalam keadaan sehat Wal afiat .

Sholawat dan salam, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita MUHAMMAD SAW .

INNALILAIHI WA INNA ILAIHI ROJIUN..., dengan mendadak bagaikan tersambar petir, kami keluarga besar Partai Persatuan Pembangunan Berdukacita , yang sangat amat mendalam, atas Wafat beliau Ulama Besar Sesepeuh kita, Simbah KH. MAEMOEN ZUBER , Semoga Kapundut Beliau chusnul khotimah.., Utnuk beliau , mohon berkenan membacakan Surat fatehah..., ala hadzihinniyah Al-Fatehah...

Pada kesempatan yang baik ini , Kami dari Fraksi Partai Persatuan menyampaikan Selamat Menyongsong “ HUT Kemerekaan RI yang ke 74 “ Semoga ke depan Indonesia lebih Sukses dan Tambah Jaya. Dan kami juga menyampaikan ucapan selamat menunaikan ibadah haji dan ikut mendoakan , kepada para Jama’ah Haji , khususnya para Jama’ah dari Rembang , Semoga selalu diberikan kesehatan, dan kelancaran, serta kemudahan dalam menjalankan ibadahnya , dan semoga mendapatkan predikat Haji Mabrur Mabruroh..., Amiin.

Sdr. Bupati dan wakil Bupati, serta segenap Sidang Dewan yang kami Hormati...,

Mengawali penyampaian Pendapat akhir kami , terhadap Rancangan Perda , tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang tahun 2019.

Setelah mendengarkan jawaban dan penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan oleh sdr. Wakil Bupati , dalam rapat paripurna ke I , pada hari Jum'at yang lalu , tanggal 02 Agustus 2019 , terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi , dan selanjutnya dilakukan Penjelasan dan Pendalaman serta pembahasan oleh TAPD, dilanjutkan Rapat Banggar bersama Pimpinan-pimpinan Komisi , dan Rapat Banggar bersama TAPD , Alhamdulillah semua dapat berjalan lancar, meskipun mengalami beberapa kali scores dan sampai larut malam, namun ahirnya dapat diselesaikan sesuai jadwal waktu yang direncanakan .

Sidang Dewan yang kami hormati.....,

Setelah kami melakukan kajian dan telaah yang cukup mendalam, dari hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, tentang Perubahan APBD tahun 2019 ini , kami dari Fraksi Partai persatuan Pembangunan , ***Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrochiim menerima dan menyetujui , RAPERDA*** Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 ini , menjadi ***PERDA*** Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 , dengan segala perubahan dan pergeseran yang ada , di dalam pembahasannya.

Di dalam Pendapat akhir ini , Kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan , menyampaikan beberapa catatan , sebagai usulan dan masukan , antara lain sebagai berikut :

1. Mengingat sisa waktu efektif untuk pelaksanaan APBD tahun 2019 , yang tinggal 105 hari , dan masih adanya beberapa sarana infra struktur Jalan yang masih rusak parah , antara lain di jalan poros Lingkar kota Rembang , sarana jalan poros di wilayah Kecamatan Sale , dan juga di wilayah kecamatan yang lain. Sehubungan dengan hal tersebut, kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan , minta dan mendorong , agar Pemkab Rembang meningkatkan kinerjanya, dengan bekerja lebih keras, supaya benar-benar dapat menyelesaikan kegiatan yang telah direncanakan , sehingga tidak terjadi Silpa yang besar.
2. Terkait dengan upah pekerja THL di lingkungan Pemkab Rembang , yang menurut laporan masih ada yang belum dapat terbayarkan , kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mohon , agar penganggaran kebutuhan untuk bayar upah tenaga THL tersebut , dapat terbayarkan sesuai dengan anggaran APBD perubahan tahun 2019 ini.

3. Berkaitan dengan Rencana Pelaksanaan Pilkades serentak di lingkungan Pemkab Rembang , sebanyak 237 desa di ahir tahun 2019 ini , kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan minta , supaya Pemkab Rembang segera melakukan langkah-langkah strategi dan antisipasi serta fasilitasi , untuk kebutuhan persiapan pelaksanaan Pilkades serentak dimaksud , terkait dengan Sosialisasi , koordinasi dan keamanan , agar pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar dan baik , sehingga hasilnya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat luas .

Demikian Pendapat akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 ini , Semoga kita semua selalu diberi hidayah dan kemudahan, sehingga apa yang kita lakukan dapat berhasil dan bermanfaat, untuk Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rembang tercinta.

Trima kasih atas segala perhatian, dan mohon maaf atas segala kekurannya.....

Wallahul Muwaffiq Illaa aqwamitthoorik

Wassalamu a'laikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.....

Rembang , 06 Agustus 2019

PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA

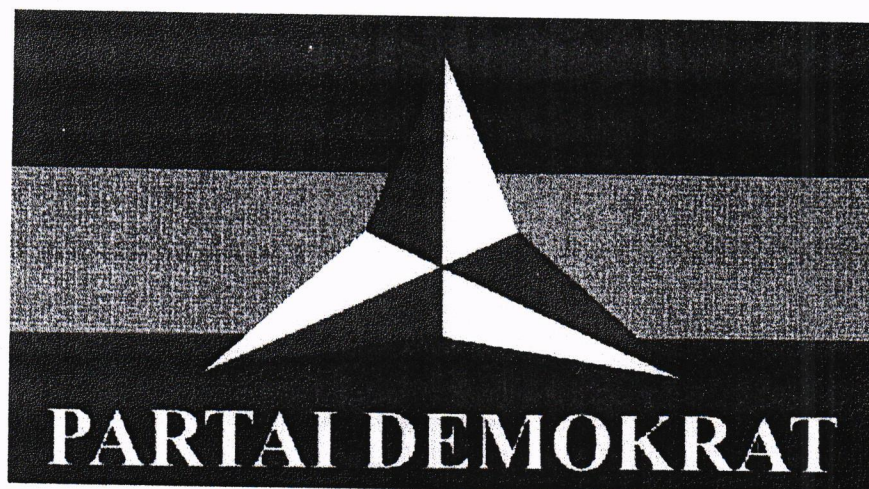


SUGIHARTO

SEKRETARIS

ZAIMUL UMAM NS

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI DEMOKRAT
ATAS
HASIL PEMBAHASAN RAPERDA
TENTANG
PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2019**



**FRAKSI DEMOKRAT
DPRD KABUPATEN REMBANG**

**Rembang, 6 AGUSTUS 2019
Dibacakan oleh : EKA SISWA KARTIKA**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
FRAKSI DEMOKRAT
Jl. Diponegoro No. 88 Rembang
Telp. (0295) 691194

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI DEMOKRAT
ATAS
HASIL PEMBAHASAN RAPERDA
TENTANG
PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

SELASA, 6 AGUSTUS 2019

Dibacakan oleh : EKA SISWA KARTIKA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua ;

Yang kami hormati :

1. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang
2. Saudara Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang
3. FORKOPIMDA Kabupaten Rembang
4. Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
5. Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian SETDA dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
6. Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang beserta Staff
7. Saudara Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan dan Segenap hadirin yang berbahagia

Sebelumnya marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan hidayahNya kita semua masih diberi kesehatan, keselamatan lahir maupun batin sehingga kita dapat mengikuti rapat paripurna dalam rangka penetapan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 menjadi Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dengan baik.

Mengawali pendapat akhir fraksi ini kami Fraksi Demokrat mengucapkan innalillahi wa innailaihi rojiun dan mengajak hadirin semuanya menundukkan kepala seraya berdoa dimana pada hari ini Kyai Besar kita Syaikhina Maimoen Zubair telah berpulang ke Rahmatullah, semoga khusnul khotimah, Alfatihah.....

Sidang Dewan dan Hadirin yang Terhormat,

Syukur alhamdulillah tahapan demi tahapan pembahasan mulai awal sampai selesai berjalan dengan lancar.

Kami Fraksi Demokrat memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada Anggota Badan Anggaran dimana dalam menyelesaikan Raperda ini tidak mengenal waktu sampai tengah malam.

Dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohiim kami Fraksi Demokrat **menyetujui** Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 menjadi PERDA Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Dengan penyampaian pendapat akhir Fraksi Demokrat ini, Kami kembali memberikan beberapa saran, pendapat, dan masukan demi kebaikan Kabupaten Rembang yang kita cintai ini, antara lain :

1. Agar Pemerintah Daerah dalam merencanakan kegiatan harus merujuk pada Perda RPJMD, contoh..dalam hal infrastruktur jalan tanpa lubang agar diimbangi dengan anggaran yang sesuai perencanaan atau lebih di prioritaskan dalam budget anggarannya. tahun ini seharusnya untuk meningkatkan perekonomian usaha-usaha kecil dan pemberdayaan masyarakat harusnya bisa diselesaikan tetapi karena melihat anggaran yg minim sekali kemungkinan untuk tahun ini belum bisa terselesaikan.

2. Kami mengharap kedepan dengan postur anggaran APBD Kabupaten Rembang yg sudah masuk di level kurang lebih 1,9 T ini...agar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah harus lebih cermat dan tepat dalam hal perencanaan kegiatan di APBD tersebut.
3. Dan kami fraksi demokrat mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para Kades yang purna tugas kami belum bisa memberikan uang pengabdian/purna tugas. dengan beberapa alasan yg salah satunya alasan kami yg paling dominan yaitu regulasinya belum ada, sehingga kami belum berani untuk menyetujui anggaran tersebut.

Sidang Dewan dan Hadirin yang Terhormat,

Demikianlah pendapat akhir Fraksi Demokrat ini kami sampaikan, akhirnya kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati, Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta segenap tamu undangan, Kami ucapkan terima kasih telah mengikuti dengan seksama penyampaian ini, Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf

Billahi Taufik Wal Hidayah

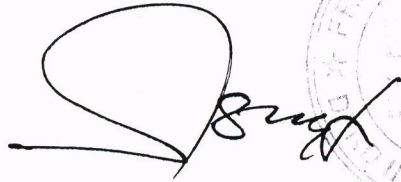
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 6 Agustus 2019

**FRAKSI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA

SEKRETARIS



EKA SISWA KARTIKA

IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E., M.H.



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

TENTANG

**PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN
2019**

Assalamu 'alaikumwrwb.

Yang kami Hormati, Bupati dan Wakil Bupati Rembang beserta jajarannya di lingkungan Pemkab Rembang

Yang kami Hormati, Pimpinan Sidang, Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang, beserta segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Yang Kami Hormati, segenap jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang.

Yang kami Hormati, Saudara Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD kabupaten Rembang beserta jajarannya.

Hadirin – Hadirat yang Kami Mulyakan.

Bismillahirrohmanirrohim,

Mengawali pendapat Akhir ini perkenankanlah kami Fraksi PKB menyampaikan selamat kepada jamaah haji Rembang Khususnya Indonesia umumnya yang sebentar lagi akan berjuang bersusah payah melawan dan menahan terik dan panasnya matahari yaitu wukuf di padang Arafah yang menjadi puncaknya ritme atau Rukun Haji semoga mereka semua senantiasa di beri kesehatan, kekuatan dan kelancaran hingga bisa pulang ke Tanah air dengan Predikat haji Mabrur. Amin.....

Dalam Pendapat Akhir ini, Proses Pembahasan KUA PPAS Sampai pada Rancangan APBD Perubahan telah selesai di bahas bersama, sesuai tahapan dan mekanisme yang ada, sehingga bisa selesai sesuai Perintah dan Pedoman Permendagri 2018.

Kami Fraksi PKB sangat Gembira sekali atas Prestasi Pemerintah atau TAPD dan Badan Anggaran yang telah sepakat Pos Anggaran untuk tali Asih atau Purna Bakti untuk para Kades yang sudah dan hampir habis masa baktinya, karena memang di Pastikan tidak ada Dasar Hukum yang Pasti.

Di lain sisi.

Badan Anggaran ternyata lebih cermat bahwa angka 4,7 Milyar memang lebih Efektif dan Bermanfaat untuk Belanja Publik.

Dengan demikian Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang (Pemerintah Kabupaten dan DPRDnya) lebih Aspiratif lebih mengerti dengan apa yang di Kehendaki Masyarakat bawah.

Hadirin Sidang yang Kami Hormati

Pada Hakekatnya Rakyat kita telah dan selalu berharap agar APBD ini di kelola dan di dimanfaatkan untuk rakyat, bukan di kelola dan di dimanfaatkan untuk belanja Konsumsi habis.

DemikianlahPendapatAkhir FPKB yang tidak perlu memberikan catatan –catatan, kami menyetujui Raperda APBD Perubahan ini segera di Tetapkan menjadi Perda.

Akhirnya sebagai penutup, kami ingin katakan

Tak ada gading yang tak retak

Tak ada kaca yang tak pecah

Begitu juga tidak ada kata yang tak salah

Mohon maaf kepada semuanya, Masyarakat, Publik dan Hadirin Hadirot yang hadir di Sidang Paripurna ini.

Walla hul muwafiq

Illa aqwamitthariq

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

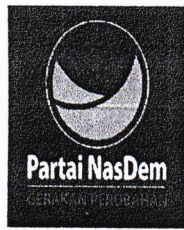
Rembang, 06 Agustus 2019
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

Ketua

Muhammad Imron

Sekretaris

Ilyas



FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

PENDAPAT FRAKSI

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nasional Demokrat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang

Terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019

Hari / Tanggal : Selasa / 06 Agustus 2019

Dibacakan oleh :

Assalamu' alaikum Wr, Wb

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Merdeka.....Merdeka.....Merdeka....!!!

Yang terhormat, Sdr Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kab. Rembang

Yang terhormat, Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA)

Kab. Rembang

Yang Terhormat, Staf Ahli, Asisten Bupati, Semua Kabag di lingkungan Setda Rembang

Yang terhormat, Ka Dinas, Ka Badan , Ka Kantor dan Camat se- Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Sekretaris DPRD Kab. Rembang, Kabag beserta jajarannya.

Lsm, Rekan Wartawan, Ormas dan semua pihak yang telah hadir pada hari ini yang kami hormati

Hadirin Sidang Paripurna Yang Kami Muliakan,

Pada kesempatan yang baik ini marilah kita mengucapkan Alhamdulillah puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas izin dan nikmatNya lah kita pada hari ini diberikan kesempatan menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang tentang penyampaian Pendapat Fraksi menanggapi Atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 , selanjutnya tak lupa Sholawat beriring salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang kita tunggu syafaatnya di Yaumul Akhir nanti.

Hadirin Sidang Paripurna yang Kami Muliakan,

Sebelum menanggapi atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019, yang pertama seperti kita ketahui bersama, pada tanggal 17 Agustus nanti Bangsa Indonesia akan memperingati hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 74, kita berharap hal ini dapat menambah semangat nasionalisme, patriotis, bangga akan Bangsa sendiri, serta cinta tanah air dalam diri kita masing-masing. Karenannya marilah bersama-sama kita berjuang demi Bangsa dan Negara dengan segenap jiwa dan raga dengan semangat kerja keras, semangat persatuan, dan semangat membangun Indonesia menuju Bangsa yang lebih baik kedepannya. Aamiin.

Yang kedua Fraksi PDI Perjuangan Nasdem Mengucapkan Innalillahi wainnalillahi roji'un Turut Berbelasungkawa atas meninggalnya KH. Maimoen Zubair, semoga beliau Husnul Khotimah, diampuni segala dosa-dosa nya dan Keluarga yang ditinggalkan selalu diberikan kekuatan dan ketabahan. Aamiin.

Selanjutnya, menanggapi atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019. Kami dari Fraksi PDI Perjuangan Nasdem menerima dan menyetujui Raperda tersebut untuk selanjutnya dijadikan Perda, dengan catatan-catatan sebagai berikut :

1. Kami menilai pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD ditahun ini kurang cukup waktu, sehingga pembahasannya terkesan tergesa-gesa. Kami berharap pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD dimasa yang akan datang dapat lebih dipersiapkan secara matang, sehingga akan menghasilkan Perda Perubahan APBD yang optimal.
2. Kami harapkan agar Pemerintah Kabupaten Rembang segera menjalankan kegiatan-kegiatan yang tertunda di awal tahun 2019, karena mengingat waktu yang tersisa hanya tinggal 4 (Empat) Bulan lagi, maka OPD (Organisasi Perangkat Daerah) harus berkerja secara maksimal untuk mencapai target kegiatan yang direncanakan sebelumnya.

Hadirin Sidang Paripurna yang Kami Muliakan,

Semoga dengan ditetapkannya Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019, pembangunan di Kabupaten Rembang ini selanjutnya bisa menjadi lebih baik lagi. Aamiin.

Demikian telah kami sampaikan Pendapat Fraksi PDI Perjuangan Nasdem, atas hasil Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan, bila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan kami menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya

Wabillahi taufiq wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr, Wb,

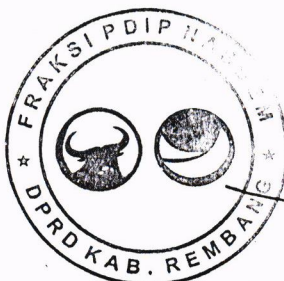
Merdeka....Merdeka....Merdeka....

FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua

Jasmani

WIDRIH
WIDODO



Sekretaris

Ali Ircham, ST

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
DPRD KABUPATEN REMBANG**

ATAS

**RAPERDA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PERUBAHAN (APBD-P) KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019**



REMBANG, 6 Agustus 2019

Pendapat Akhir
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN dan BELANJA DAERAH PERUBAHAN
(APBD-P) KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019

Disampaikan oleh H.Chasanuddin
Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Selasa 6 Agustus 2019

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Salam Indonesia Raya.....

Yang terhormat Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan;

Yang kami hormati Sdr. Para Anggota Forkompimda dan Ketua Pengadilan Negeri

Yang kami hormati Sdr. Para Komandan / Kepala Kesatuan TNI-POLRI

Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Daerah dan Para Pejabat dilingkungan Pemkab. Rembang Serta Para Camat Se- Kabupaten Rembang;

Yang Kami hormati Sdr. Para Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan Ormas, Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia.

Mengawali penyampaian pendapat akhir fraksi, dalam kesempatan ini tidak lupa kami mengajak kepada kita semua untuk bersyukur kepada ILLAHI ROBBI atas segala karunia dan nikmat NYA yang tiada henti. Sholawat dan salam teruntuk Baginda Nabi Muhammad SAW segenap para nabi dan rasul ILLAHI.

Hadirin sidang paripurna yang kami Hormati,

Setelah melalui berbagai tahapan dalam pembahasan Rancangan APBD-P Kabupaten Rembang Tahun 2019, dalam Rapat Banggar, Rapat Fraksi, serta masukan – masukan Komisi – komisi terkait.

maka Kami sampaikan catatan penting sebagai berikut :

- Pemkab Rembang perlu memiliki Produk hukum yang berupa PERDA yang mengatur tentang Dana bagi hasil untuk tambahan tunjangan dan Penghasilan tetap Kades dan perangkat Desa , sehingga ada payung hukum yang jelas yang bisa digunakan sebagai pedoman atau dasar dalam setiap penganggaran kegiatan.

- Pemkab Rembang harus bergerak cepat terhadap penyerapan anggaran Belanja Publik yaitu anggaran untuk infrastruktur sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan oleh masyarakat Rembang.
- Pemkab Rembang harus mengkaji kembali keberadaan PT.Rembang Migas Energi (RME) karena dengan penyertaan modal sebesar 2 Miyard hingga saat ini Pemda Rembang belum mendapatkan keuntungan sama sekali yaitu adanya Defiden bagi Pemkab Rembang apalagi Progres Report dari PT.RME cenderung tidak jelas dan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya PT.RME di Kab.Rembang.
- Masih tingginya Anggaran Bium untuk pelaksanaan kegiatan di OPD – OPD sehingga banyak kegiatan pembangunan Infrastruktur khususnya kegiatan – kegiatan Penunjukan Langsung (PL) nilainya menjadi turun jauh dari Pagu Limitatif kegiatan tersebut , sehingga kemanfaatannya menjadi tidak maksimal dan berkurang oleh karena itu Pemkab Rembang perlu membuat regulasi yang mengatur tentang Standardisasi batas minimum dan maksimum penganggaran Bium.

Demikian pendapat akhir kami, dengan mengucapkan ***Bismillahirrohmanirrohim***, kami menerima Raperda tentang APBD-Perubahan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 untuk ditetapkan menjadi Perda. Atas segala kekurangan kami sampaikan permohonan maaf dan terima kasih. Semoga Allah SWT selalu menunjukan jalan yang benar dan terbaik bagi kita semua. *Amiin..Amiin ya Robbal Alamin*

Billahitaufiq wal hidaayah,

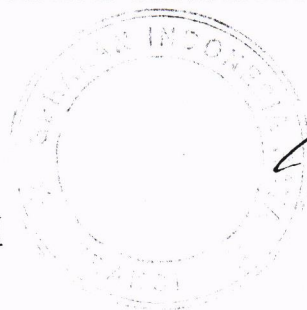
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 6 Agustus 2019

FRAKSI PARTAI GERINDRA DPRD REMBANG

H. CHASANNUDIN

Wakil Ketua



PUJI SANTOSO, SP. MH.

Sekretaris



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Sekretariat Jl. Diponegoro No 88 Rembang - Telp (0295) 693290



**PENDAPAT FRAKSI KARYA SEJAHTERA
DPRD KABUPATEN REMBANG**

atas

**HASIL PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
tentang**

PERUBAHAN

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2019**

Disampaikan dalam Rapat Paripurna
DPRD Kabupaten Rembang
Hari Sabtu, 6 Agustus 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yang terhormat Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang.
- Yang terhormat Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang.
- Yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang.
- Yang terhormat Sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekda, Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
- Yang terhormat para hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.

Mengawali penyampaian pendapat fraksi kali ini, kami mengajak hadirin memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, keselamatan, rahmah dan berkah kepada kita. *Ing kalodhangan menika ugi, kawula bregada Fraksi Karya Sejahtera DPRD Kabupaten Rembang ngaturaken bela sungkawa atas kapundhutipun panjenengan dalem Bapak KH Maemoen Zubair (Mbah Moen), mugia katampi ing swarganipun Gusti Alloh ingkan Maha Kuwaos.*

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Setelah melalui pendalaman, sinkronisasi dan koordinasi Raperda Perubahan APBD TA 2019 antara Banggar DPRD bersama TAPD, maka kini saatnya kami menyampaikan pendapat Fraksi Karya Sejahtera terhadap pembahasan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Rembang TA 2019 sbb.

1. Bahwa sampai bulan Agustus ini serapan anggaran belanja langsung atau belanja pembangunan pada APBD Induk 2019 baru mencapai 30-an % sementara belanja tak langsung (belanja pegawai dll) sudah terserap lebih dari 50 %, hal ini menunjukkan

kinerja eksekutif tidak optimal. Untuk mengatasi hal ini Saudara Bupati harus segera melangkah mengejar ketertinggalan ini.

2. Rencana Pendapatan APBD Perubahan TA 2019 harus dioptimalkan pemenuhan targetnya, mengingat PAD TA 2018 tidak terpenuhi 100 %. Jika hal ini terulang, maka akan mempengaruhi kegiatan yang sudah dianggarkan pada TA berkenaan.
3. Mengenai APBD Perubahan yang sebentar lagi kita putuskan, Saudara Bupati harus segera mengeluarkan Perbup tentang Penjabaran APBD Perubahan dan segera dilaksanakan sehingga bisa terserap 100 % pada akhir TA berkenaan. Seluruh jajaran Pemkab Rembang bekerja keras seperti Bandung Bondowoso untuk memenuhi permintaan Roro Jonggrang mewujudkan Candi Sewu dalam waktu semalam, agar tidak terjadi SILPA (siswa lebih pembiayaan anggaran) yang membengkak.
4. Mengenai PT RME (Rembang Migas Energi) kami menengarai adanya perbedaan informasi antara Pemerintah Kabupaten Rembang dengan manajemen PT RME mengenai dana Rp 2 milyar yang dikucurkan dari APBD Kabupaten Rembang. Manajemen RME, pada tanggal 15 April 2019 menjelaskan bahwa Kementerian ESDM sudah menyetujui rencana operasional lapangan migas Randugunting, sementara Kabag Perekonomian Setda Kabupaten Rembang menyatakan bahwa rencana tsb. masih menunggu petunjuk dari Kementerian ESDM. Jadi dana Rp 2 milyar tersebut belum jelas arah penggunaannya, hanya sekedar mendapatkan sertifikat. Dalam kesempatan ini kami minta kepada Saudara Bupati untuk mendorong direktur PT RME supaya segera melaksanakan tugas perseroan, sesuai janji pada waktu akan didirikan.
5. Sekali lagi tentang PT RBSJ yang hingga saat ini belum memberikan deviden kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang. Untuk itu kami berharap Saudara Bupati memperhatikan hal ini.

6. Sudah sekian lama lalu lintas diseputar Pasar Rembang Kota semrawut tak terkendali yang menyebabkan kegiatan pasar terganggu. Mohon tindakan nyata untuk mengatasi kesemrawutan lingkungan Pasar Kota Rembang tsb.

Pimpinan rapat saha para rawuh ingkang kinurmat.

Kanthi pangajab "DURGA MENDHAK KALA SIRNA" Fraksi Karya Sejahtera nayogyani RAPERDA menika dipun kukuhaken minangka PERDA Perubahan APBD Kadipaten Rembang TA 2019.

Mbok bilih wonten atur ingkang kirang nuju prana, kawula nyuwun gunging samodra pangaksami. Mugi-mugi Sang Hyang Widhi tansah paring daya kekiatan saha pitulungan dhumateng kita lumeber brayat ageng Kadipaten Rembang ndalem ngayahi jejibahan memangun kemajengan saengga Kadipaten Rembang mujudaken kadipaten ingkang kuncara hanjayeng bawono.

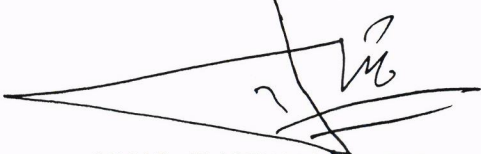
Rahayu ingkang samya pinanggih - Wassalamu'alaikum wa rohmatullohi wa barokaatuh.

**DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSI KARYA SEJAHTERA**

Ketua,


H. ISMARI

Sekretaris,


JOKO SUPRIHADI, SH



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI HARAPAN

Sekretariat: Jl. Diponegoro No.88 Rembang



**PENDAPAT FRAKSI HARAPAN
DPRD KABUPATEN REMBANG**

atas

Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019

Disampaikan dalam Rapat Paripurna
DPRD Kabupaten Rembang
Hari Selasa tgl. 6 Agustus 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yang kami hormati Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekda, Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian Setda dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
- Yang kami hormati Saudara Hadirin sekalian

Mengawali penyampaian Pemandangan Umum Fraksi kali ini, perkenankanlah kami memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, rahmah dan berkah kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam suasana yang berbahagia ini. Pada kesempatan ini kami segenap keluarga Fraksi Harapan (Hanura dan PAN) turut berduka cita atas meninggalnya Bapak KH Maemoen Zubair (Mbah Moen), semoga arwah beliau diterima disisi Alloh SWT Dan ditempatkan di sorga-Nya

Rapat dewan dan hadirin yang terhormat.

Setelah melalui pendalaman, sinkronisasi dan koordinasi Raperda Perubahan APBD TA 2019 antara Banggar DPRD bersama TAPD, maka kini saatnya kami menyampaikan pendapat Fraksi Harapan terhadap pembahasan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Rembang TA 2019 sbb.

- Kami menghargai tekad Pemerintah Kabupaten Rembang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 6,42 %, dalam APBD Perubahan ini. Kepada OPD pemungut PAD, kami berharap hendaknya bekerja lebih keras agar bisa mencapai target yang ditetapkan, tanpa memberatkan masyarakat.

- Sampai bulan Agustus ini penyerapan APBD 2018 oleh OPD, baru mencapai 30-an %. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Rembang belum bekerja secara maksimal untuk melayani masyarakat. Apalagi dengan bertambahnya anggaran melalui APBD Perubahan ini hendaknya pemerintah bekerja cepat, namun tetap berhati-hati dalam membelanjakan uang rakyat, digunakan sesuai peruntukannya agar tidak terjadi pemborosan atau mengambil untung demi kepentingan pribadi.

Rapat dewan dan hadirin yang terhormat.

Secara keseluruhan kami bisa menyetujui RAPERDA ini ditetapkan sebagai PERDA Perubahan APBD Kabupaten Rembang TA 2019, dengan saran agar dilaksanakan sebaik-baiknya dan jangan sampai terjadi SILPA (sisa lebih pembiayaan anggaran) yang membengkak.

Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan pada hadirin sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberi rohmah dan berkah kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSI HARAPAN

Ketua,

Sekretaris,

SUKARMAN

SAHNINGSIH, SE



BUPATI REMBANG

**SAMBUTAN BUPATI REMBANG
PADA RAPAT PARIPURNA
PERSETUJUAN RAPERDA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019**
Rembang, 6 Agustus 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Ykh. - Ketua DPRD Kabupaten Rembang ;
- Ykh. - Para Ketua Komisi dan Anggota DPRD
Kabupaten Rembang ;
- Ykh. - Wakil Bupati Rembang ;
- Ykh. - Rekan-Rekan Forkopimda Kab. Rembang ;
- Ykh. - Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten dan
Kabag. di Lingkungan Setda Kabupaten
Rembang ;
- Ykh. - Kepala OPD se-Kab. Rembang ;
- Ykh. - Para Camat dan Hadirin sekalian yang
berbahagia.

Mengawali pertemuan kali ini perkenankanlah saya mengajak hadirin sekalian untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan Rahmat dan Ridho-Nya-lah kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam rangka ***Persetujuan Raperda Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019***, dalam keadaan sehat wal'fiat.

Sebelum melanjutkan sambutan, saya mengucapkan Innalillahi wa innalillaihi rojiun. Kita semua berduka dan sangat kehilangan atas meninggalnya ulama besar, tokoh nasional, salah seorang putra terbaik bangsa, guru kita, sesepuh kita, Simbah Kyai Haji Maimun Zuber. InsyaAllah beliau Husnul Khotimah. Saya atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Rembang turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Untuk itu, marilah kita bersama-sama membaca Al Fatehah yang ganjarannya kita hadiahkan kepada Almarhum Simbah Kyai Haji Maimun Zubair. Al Fatehah.

Kami sampaikan **“terima kasih”** kepada semua pihak, terutama jajaran legislatif yang telah mendukung dan mencurahkan perhatian dengan semangat yang tinggi membahas hingga selesainya proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 sehingga berjalan lancar dan tepat waktu.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Pembahasan Raperda perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 yang diselenggarakan bertujuan untuk mengantisipasi perubahan program dan kegiatan baru daerah yang tentunya mempengaruhi belanja daerah, selain hal tersebut guna mempercepat program-program pembangunan yang mendesak untuk segera dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menikmati program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 ini, pada setiap program yang akan dilaksanakan nantinya dapat memberikan *output* dan *outcome* dengan kuantitas dan kualitas yang terencana dan terukur. Hal ini merupakan implementasi dari fungsi perencanaan, fungsi koordinasi dan motivasi serta fungsi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan strategi kinerja Pemerintah Daerah sebagai bentuk manajemen koordinasi yang baik.

Dengan demikian melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 ini diupayakan seoptimal mungkin untuk dapat menampung aspirasi berbagai program dan kegiatan yang berkembang di masyarakat. Sehingga dengan perubahan anggaran ini diharapkan dapat menyempurnakan program atau kegiatan yang sudah berjalan maupun yang belum teranggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2019, baik kegiatan yang bersifat keharusan dan instruksional, serta dapat mempercepat pencapaian tahapan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Rembang.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, kita bersama telah melaksanakan koordinasi dan pembahasan yang sistematis dan terencana baik pada tingkat komisi maupun Badan Anggaran, dalam rangka untuk menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap setiap perencanaan pemerintahan dan pembangunan yang dituangkan dalam program dan kegiatan, serta besaran Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Peraturan daerah ini akan menjadi pedoman dan rujukan kebijakan kita pada tahun 2019 dalam melaksanakan aktivitas pemerintah dan pembangunan Kabupaten Rembang diberbagai sektor. Untuk itu, saya tetap optimis bahwa kebijakan anggaran yang telah disepakati bersama antara DPRD dan pemerintah daerah dapat kita manfaatkan secara efektif untuk memacu pembangunan dan pertumbuhan perekonomian

demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang yang kita cintai ini.

Adapun Rancangan Anggaran Pendapatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1.862.109.419.071,- (*Satu triliun delapan ratus enam puluh dua milyar seratus Sembilan juta Empat ratus sembilan belas ribu tujuh puluh satu rupiah*), mengalami peningkatan sebesar 4,31% dari APBD Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp. 1.785.139.506.071,- (*Satu triliun tujuh ratus delapan puluh lima milyar seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enam ribu tujuh puluh satu rupiah*), maka terdapat kenaikan sebesar Rp.76.969.913.000,- (*Tujuh puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah*).

Selanjutnya untuk Rancangan Anggaran Belanja pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.1.930.933.681.611,19 (*Satu triliun sembilan ratus tiga puluh miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sebelas koma sembilan belas rupiah*) mengalami peningkatan sebesar

5,65%, dibanding anggaran belanja APBD
Tahun Anggaran 2019 sebesar
Rp. Rp.1.827.508.350.914,- (*Satu triliun delapan
ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus delapan juta
tiga ratus lima puluh ribu sembilan ratus empat
belas rupiah*), maka terjadi kenaikan sebesar Rp.
103.425.330.697,19 (*Seratus tiga milyar empat
ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu
enam ratus sembilan puluh tujuh koma sembilan
belas rupiah*).

Pada Rancangan Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2019 terdapat defisit sebesar
Rp.68.824.262.540,- (*Enam puluh delapan milyar
delapan ratus dua puluh empat juta dua ratus
enam puluh dua ribu lima ratus empat puluh rupiah*
), yang akan ditutup melalui pembiayaan daerah
sebesar Rp68.824.262.540,- (*Enam puluh delapan
milyar delapan ratus dua puluh empat juta dua
ratus enam puluh dua ribu lima ratus empat puluh
rupiah*), sehingga pada Rancangan Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2019 menjadi balance.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

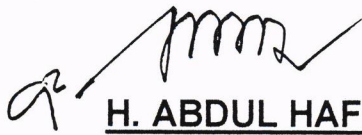
Melalui rapat Paripurna ini pula, sekali lagi saya atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang mengucapkan **terima kasih** kepada saudara Pimpinan dan segenap Anggota Dewan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, serta seluruh Pimpinan OPD beserta staf yang telah bekerja keras dalam menyelesaikan penyusunan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 ini.

Berbagai masukan, saran, dan kritik konstruktif yang disampaikan Badan Anggaran maupun lintas Komisi DPRD semoga dapat digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan tugas-tugas Pemerintah daerah, utamanya dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Rembang.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam Rapat Paripurna Persetujuan Penetapan Raperda Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita dalam membangun daerah dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Rembang. *Aamiin, Aamiin, Ya Robbal 'Alamiin.*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bupati Rembang



H. ABDUL HAFIDZ, SPd. I.



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang: a. bahwa dengan adanya perubahan terhadap asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi antar kegiatan dan antar jenis belanja, yang menyebabkan sisa lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 menjadi Peraturan Daerah;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan: 1. Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang pada tanggal 6 Agustus 2019;

2. Pendapat Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 6 Agustus 2019;

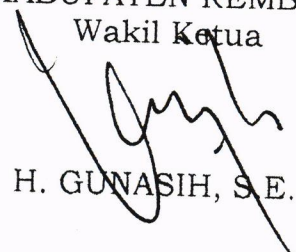
3. Pembicaraan-pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 6 Agustus 2019.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 beserta perubahan-perubahannya sebagaimana tersebut dalam Laporan Badan Anggaran untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- KEDUA : Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini kepada Bupati Rembang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 6 Agustus 2019
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Wakil Ketua


H. GUNASIH, S.E.



BERITA ACARA

NOMOR : 900 / / 2019

NOMOR : 900 / / 2019

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2019

Pada Hari ini **Selasa** tanggal **enam** bulan **Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas** kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **H. Abdul Hafidz, S.Pd.I** : Bupati Rembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang yang beralamat di jalan P. Diponegoro No 90 Rembang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **H. Majid Kamil MZ** : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
3. **H. Gunasih ,S.E.** : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
4. **H.M Bisri Cholil Laquf** : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
5. **Sumarsih** : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 menjadi

Peraturan Daerah yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir berita acara ini;

2. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditanda tangani Persetujuan Bersama ini .

Demikian Persetujuan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 6 Agustus 2019

BUPATI REMBANG

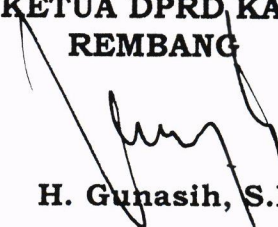


H. Abdul Hafidz, S.PdI

**KETUA DPRD KABUPATEN
REMBANG**

H. Majid Kamil MZ

**WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN
REMBANG**



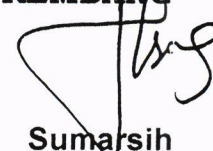
H. Gunasih, S.E.

**WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN
REMBANG**



H.M. Bisri Cholil Laquf

**WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN
REMBANG**



Sumarsih